



PENGANTAR **ILMU SOSIAL**

Syafrizal • Ismail Marzuki • Muhammad Iqbal • Syamsul Bahri
Bonaraja Purba • Hisarma Saragih • Windawati Pinem
Sardjana Orba Manullang • Jamaludin • Faizah Mastutie

PENGANTAR **ILMU SOSIAL**



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengantar Ilmu Sosial

Syafrizal, Ismail Marzuki, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri
Bonaraja Purba, Hisarma Saragih, Windawati Pinem
Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, Faizah Mastutie



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pengantar Ilmu Sosial

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Syafrizal, Ismail Marzuki, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri
Bonaraja Purba, Hisarma Saragih, Windawati Pinem
Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, Faizah Mastutie

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Syafrizal, dkk.

Pengantar Ilmu Sosial

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 204 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6840-53-5

Cetakan 1, Februari 2021

- I. Pengantar Ilmu Sosial
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, buku hasil karya kolaborasi dari beberapa penulis yang berjudul “Pengantar Ilmu Sosial” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak yang tertarik terhadap bidang keilmuan tersebut, khususnya dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi ilmu pengetahuan sosial.

Kehadiran buku kolaborasi merupakan sebuah fenomena baru di bidang akademik. Bagi sebagian pihak meyakini bahwa buku kolaborasi memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, karena ditulis oleh beberapa penulis dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda sehingga menghasilkan suatu karya yang unik dan kaya perspektif di dalamnya. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa buku hasil karya kolaborasi ini masih banyak memiliki sisi kelemahan dan kekurangan, untuk itu dengan senang hati dan secara terbuka kami menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Hal ini sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya berikutnya di waktu mendatang.

Buku ini membahas tentang:

Bab 1 Konsep Dasar Dan Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

Bab 2 Perbedaan Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Ilmu-Ilmu Alam, Dan
Hubungan Antara Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Ilmu-Ilmu Alam

Bab 3 Sosiologi

Bab 4 Antropologi

Bab 5 Ilmu Ekonomi

Bab 6 Sejarah

Bab 7 Ilmu Politik

Bab 8 Sosiologi Hukum

Bab 9 Tujuan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dipersekolahan Dan
Perkembangannya

Bab 10 Sosiologi Dalam Arsitektur

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya bidang ilmu pembangunan sosial dan kemasyarakatan serta cabang-cabangnya.

Februari 2021
Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab 1

Pengantar Ilmu Sosial - Konsep Dasar dan Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Paradigma: Definisi dan Penjelasan.....	4
1.2.1 Unsur-unsur Paradigma.....	6
1.3 Konsep Dasar	17
1.3.1 Konsep Dasar Ilmu-ilmu Sosial.....	18
1.4 Landasan Ilmu-Ilmu Sosial.....	38
1.4.1 Landasan Ilmu-Ilmu Sosial.....	39
1.5 Landasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.....	47

Bab 2

Perbedaan dan Hubungan Ilmu-Ilmu Sosial dengan Ilmu-ilmu Alam

2.1 Pendahuluan.....	51
2.2 Kedudukan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam terhadap Ilmu lain.....	54
2.3 Konsep Ilmu Sosial dan Ilmu Alam	57
2.4 Perbedaan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam.....	61
2.5 Hubungan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam	64
2.6 Kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Sosial Dasar terhadap Ilmu-Ilmu Sosial.....	67
2.7 Masa Depan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam di Era Digital.....	68

Bab 3

Sosiologi

3.1 Pendahuluan.....	71
3.2 Sejarah Kemunculan	72

3.3 Tokoh Perintis.....	73
3.4 Paradigma Sosiologi.....	74
3.5 Keterkaitan Sosiologi dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya	76
3.6 Beberapa Isu Kontemporer	77

Bab 4

Antropologi

4.1 Pendahuluan.....	79
4.2 Ruang Lingkup Antropologi	80
4.3 MakhluK Manusia	82
4.4 Kebudayaan	84
4.5 Masyarakat.....	88

Bab 5

Ilmu Ekonomi

5.1 Pendahuluan.....	89
5.2 Batasan, Definisi, dan Permasalahan Ilmu Ekonomi.....	90
5.3 Tindakan dan Prinsip Ekonomi	94
5.4 Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu-Ilmu Sosial.....	94
5.5 Ilmu Ekonomi dalam Pemerintahan	95
5.6 Hukum Ekonomi dan Keberlakuannya	96
5.7 Tujuan Ilmu Ekonomi	97

Bab 6

Ilmu Sejarah

6.1 Pendahuluan.....	99
6.2 Apa itu Sejarah?.....	100
6.2.1 Sejarah Dalam Pandangan Para Ahli	102
6.3 Sejarah Sebagai Peristiwa, Kisah, Ilmu, dan Seni.....	104
6.4 Generalisasi, Periodisasi, dan Kronologi.....	113
6.4.1 Generalisasi	113
6.4.2 Periodisasi.....	115
6.4.3 Kronologi.....	116
6.5 Kegunaan Sejarah.....	118
6.5.1 Guna sejarah secara Intrinsik	118
6.5.2 Guna Sejarah sebagai Ekstrinsik.....	120
6.6 Metode Penelitian Sejarah	122
6.7 Sejarah dan Ilmu Sosial.....	124

Bab 7**Konsep Dasar Dalam Ilmu Politik**

7.1 Pendahuluan.....	131
7.2 Negara	132
7.2.1 Konsep Negara.....	132
7.2.2 Sifat-Sifat Negara.....	133
7.2.3 Unsur-Unsur Negara.....	134
7.2.4 Bentuk Negara.....	134
7.3 Kekuasaan	135
7.3.1 Sumber Kekuasaan Politik	136
7.3.2 Model Distribusi Kekuasaan	137
7.4 Kebijakan (policy) & Pengambilan Keputusan (decision making)	138
7.5 Pembagian (distribution) dan Penempatan (allocation).....	139

Bab 8**Sosiologi Hukum**

8.1 Pengertian Sosiologi Hukum.....	141
8.2 Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum	146
8.3 Kegunaan Sosiologi Hukum	147
8.4 Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	148
8.5 Objek Sosiologi Hukum	150
8.6 Pengaruh Dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum Terhadap Sosiologi Hukum	154

Bab 9**Tujuan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial di Persekolahan dan
Perkembangannya**

9.1 Pendahuluan.....	159
9.2 Mencetak Warga Negara Hipotetik.....	162

Bab 10**Sosiologi Dalam Arsitektur**

10.1 Pendahuluan.....	169
10.2 Bagaimana Hubungan Sosiologi dan Arsitektur?.....	170
10.3 Konsep – Konsep Dasar Sosiologi yang penting dimaknai dalam Arsitektur ..	173
10.4 Proses Sosial dan Implementasinya dalam Desain Arsitektur	176

Daftar Pustaka	183
Biodata Penulis	199

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Segitiga peradaban hubungan manusia dan alam semesta yang melahirkan ilmu pengetahuan.....	56
Gambar 2.2: Skema Pengelompokan Tiga Ilmu Utama.....	59
Gambar 6.1: Sejarah dalam arti subjektif dan objektif.....	103
Gambar 10.1: Karya Y.B Mangunwijaya – Inovasi Sosial pada Penataan Kali Code.....	172
Gambar 10.2: Suasana kota Chandigarh sebelum dan sesudah diredisain....	173
Gambar 10.3: Ruang Personal dan Batasan Interaksinya	177
Gambar 10.4: Desain Tatahan Ruang Sosiopetal dan Sosiofugal.....	177
Gambar 10.5: Hirarki Teritori (a). Hunian Single Family (b) Hunian Multy Family, (c) Rumah Susun Pada Posisi Jalan.....	179
Gambar 10.6: Skema Model Privasi yang Dapat Dicapai Dengan Mempertimbangkan Ruang Personal dan Teritorialitas	181
Gambar 10.7: Penataan Ruang Privat Pada Teritori Publik ‘Taman Kota’(a) dan pada Teritori semi publik ‘Perpustakaan Kampus’ (b).....	182

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Perbedaan Ilmu-Ilmu Alam Dengan Ilmu-Ilmu Sosial.....	63
Tabel 2.2: Hubungan Ilmu-Ilmu Alam dengan Ilmu-Ilmu Sosial.....	65

Bab 1

Pengantar Ilmu Sosial - Konsep Dasar dan Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

1.1 Pendahuluan

Mengawali buku ini, penulis ingin berbagi tentang satu perkembangan yang sangat substansi berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam tulisan Heddy Shri Ahimsa-Putra (2017), dalam buku berjudul *Paradigma Ilmu Sosial Budaya: Sebuah Pandangan, Dalam Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia/ Ignas Kleden, Taufik Abdullah*, yang intinya berbicara masalah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam buku yang terbit pada tahun 1962, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu perdebatan di kalangan ahli filsafat ilmu dan sejarah ilmu pengetahuan di Barat.

Buku tersebut berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*, ditulis oleh Thomas Kuhn, diterbitkan kembali pada 1970. Buku itu menjadi kontroversial karena di dalamnya Kuhn mengajukan pendapat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda dengan yang selama ini diyakini oleh banyak ilmuwan dan ahli filsafat ilmu, yaitu mengikuti logika tertentu sebagaimana

dikemukakan Sir Karl Popper dalam *The Logic of Scientific Discovery* (1959). Buku Popper yang memuat teori falsifikasi (falsification) dan menolak teori verifikasi tersebut menjadi salah satu kitab suci filsafat ilmu pengetahuan di Barat. Tidak mengherankan jika salah satu perdebatan yang populer di Barat adalah mengenai proses perkembangan ilmu pengetahuan (the growth of science).

Buku Kuhn juga kontroversial karena di dalamnya Kuhn mengemukakan konsep penting yang kemudian sangat populer di kalangan para ilmuwan, yaitu konsep paradigma. Paradigma merupakan kata kunci terpenting dalam buku Kuhn karena menurutnya revolusi ilmu pengetahuan tidak lain adalah pergantian paradigma. Dengan kata lain, inti dari ilmu pengetahuan adalah paradigma. Di sini paradigma menggeser kata kunci yang selama ini selalu menjadi pegangan para ilmuwan, yaitu teori. Dalam pandangan Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan bukan hanya perkembangan teori, tetapi perkembangan paradigma. Sayangnya, Kuhn tidak memberikan penjelasan yang cukup baik mengenai konsep paradigma tersebut. Bahkan, dia tidak menggunakannya secara konsisten dalam tulisannya.

Dalam sebuah telaah kritisnya atas pandangan Thomas Kuhn mengenai paradigma, Margaret Masterman (1970) menemukan bahwa Kuhn ternyata telah menggunakan konsep paradigma dengan makna yang berbeda-beda dalam buku *The Structure*. Ada 21 makna paradigma yang ditemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kuhn tidak menggunakan kata kuncinya secara ajek (konsisten). Telaah saya atas beberapa tulisan Kuhn menemukan adanya 17 makna paradigma. Meskipun berbeda dalam hal jumlah, saya sepakat dengan Masterman, bahwa Kuhn tidak memiliki pandangan yang jelas, tegas, dan konsisten mengenai paradigam.

Kritik terhadap konsep paradigma juga datang dari para ahli yang lain. Sebagian mengatakan bahwa konsep tersebut tidak banyak artinya bagi kajian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan karena maknanya yang tidak begitu jelas (Shapere, 1989), meskipun Kuhn telah mencoba menjelaskan kembali pandangannya tentang paradigma dalam *Postscriptnya* pada 1972. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Kuhn telah menggelembungkan makna paradigma tersebut sedemikian rupa sehingga konsep tersebut kehilangan daya analisisnya. Pendapat Kuhn mengenai revolusi ilmu pengetahuan juga tidak sepenuhnya benar (Percival, 1976; Restivo, 1983; Shapere, 1989; Toulmin, 1970).

Dalam ilmu sosial, konsep paradigma pernah dikemukakan oleh Robert Merton (1968) dalam paparannya mengenai telaah fungsional dalam ilmu-ilmu sosial. Namun ide Merton tidak mendapat banyak tanggapan dari ilmuwan lain dan tidak memicu perdebatan di kalangan ilmuwan sosial. Salah satu penyebabnya saya kira adalah Merton tidak membahas konsep tersebut secara mendalam dan memanfaatkannya untuk analisis. Merton lebih banyak menyajikan fungsi paradigma daripada membahas paradigma itu sendiri, padahal paradigma juga belum begitu jelas maknanya dalam uraian Merton.

Beberapa ilmuwan lain, seperti Bottomore (1975); Kucklik, (1972), Masterman (1970), Kvasz (1999), juga pernah membahas paradigma, tetapi lagi-lagi mereka tidak menjelaskan pandangan mereka sendiri tentang paradigma tersebut dengan memuaskan. Berkenaan dengan dua topik perdebatan, (pertumbuhan ilmu pengetahuan dan konsep paradigma), tulisan ini membahas topik yang kedua, yaitu mengenai paradigma.

Topik inilah yang menurut saya lebih relevan untuk konteks Indonesia berdasarkan tiga alasan, antara lain:

1. paradigma merupakan elemen yang sangat penting dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan.
2. Hingga saat ini belum ada kesepakatan di kalangan ilmuwan Indonesia berkenaan dengan “hakikat” atau sifat dan ciri dari paradigma itu sendiri.
3. Sangat sedikit untuk tidak mengatakan belum ada perbincangan yang serius mengenai paradigma di kalangan ilmuwan di Indonesia.

Dengan menawarkan sebuah konsepsi (pandangan) mengenai paradigma di sini, saya berharap akan muncul perbincangan yang lebih ramai dan serius mengenai paradigma, dan memudahkan para ilmuwan mengembangkan paradigma-paradigma baru dalam bidang masing-masing dengan lebih mudah, lebih sistematis, dan lebih cepat. Sebelum paradigma menjadi sebuah konsep yang populer, para ilmuwan sosial budaya telah menggunakan beberapa konsep lain dengan makna yang kurang lebih sama, yakni kerangka teoritis (theoretical framework), kerangka konseptual (conceptual framework), kerangka pemikiran (frame of thinking), orientasi teoritis (theoretical orientation), sudut pandang (perspektif), atau pendekatan (approach).

1.2 Paradigma: Definisi dan Penjelasan

Pembicaraan di sini, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan frasa-frasa dalam definisi ini. Dalam frasa “Seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk suatu kerangka pemikiran...” kata seperangkat menunjukkan bahwa paradigma memiliki sejumlah unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur ini adalah konsep-konsep, yaitu istilah-istilah atau kata yang diberi makna tertentu. Makna inilah yang biasanya disebut definisi. Oleh karena itu, sebuah paradigma pada dasarnya juga merupakan kumpulan istilah-istilah dengan definisi-definisi tertentu.

Kumpulan istilah ini membentuk sebuah kesatuan karena mereka ini berhubungan satu dengan yang lain secara logis, yakni secara paradigmatik dan sintagmatik (lihat Ahimsa-Putra, 2007), seperti halnya unsur-unsur dalam bahasa atau wacana. Ini berarti relasi antar unsur dalam paradigma berada pada tataran logika, pada tataran pemikiran. Oleh karena itu, kumpulan konsep yang membentuk kerangka itu disebut juga sebagai kerangka pemikiran (Ahimsa-Putra, 2009).

Kerangka pemikiran atau paradigma fungsionalisme-struktural dalam ilmu sosial budaya, misalnya, terdiri atas banyak konsep dengan makna-makna tertentu, seperti konsep fungsi, kebutuhan, integrasi, sistem, batas, interaksi, relasi, unsur, adaptasi, latency, goal attainment, dan sebagainya. Konsep-konsep ini mempunyai makna-makna tertentu sebagaimana didefinisikan oleh para penganut aliran fungsionalisme-struktural. Memang, tidak selalu ada kesepakatan seratus persen di kalangan ilmuwan sosial budaya berkaitan dengan definisi atau makna yang diberikan pada sebuah konsep. Akan tetapi, perbedaan definisi atas sebuah konsep yang ada di kalangan para penganut sebuah paradigma atau kerangka teori yang sama biasanya tidak terlalu besar sehingga komunikasi ilmiah di antara mereka dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Frasa-frasa yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi, bermakna bahwa dalam fikiran manusia, kerangka pemikiran ini digunakan untuk tujuan tertentu. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk memahami kenyataan, mendefinisikan kenyataan,

menentukan kenyataan yang dihadapi, menggolongkannya ke dalam kategori-kategori, dan kemudian menghubungkannya dengan definisi kenyataan lainnya sehingga terjalin relasi-relasi pada pemikiran tersebut. Relasi-relasi tersebut kemudian membentuk suatu gambaran tentang kenyataan yang dihadapi. Kenyataan yang dihadapi menimbulkan berbagai akibat atau reaksi dalam pikiran manusia.

Salah satu di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan atau rasa tidak puas karena kenyataan yang dihadapi tidak dapat dipahami dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada atau kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan dan ketidakpuasan ini selanjutnya mendorong manusia untuk menjawab pertanyaan tersebut atau mencari jalan guna mengatasi ketidakpuasan yang ada dalam dirinya. Artinya, paradigma tidak hanya ada di kalangan ilmuwan saja, tetapi juga di kalangan orang awam, di kalangan semua orang, dari semua golongan, lapisan, kelompok, dan semua suku bangsa.

Namun, tidak berarti setiap orang menyadari kerangka pemikirannya sendiri. Bahkan, sebagian besar orang sebenarnya tidak menyadari atau tidak mengetahui seperti apa kerangka pemikiran yang dimilikinya yang digunakannya untuk memahami situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini hanya dapat muncul dari kalangan mereka yang dapat melakukan refleksi atas apa yang mereka pikirkan sendiri, yang mengetahui dan dapat menggunakan metode-metode dan prosedur yang harus digunakan dalam proses refleksi tersebut.

Banyak sarjana Indonesia telah menggunakan kerangka pemikiran fungsionalisme-struktural dalam penelitian mereka atas gejala-gejala sosial budaya di Indonesia. Akan tetapi, tidak banyak yang betul-betul menyadari bahwa kerangka pemikiran tersebut telah mereka gunakan dalam aktivitas ilmiah mereka. Akibatnya, meskipun sebagian kajian dapat dikatakan telah menghasilkan teori fungsional-struktural tertentu, ilmunya sendiri ternyata tidak selalu mampu membuatnya eksplisit menjadi sebuah teori fungsional-struktural mengenai gejala sosial budaya tertentu.

Tidak mengherankan jika ilmuwan kita terasa kurang memberikan sumbangan teoritis pada wacana keilmuan yang telah berkembang di berbagai bidang. Bagi upaya pengembangan atau pembuatan paradigma baru, pendefinisian konsep paradigma dan penjelasannya saja belum cukup karena dalam konsepsi paradigma tersebut terdapat berbagai macam unsur yang masih perlu

dijelaskan lagi. Frasa “seperangkat konsep” barulah merujuk pada sebuah gambaran umum tentang isi kerangka pemikiran tersebut, padahal konsep-konsep di dalamnya tidak sama kedudukan dan fungsinya sehingga memiliki nama yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang komponen-komponen konseptual yang membentuk kerangka pemikiran atau paradigma tersebut. Apa saja komponen-komponen konseptual atau unsur-unsur pemikiran yang membentuk sebuah paradigma dalam ilmu sosial budaya?

1.2.1 Unsur-unsur Paradigma

Cuff dan Payne mengatakan bahwa sebuah perspektif dalam ilmu sosial budaya biasanya dapat dibedakan satu sama lain atas dasar asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan dasarnya tentang objek yang diteliti, masalah-masalah yang ingin diselesaikan, konsep-konsep, metode-metode serta teori-teorinya (Cuff & Payne, 1979, 3). Di sini tersirat pandangan bahwa sebuah perspektif atau pendekatan mereka berdua tidak menyebutnya paradigma memiliki sejumlah unsur, diantaranya asumsi dasar, konsep, metode, pertanyaan, dan jawaban-jawaban yang diberikan. Jika “perspektif” adalah juga “paradigma” maka unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigma.

Akan tetapi, pandangan tentang unsur-unsur ini menurut saya masih belum lengkap. Masih ada elemen-elemen lain yang belum tercakup di dalamnya, misalnya unsur model. Selain itu, unsur metode juga masih perlu dirinci lagi. Cuff dan Payne juga masih belum menjelaskan bagaimana kira-kira urutan unsur-unsur tersebut dalam sebuah paradigma atau kerangka berpikir tertentu. Lebih dari itu, mereka juga tidak selalu menjelaskan secara rinci makna dari unsur-unsur paradigma tersebut sehingga kita tidak selalu dapat mengetahui dengan baik apa yang mereka maksudkan.

Terlepas dari sejumlah kekurangan yang ada, pandangan Kuhn, Cuff, dan Payne setidaknya telah membukakan sebuah jalan untuk sampai pada sebuah rumusan mengenai paradigma yang lebih jelas, sistematis dan rapi serta lebih dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan paradigma itu sendiri. Mengikuti jalan pikiran yang telah mereka buka, saya berpendapat bahwa sebagai sebuah kerangka pemikiran, paradigma dalam ilmu sosial-budaya terdiri dari sejumlah unsur pokok yang saling berhubungan secara logis.

Unsur-unsur tersebut adalah (1) asumsi-asumsi dasar, (2) nilai-nilai, (3) masalah-masalah yang diteliti, (4) model, (5) konsep-konsep, (6) metode penelitian, (7) metode analisis, (8) hasil analisis atau teori, dan (9) representasi (Ahimsa-Putra, 2009).

Berikut adalah uraian mengenai komponen-komponen paradigma tersebut, yang menurut saya perlu diberikan, mengingat jarangya pembicaraan paradigma yang membahas unsur-unsur tersebut serta menjelaskannya dengan rinci:

Asumsi-asumsi/Anggapan-anggapan Dasar (Basic Assumptions)

Asumsi dasar merupakan unsur paradigma yang dianggap sangat penting dalam wacana ilmiah di Barat karena merupakan pokok-pokok pikiran yang mendasari sebuah paradigma. Pembahasan mengenai berbagai macam hal umumnya selalu mengemukakan sejumlah asumsi dasar yang menjadi landasannya. Asumsi atau anggapan dasar dapat didefinisikan sebagai pandangan-pandangan mengenai suatu hal (bisa berupa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya) yang sudah diterima kebenarannya. Pandangan-pandangan ini tidak dipertanyakan lagi dan merupakan dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan. Asumsi-asumsi dasar ini bisa lahir dari (i) perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, (ii) pengamatan yang saksama, dan bisa pula dari (iii) penelitian-penelitian yang saksama atas berbagai macam gejala empiris.

Jika asumsi ini berasal dari pandangan filosofis dan reflektif, pandangan ini biasanya mirip dengan ideologi si ilmuwan dan ini tentu saja bersifat subjektif. Oleh karena itu, kini muncul pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada objektivitas dalam ilmu sosial-budaya sebab apa yang selama ini dianggap sebagai objektivitas ternyata juga didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu, yang tidak berbeda dengan ideologi. Asumsi-asumsi dasar biasanya tersirat dalam rumusan-rumusan tentang hakikat sesuatu atau definisi mengenai sesuatu yang dipelajari, dan ini biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan “Apa itu...?”, misalnya, “Apa itu kebudayaan?”, “Apa itu masyarakat?”, “Apa itu karya sastra?”, dan sebagainya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini pada umumnya menyatakan sejumlah asumsi yang melatarbelakangi jawaban yang diajukan.

Seperti halnya fondasi sebuah gedung yang tidak terlihat, demikian pula asumsi dasar. Suatu paradigma dalam ilmu sosial budaya biasanya mempunyai banyak asumsi dasar. Akan tetapi, tidak semua asumsi dasar ini selalu

dikemukakan secara eksplisit. Bahkan, kadang-kadang malah tidak dipaparkan sama sekali karena semua orang dianggap telah mengetahuinya. Ada pula ilmuwan yang melakukan ini atas dasar anggapan bahwa menyatakan secara eksplisit asumsi-asumsi dasar yang dijadikan landasan sama dengan membukakan pintu kepada ilmuwan lain untuk melakukan kritik yang telak terhadap kajian yang dilakukannya. Oleh karena itu, tidaklah terlalu mengherankan jika sebagian ilmuwan tidak mengetahui dengan baik asumsi-asumsi dasar paradigma yang digunakannya dalam mempelajari suatu gejala sosial budaya. Banyak di antara kita, misalnya, yang mengetahui teori evolusi masyarakat dan kebudayaan dari tokoh-tokoh, seperti L. H. Morgan, H. Spencer, E.B. Tylor, H. Maine, dan sebagainya, namun tidak banyak mungkin yang mengetahui asumsi-asumsi dasar di balik berbagai macam teori-teori evolusi mereka.

Mengapa digunakan istilah asumsi, bukan dalil atau hukum, jika memang kebenarannya sudah diterima? Istilah asumsi digunakan karena tidak semua orang dapat dipastikan bersedia menerimanya. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan kebenaran tersebut. Jadi, kebenaran di situ dianggap relatif. Diskusi yang lebih eksplisit tentang asumsi dasar biasanya sudah berada pada tataran yang berbeda dengan diskusi tentang teori-teori yang dihasilkan oleh kajian-kajian yang didasarkan pada asumsi-asumsi tersebut. Dalam paradigma ilmu sosial-budaya, asumsi dasar ini paling tidak selalu mengenai “hakikat” dari (i) manusia, (ii) gejala sosial-budaya, (iii) ilmu pengetahuan, (iv) ilmu sosial-budaya, (v) dan salah satu cabang ilmu sosial budaya (antropologi, arkeologi, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu politik, sosiologi, dan sebagainya). Asumsi-asumsi dasar mengenai hakikat dari ini semua merupakan pandangan filosofis, yang sebagian berasal dari para pemikir (filsuf) dan sebagian lagi dari para ilmuwan sosial budaya.

Nilai-Nilai (values)

Selain asumsi dasar, unsur lain yang mendasari setiap paradigma adalah sejumlah kriteria atau patokan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, dan bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan inilah yang biasa disebut “nilai”. Dinyatakan atau tidak, nilai-nilai selalu ada di balik setiap kegiatan ilmiah karena di situ selalu ada persoalan benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dengan patokan ini pula seorang ilmuwan akan menilai hasil penelitian ilmuwan yang lain, kinerja mereka atau produktivitas mereka.

Meskipun nilai-nilai ini pada umumnya menyatakan tentang hal-hal yang baik atau yang seharusnya, sebenarnya nilai-nilai yang berkenaan dengan yang tidak baik atau yang buruk. Oleh karena itu, bisa pula nilai yang dibuat eksplisit bukanlah yang baik, tetapi yang buruk. Hal ini dilakukan mungkin dengan tujuan agar para ilmuwan dapat lebih terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Dalam sebuah paradigma ilmu sosial budaya, nilai-nilai ini paling tidak mengenai (i) ilmu pengetahuan, (ii) ilmu sosial-budaya, (iii) penelitian ilmiah, (iv) analisis ilmiah, dan (v) hasil penelitian. Nilai-nilai ini selalu ada dalam setiap cabang ilmu, tetapi rumusan, penekanan dan keeksplisitannya berbeda-beda. Ada cabang ilmu pengetahuan yang nilainya lebih menekankan pada manfaat ilmu, tetapi bersifat implisit. Namun pada disiplin lain, nilai ini dibuat sangat eksplisit. Nilai-nilai mana yang ditekankan oleh suatu komunitas atau organisasi ilmuwan bisa berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat tempat para ilmuwan tersebut menjalankan aktivitas keilmuan mereka.

Ilmuwan sosial Amerika Serikat, misalnya, mungkin saja menekankan nilai-nilai tertentu yang bagi ilmuwan sosial-budaya di negeri lain kurang begitu penting. Nilai-nilai ini sebenarnya sangat banyak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru sangat sedikit yang dinyatakan secara eksplisit. Inilah mungkin yang membuat para ilmuwan sering kali tidak tahu bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak selaras dengan atau bahkan melanggar nilai-nilai yang mendasari kegiatan ilmiah mereka. Sebagai contoh, berkenaan dengan ilmu, dalam ilmu sosial budaya ada yang mengatakan, “ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat membuat masyarakat dan budayanya lebih baik keadaannya dari waktu ke waktu”; atau “ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat memperluas wawasan kemanusiaan warga masyarakat pada umumnya.

Model (model)

Unsur ketiga dalam paradigma adalah model atau perumpamaan, analogi, kiasan atas gejala yang dipelajari. Sepintas lalu model juga terlihat seperti asumsi dasar, tapi model berbeda dengan asumsi dasar. Sebagai perumpamaan dari suatu kenyataan, sebuah model bersifat menyederhanakan (Inkeles, 1964). Artinya, tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari kenyataan dapat tampil dalam sebuah model. Dalam paradigma ilmu sosial budaya, model dapat dibedakan menjadi dua, yakni (i) model utama (primary model) dan model pembantu (secondary model). Model yang dimaksudkan di sini adalah primary model.

Model utama merupakan model yang lebih dekat dengan asumsi dasar. Model ini menjadi pembimbing seorang peneliti dalam mempelajari suatu gejala. Model ini bisa berupa kata-kata (uraian) maupun gambar, namun pada umumnya berupa uraian. Berbeda halnya dengan model pembantu yang umumnya berupa gambar, dan biasa digunakan untuk memudahkan seorang ilmuwan menjelaskan hasil analisis atau teorinya. Model ini bisa berupa diagram, skema, bagan atau sebuah gambar, yang akan membuat orang lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh seseorang. Model utama harus sudah ada sebelum seorang peneliti melakukan penelitiannya, namun model pembantu biasanya muncul dalam hasil analisis atau setelah penelitian dan analisis dilakukan. Sebagai perumpamaan dari suatu gejala atau realita tertentu, sebuah model bersifat menyederhanakan gejala itu sendiri.

Artinya, tidak semua aspek, sifat atau unsur dari gejala tersebut ditampilkan dalam model. Seorang peneliti yang mengawali penelitiannya dengan mengatakan bahwa kebudayaan itu seperti organisme atau makhluk hidup, pada dasarnya dia telah menggunakan model organisme dalam penelitiannya. Apakah kebudayaan itu organisme? Tentu saja bukan. Akan tetapi, orang boleh saja mengumpamakannya seperti organisme karena memang ada kenyataan-kenyataan yang dapat mendukung pemodelan seperti itu. Jadi, sebuah model muncul karena adanya persamaan-persamaan tertentu antara fenomena yang dengan fenomena yang lainnya.

Masalah yang Diteliti (Research Questions)

Ada berbagai pendapat mengenai makna masalah penelitian, demikian pula dalam menyatakannya. Ada yang menggunakan istilah masalah penelitian, ada yang permasalahan penelitian, ada juga pertanyaan penelitian. Hal yang jelas adalah suatu penelitian selalu berawal dari kebutuhan untuk: (i) memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu atau keinginan (ii) membuktikan kebenaran dugaan-dugaan tertentu secara empiris. Oleh karena itu, dalam kegiatan penelitian, masalah penelitian biasanya muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesis yang ingin diuji kebenarannya.

Dalam hal ini, setiap paradigma memiliki masalah-masalahnya sendiri, karena sebagaimana dikatakan oleh Kuhn sebuah paradigma pada dasarnya muncul ketika ada pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan paradigma yang ada. Penelitian untuk memenuhi kebutuhan pertama selalu berawal dari sejumlah pertanyaan mengenai gejala-gejala

tertentu yang dianggap menarik, aneh, mengkhawatirkan, menakutkan, merugikan, dan seterusnya, sedangkan penelitian kedua selalu berawal dari sejumlah pernyataan yang masih perlu dan ingin dibuktikan kebenarannya atau hipotesis.

Oleh karena itu, dalam setiap penelitian, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dan atau hipotesis-hipotesis yang ingin dibuktikan. Penelitian yang berawal dari beberapa pertanyaan tidak perlu lagi menggunakan hipotesis, demikian pula penelitian yang berawal dari sejumlah hipotesis, tidak perlu lagi menggunakan pertanyaan. Namun, jika suatu penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sekaligus menjawab hipotesis, hal itu juga tidak dilarang walaupun ini mungkin malah akan menambah beban penelitiannya.

Perlu diingat di sini bahwa setiap pertanyaan atau hipotesis pada dasarnya menyimpan asumsi-asumsi dasar berkenaan dengan gejala yang diteliti, tujuan meneliti, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu selalu memperhatikan dan menganalisis dengan saksama pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis-hipotesis yang dirumuskannya. Hanya dengan begitu dia dapat menentukan dengan tepat paradigma yang akan digunakannya untuk mempelajari gejala yang dipilihnya. Dengan demikian, kita tahu sekarang bahwa sebuah paradigma tidak dapat ditentukan lebih dulu penggunaannya, sebelum diketahui pertanyaan penelitian atau hipotesisnya. Jadi, selama pertanyaan penelitian atau hipotesis belum dirumuskan, selama itu pula paradigmanya belum dapat ditentukan.

Kata Kunci (Keywords)

Kata kunci adalah istilah yang sekarang biasa digunakan untuk menyebut konsep-konsep pokok atau konsep yang digunakan untuk menganalisis dan memahami gejala yang dipelajari. Pada masa lampau, kata kunci belum dianggap memiliki kedudukan penting dalam wacana ilmiah. Kini, para ilmuwan menyadari bahwa kata kunci merupakan salah satu elemen pokok dalam sebuah paradigma sehingga tidak ada penelitian ilmiah yang tidak menggunakan kata-kata kunci.

Hal ini tercermin jelas dari tuntutan yang diberikan pada ilmuwan untuk mencantumkan kata-kata kunci yang mereka gunakan dalam penelitian ketika mereka menuliskan hasil penelitian tersebut dalam sebuah jurnal ilmiah. Di sini kata kunci atau konsep pokok secara sederhana didefinisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya

dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial budaya yang dipelajari.

Setiap paradigma pasti memiliki sejumlah kata kunci yang membuatnya berbeda dengan paradigma yang lain. Kata kunci yang sangat penting di situ biasanya juga menjadi nama dari paradigma tersebut. Paradigma strukturalisme, misalnya, secara jelas menunjukkan bahwa kata kunci terpenting di situ adalah struktur. Berbeda dengan paradigma evolusionisme yang kata kuncinya adalah evolusi. Berbeda lagi dengan paradigma postmodernisme, yang kata kuncinya adalah postmodern.

Ketika sebuah istilah diberi makna tertentu oleh seorang ilmuwan yang kebetulan membutuhkan istilah tersebut untuk dapat menjelaskan sebuah gejala, pada saat itulah istilah tersebut berdasarkan definisi di atas menjadi konsep. Sebagai contoh, kata kebudayaan. Pada mulanya, istilah kebudayaan adalah istilah sehari-hari, yang kemudian diberi definisi oleh orang-orang tertentu, diantaranya Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, beberapa orang lain memberikan definisi baru, di antaranya Koentjaraningrat. Semenjak itu, kata kebudayaan menjadi sebuah konsep yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial budaya, khususnya lagi dalam antropologi.

Istilah-istilah seperti masyarakat, sosialisasi, enkulturasi, integrasi sosial, konflik, dan sebagainya merupakan konsep-konsep. Karena sebagian besar istilah-istilah ini dalam kehidupan sehari-hari tidak jelas maknanya (terbukti banyak orang tidak dapat menjelaskannya dengan baik kalau ditanya), para ilmuwan sosial budaya kemudian berusaha merumuskan makna istilah-istilah tersebut agar istilah-istilah itu kemudian dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan peristiwa dan gejala sosial budaya. Hal ini memang perlu dilakukan karena seorang ilmuwan tidak bekerja sendirian. Kerja ilmiah atau kerja membangun sebuah perangkat pengetahuan yang ilmiah adalah sebuah kerja sosial atau kerja kolektif. Kerja kolektif ini hanya akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika yang terlibat di dalamnya menggunakan “satu bahasa” dan menggunakan sistem pemaknaan yang kurang lebih sama.

Metode-Metode Penelitian (Methods Of Research)

Metode penelitian atau pengumpulan data merupakan elemen yang harus ada dalam setiap paradigma. Berkenaan dengan ini, para ilmuwan sosial-budaya seringkali membedakan metode penelitian menjadi dua, yaitu (i) metode penelitian kuantitatif dan (ii) metode penelitian kualitatif. Sayangnya, ketika mereka ditanya “di mana letak kualitatifnya dan kuantitatifnya sebuah

metode?”, mereka umumnya tidak dapat menjawab. Selain itu, banyak juga ilmuwan sosial-budaya yang hanya mengetahui satu jenis metode saja, yaitu kuantitatif, metode sehingga semua masalah selalu diteliti dengan menggunakan metode yang sama.

Padahal, mestinya tidak demikian. Lebih dari itu, karena tidak mengetahui jenis metode penelitian yang lain, metode penelitian itulah yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya metode penelitian yang ilmiah dan paling benar. Malangnya lagi, metode penelitian yang dianggap sebagai yang paling benar ini pun ternyata tidak selalu dikuasai dengan baik. Untuk menghindari kesimpangsiuran wacana tentang metode disini, perlu disepakati terlebih dulu beberapa hal.

Pertama, kata penelitian di sini harus diartikan sebagai ‘proses pengumpulan data’. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak lain adalah metode atau cara untuk memperoleh, mengumpulkan, data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, yang bersifat “kuantitatif” atau “kualitatif” bukanlah metodenya, tetapi datanya. Sifat data ini turut menentukan cara kita untuk mendapatkannya. Untuk itu, kita perlu tahu ciri-ciri penting yang ada pada masing-masing data. Dilihat dari sudut pandang ini, sebenarnya tidak ada pemisahan dan tidak perlu ada pemisahan yang sangat tegas dan kaku antara “penelitian kualitatif” dan “penelitian kuantitatif”, sebagaimana sering dilakukan oleh sebagian ilmuwan sosial budaya yang kurang memahami metode-metode penelitian.

Kedua, metode penelitian tidak sama dengan metode analisis, sehingga keduanya perlu dipisahkan. Keduanya menuntut kemampuan yang berbeda. Mereka yang mahir melakukan penelitian atau pengumpulan data, belum tentu sangat mampu dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Sebaliknya, mereka yang mampu menganalisis data dengan baik, belum tentu memiliki kemampuan yang sama baiknya dalam mengumpulkan data. Sehubungan dengan itu, perlu selalu diingat bahwa persoalan utama dalam penelitian adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dengan memuaskan dan meyakinkan. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada data yang berhasil dihimpun baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif atau kedua-duanya.

Metode-Metode Analisis (Methods of Analysis)

Metode analisis data pada dasarnya adalah cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data kualitatif maupun kuantitatif agar kemudian dapat

ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain. Sebagaimana halnya metode penelitian, metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif harus diartikan sebagai metode menganalisis data kualitatif dan metode menganalisis data kuantitatif.

Pertanyaannya kemudian, seperti apa metode analisis data kuantitatif dan seperti apa pula metode analisis data kualitatif? Mengelompokkan data kuantitatif memerlukan siasat atau cara yang berbeda dengan mengelompokkan data kualitatif karena sifat dan ciri data tersebut memang berbeda. Saya tidak akan membicarakan analisis data kuantitatif karena itu bukan tujuan utama tulisan ini dan setahu saya hal itu sudah banyak diajarkan dalam kuliah-kuliah mengenai metode penelitian. Tidak demikian halnya dengan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif pada dasarnya sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan di antara data kualitatif. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan baik apabila konsep-konsep teoritis yang digunakan telah didefinisikan dengan baik juga.

Persamaan dan perbedaan pada data kualitatif ini tidak begitu mudah ditemukan, namun jika pada saat pengumpulan data ini sudah dikelompokkan terlebih dulu, hal itu akan mempermudah proses analisis lebih lanjut. Sebagai contoh adalah data mengenai sistem kepercayaan. Data kualitatif yang terkumpul hanya akan memadai untuk dianalisis bila definisi sistem kepercayaan ini sedemikian rupa sehingga dapat mencakup berbagai gejala empiris yang tergolong dalam "sistem kepercayaan". Definisi sistem ini, paling tidak, harus dapat merangkum kegiatan ritual, upacara, mitos-mitos serta pandangan-pandangan mengenai dunia supranatural. Tanpa definisi semacam ini, data yang terkumpul tidak akan lengkap, dan tanpa data yang cukup lengkap, persamaan dan perbedaan dalam data tidak akan mudah terlihat sehingga analisis akan sulit dilakukan.

Berkenaan dengan metode analisis ini hal yang paling perlu diperhatikan adalah tujuan akhir dari kerja analisis itu sendiri. Kita harus selalu bertanya: analisis ini ditujukan untuk memberikan hasil seperti apa? Hasil ini harus merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, dengan memperhatikan secara seksama pertanyaan penelitian, sebenarnya kita sudah dapat menentukan sejak awal metode analisis seperti apa yang akan dilakukan atau kita perlukan. Meskipun ada berbagai macam jenis metode analisis, secara umum kita dapat mengatakan bahwa tujuan akhir analisis adalah menetapkan hubungan-hubungan antara suatu variabel/gejala/unsur tertentu dengan

variabel/gejala/unsur yang lain, dan menetapkan jenis hubungan yang ada di situ.

Hasil Analisis/ Teori (Results of Analysis/Theory)

Setelah peneliti menganalisis data, dia akan memperoleh hasil tertentu. Hasil analisis dapat kita sebut “simpulan” yang menyatakan relasi antar variabel, antar unsur atau antar gejala yang diteliti atau menyatakan “hakikat” dari gejala yang diteliti. Inilah yang disebut teori dan ini merupakan tujuan akhir dari setiap penelitian. Teori ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, teori juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai hakikat sesuatu (gejala yang diteliti) atau mengenai hubungan antar variabel atau antar gejala yang diteliti, yang sudah terbukti kebenarannya.

Kalau cakupan (scope) penelitian kita luas, data yang kita analisis berasal dari banyak masyarakat dan kebudayaan, dan teori yang kita kemukakan dapat memberikan penjelasan yang berlaku umum, universal, melampaui batas-batas ruang dan waktu, maka hal itu akan disebut sebagai teori besar (grand theory). Kalau teori tersebut hanya ditujukan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu yang agak umum, namun tidak cukup universal sehingga lebih tepat disebut teori menengah (middle range theory) (Merton, 1968). Jika teori tersebut hanya berlaku untuk gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan yang diteliti, teori itu lebih tepat disebut teori kecil (small theory).

Dalam ilmu sosial budaya, seperti antropologi budaya, teori-teori yang dihasilkan tidak cukup jika hanya dipaparkan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang menyatakan relasi- relasi antar variabel, sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi atau ilmu-ilmu alam. Untuk dapat meyakinkan publik yang lebih luas, teori-teori ini biasanya disajikan dalam satu kesatuan dengan deskripsi mengenai kebudayaan atau masyarakat yang diteliti, yakni dengan etnografi atau representasinya.

Representasi (Representation, Ethnography, Historiography)

Representasi merupakan tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian atas satu atau lebih gejala dengan menggunakan paradigma tertentu. Dalam dunia keilmuan, representasi ini berupa laporan penelitian, makalah seminar, artikel jurnal ilmiah, atau buku. Representasi ini merupakan bukti yang paling konkret dari seorang ilmuwan bahwa dia telah melakukan penelitian. Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian

bertahun-tahun mengenai suatu masalah tidak akan diketahui atau dipercaya oleh orang lain bahwa dia telah melakukan penelitian tersebut jika tidak mampu menghasilkan tulisan ilmiah dari penelitiannya tersebut.

Sebaliknya, seorang peneliti yang hanya beberapa minggu melakukan penelitian, tetapi dapat menuliskan hasil penelitian itu dan menerbitkannya dalam jurnal ilmiah, dengan sendirinya akan dipercaya telah melakukan penelitian tersebut. Bahkan, mungkin orang akan mengiranya telah melakukan penelitian selama berbulan-bulan atau beberapa tahun.

Representasi yang berisi teori juga menunjukkan bahwa peneliti telah siap diuji oleh khalayak yang lebih luas berkenaan dengan teori yang dipaparkannya di situ. Dia telah siap menjelaskan pendapat-pendapatnya di situ kepada ilmuwan lain. Bahkan, seorang ilmuwan yang baik akan selalu menerbitkan hasil-hasil penelitiannya untuk mendapatkan tanggapan kritis dari ilmuwan lain, yang kemudian akan memungkinkannya memperbaiki atau memperjelas teori-teori yang dikemukakannya.

Etnografi adalah istilah yang biasa digunakan dalam antropologi untuk menyebut representasi tersebut. Para sejarawan menyebutnya historiografi . Para ahli arkeologi menyebutnya paleo etnografi. Sebuah etnografi pada dasarnya adalah sebuah representasi kebudayaan. Karena representasi ini menggunakan media bahasa dan tulisan, strategi retorika dan penyajian merupakan dua hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses representasi. Oleh karena itu, sebuah representasi tidak bisa objektif sepenuhnya. Selalu ada unsur subjektivitas yang tidak mudah ditentukan kadar, jumlah, atau bobotnya.

Representasi juga merupakan bukti keberadaan sebuah paradigma karena sebuah representasi hanya dapat dihasilkan oleh seorang peneliti jika dia memiliki paradigma keilmuan. Sebuah paradigma dalam ilmu sosial budaya belum akan terlihat sebagai sebuah paradigma sebelum ada representasinya. Dalam antropologi budaya, misalnya, sebuah paradigma yang belum menghasilkan etnografi tertentu belum dapat dikatakan sebagai paradigma karena keberadaannya belum diketahui. Malinowski diakui sebagai tokoh pelopor paradigma fungsionalisme Paradigma Ilmu Sosial Budaya karena mampu menghasilkan sebuah etnografi dengan corak baru, yang fungsionalistis.

1.3 Konsep Dasar

Konsep dasar adalah susunan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Konsep itu bersifat abstrak bersumber dari gagasan atau pemikiran. Konsep dasar ini sangat diperlukan untuk membuat inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap ilmu memiliki konsep dasarnya tersendiri yang membuat ilmu pengetahuan itu berbeda dari yang lain, bisa jadi karena tujuan, objek dan ruang lingkupnya yang berbeda. Selain itu, konsep juga merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, sekaligus suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Menurut Dorothy J. Skeel (1979), konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran-suatu pemikiran, gagasan atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret maupun gagasan yang abstrak.

Sedangkan James G. Womack (1970), mengemukakan konsep sebagai berikut: Konsep Studi Sosial yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat. Pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat bergantung pada penguasaan sifat yang melekat pada pengertian umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif.

Berdasarkan dua acuan konsep tadi, dapat dikemukakan bahwa konsep itu tidak lain adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang menceritakan suatu benda atau suatu gagasan, baik konkret maupun abstrak. Konsep IPS tentu saja adalah suatu pengertian yang mencitrakan suatu fenomena atau benda yang berkaitan dengan IPS. Konsep tentang fenomena atau benda yang berkenaan dengan IPS itu memiliki pengertian denotatif dan terutama pengertian konotatif.

Pengertian denotatif adalah pengertian berdasarkan arti katanya yang dapat digali dalam kamus, sedangkan pengertian konotatif adalah pengertian yang tingkatannya tinggi dan luas. Pengertian konotatif ini, merupakan pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Konsep dalam pengertian konotatif inilah yang menjadi pembahasan pada bahan ajar ini. Konsep yang memiliki pengertian dasar pada suatu bidang ilmu sosial, disebut konsep dasar. Selanjutnya, marilah kita bahas bersama konsep-konsep bidang IPS yang kita kembangkan dari bidang-bidang ilmu sosial.

1.3.1 Konsep Dasar Ilmu-ilmu Sosial

Unit 2 ini akan dibahas konsep-konsep dasar geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi dan Koperasi dan politik Dan Pemerintahan. Pembahasan akan dikemukakan sebagai berikut:

Konsep dasar geografi

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan demografi manusia di permukaan bumi, pengenalan manusia terhadap alam lingkungannya, baik yang menjadi penunjang kehidupannya makin meluas. Pengenalan lingkungan selanjutnya berbeda-beda, relasi manusia dengan alam lingkungannya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya (*varied ways of living*). Variasi kehidupan ini terutama dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan kelompok manusia di wilayah yang bersangkutan.

Pengenalan dan relasi manusia dengan alam lingkungannya dan pengetahuan mengenai suatu daerah (ruang) di permukaan bumi yang berkenaan dengan keadaan alam dengan kebudayaan inilah yang selanjutnya mengembangkan pengetahuan geografi dan konsep-konsep geografi menjadi dasar pengetahuan geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata *geo* berarti bumi, dan *graphein* berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun pada pembahasan oleh para pakar geografi selanjutnya, pengertian itu tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penelitiannya lebih jauh.

Untuk jelasnya, marilah kita ikuti konsep geografi, menurut Council of the Geographical Association (1919), sebagai berikut. Geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang dengan baik melalui sol sepatu, atau kaki telanjang, atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil atau pesawat terbang, dan melalui lukisan atau gambar atau cara lain. Namun penelaahan geografi tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar. Penelaahan tersebut meliputi juga sebab-akibat mengapa dunia nyata tersebut menampakkan demikian yang dipandang sebagai keseluruhan yang menghubungkan bagian-bagian yang telah menjadi apa adanya.

Hal itu meliputi hubungan dengan ilmu kealaman. Berkenaan dengan cara bagaimana hal-hal tadi telah memengaruhi manusia, dan kebalikannya telah dimodifikasi, diubah dan diadaptasi oleh tindakan manusia (Williams, M. 1976). Konsep yang dikemukakan di atas, selanjutnya kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang

sehari-hari. Hal-hal yang dialami dan dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, hal itu adalah geografi.

Namun demikian seperti yang dinyatakan di atas, geografi itu tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat dari luar, melainkan juga meliputi sebab-akibat mengapa yang nampak pada kenyataan itu demikian adanya. Geografi itu berhubungan juga dengan ilmu kealaman, hal-hal atau fenomena alam itu memengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya bagaimana tindakan manusia memodifikasi, mengubah serta mengadaptasinya. Dengan demikian, pada konsep geografi ini terungkap hubungan saling memengaruhi antara fenomena alam di tempat-tempat tertentu dengan perilaku serta tindakan manusia.

Supaya Anda dapat menyerap konsep geografi lebih lanjut, marilah kita ikuti pengertiannya menurut rumusan geografi Indonesia pada seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang 1988, sebagai berikut: “Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkuangan atau kewilayahan dalam konteks keruangan”. Berdasarkan definisi geografi tadi, jelas bahwa yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan air, perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan).

Pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi tadi ditinjau dari sudut pandang kewilayahan atau lingkungan yang menampilkan persamaan dan perbedaan fenomenanya (udara, batuan, perairan, kehidupan). Persamaan dan perbedaan fenomena tersebut tidak terlepas dari hubungan dan interaksi keruangan dan unsur-unsur geografi di wilayah atau dalam lingkungan di permukaan bumi. Selanjutnya tentu Anda bertanya “di manakah kedudukan manusia dalam geosfer tersebut?” Jawabannya, tentu saja merupakan unsur dari biosfer bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang menempati biosfer yang bersangkutan. Bahkan ditinjau dari peranannya, manusia itu merupakan faktor yang dominan terhadap lingkungannya (man ecological dominant).

Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, dapat di ketengahkan di sini bahwa geografi berkenaan dengan:

1. Geosfer atau permukaan bumi
2. Alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer)

3. Umat manusia atau antroposfer
4. Persebaran keruangan fenomena alam (kehidupan persamaan, perbedaannya)
5. Analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomenanya di permukaan bumi.

Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak, kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan oleh Getrude Whipple (James, P.E.: 1979), dan oleh Henry J. Warman (Gabler, R.E.: 1966): Rincian konsep dasar itu sebagai berikut. Getrude Whipple mengungkapkan lima konsep dasar, yaitu:

1. Bumi sebagai planet
2. Variasi cara hidup
3. Variasi wilayah-wilayah alamiah
4. Makna wilayah (region) bagi manusia
5. Pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia.

Sedangkan Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar sebagai berikut:

1. Konsep kewilayahan atau konsep regional
2. Konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer
3. Konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan
4. Konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet
5. Konsep interaksi keruangan
6. Konsep hubungan areal (wilayah)
7. Konsep persamaan areal (wilayah)
8. Konsep perbedaan areal (wilayah)
9. Konsep keunikan areal (wilayah)
10. Konsep persebaran areal (wilayah)
11. Konsep lokasi relatif
12. Konsep keunggulan komparatif
13. Konsep perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi
14. Konsep sumber daya dibatasi secara budaya
15. Konsep bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta.

Konsep dasar sejarah

Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kausal. Suatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya. Untuk memahami akibat peristiwa yang ada perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya ini. Mengapa demikian? Jawabannya, tiap benda, tiap diri, dan tiap fenomena tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses, peristiwa dan waktu. Dengan perkataan lain, tiap apa yang ada di alam raya ini memiliki sejarah masing-masing, atau paling tidak ada riwayat asal-usulnya.

Namun demikian, pada mata kuliah IPS, sejarah ini terutama ditujukan pada pembahasan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Oleh karena itu, pembahasan sejarah di sini lebih menitikberatkan pada sejarah sebagai salah satu bidang ilmu sosial yang dapat dikonsepsikan sebagai ilmu sejarah. Sebelum kita menelaah sejarah sebagai ilmu, dalam hal ini bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial, lebih dahulu kita akan menelaah apa sesungguhnya sejarah itu. Hugiono dan P.K. Poerwantana (1987) mendefinisikan sejarah sebagai berikut “Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami”.

Sedangkan Sartono Kartodirdjo (1992) secara singkat mengkonsepkan Sejarah sebagai pelbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau”. Dan pada sisi lain Ephrain Fischhoff (Fairchild, H. P, dkk: 1982) mengemukakan “Sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya”. Secara objektif, suatu peristiwa ataupun pengalaman hidup di masa lampau tidak dapat diulang kembali. Namun dengan menerapkan suatu metode, peristiwa atau pengalaman tersebut dapat direkonstruksi, disusun kembali.

Secara murni, tentu saja hasil rekonstruksi itu tidak merupakan duplikat sebagaimana aslinya. Ungkapan sejarah berulang dan mengambil pelajaran dari sejarah, hal tersebut merupakan kesadaran dari kita manusia bahwa hal-hal tertentu sebagai pengalaman masa lampau, mungkin terjadi atau berulang untuk diwaspadai, khususnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang membawa laknat bagi kehidupan umat manusia. Sedangkan peristiwa masa

lampau itu, tidak akan mungkin terulang kembali. Apa yang telah terjadi, telah menjadi fakta sejarah. Sebagai suatu kesadaran, kita wajib waspada terhadap pengalaman sejarah yang membawa laknat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.

Sejarah sebagai bidang ilmu sosial, memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya, dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik.

Konsep-konsep dasar itu adalah:

1. Waktu
2. Dokumen
3. Alur Peristiwa
4. Kronologis
5. Peta
6. Tahap-Tahap Peradaban
7. Ruang
8. Evolusi
9. Revolusi

Konsep Dasar Antropologi

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, di mana kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek. Salah satu aspek yang bermakna yakni mencirikan kemajuan yaitu kebudayaan, di mana setiap orang mempunyai kecenderungan kuat untuk hidup bersama dengan orang lain dalam kelompok. Manusia dalam kehidupan berkelompok (bermasyarakat) didorong oleh nalurinya dan menciptakan budaya untuk mempertahankan diri dalam kelompoknya. Naluri dan kebudayaan itu diwujudkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah.

Dalam kehidupan kelompok (masyarakat) banyak terdapat masalah-masalah dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Banyak perilaku yang berlatar belakang sangat beraneka ragam, hubungan antar individu bersifat demikian pekanya. Hal ini akan mempersulit dalam pengambilan keputusan untuk bertindak. Tindakan tersebut diharapkan bukan hanya bermanfaat bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Hubungan manusia yang bersifat kelompok tidak kalah rumitnya, manusia sering menghadapi banyak masalah

dalam hidup bermasyarakat, hal ini perlu disadari sejak dini bahwa kehidupan masyarakat dalam lingkungan sosial yang telah dan akan selalu berubah searah dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan demikian kontrol masyarakat berasal dari hati nurani dengan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dasar antropologi, sosiologi dan psikologi sosial yang dianggap esensi dari hidup bermasyarakat dengan tujuan hidup dan bertindak sesuai dengan yang sebenarnya.

Pembahasan tentang budaya dan kebudayaan, telah didiskusikan pada bahan ajar pada waktu membicarakan IPS sebagai program pendidikan. Namun demikian, pada kesempatan sekarang ini akan kita bahas kembali Lebih lanjut yang berkaitan dengan antropologi atau antropologi budaya. Anda dan kita semua dapat menghayati, bahwa di antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, khususnya dengan binatang terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan.

Manusia dan binatang sebagai makhluk Al Khaliq Maha Kuasa, sama-sama dikaruniai otak, namun otak manusia dilengkapi oleh kemampuan yang berkembang dan dapat dikembangkan seperti telah dikemukakan, sedangkan otak binatang tidak demikian. Oleh karena itu, manusia dengan akal pikirannya inilah yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan, akar katanya dari kata buddayah, bentuk jamak dan buddhi yang berarti budi atau akal (Koentjaraningrat: 1990) Soejono Soekanto: 1990).

Kata buddhaya dan atau buddhi itu berasal dan Bahasa Sanskerta. Dengan demikian, kebudayaan itu dapat diartikan sebagai “hal-hal yang berhubungan dengan budi dan atau akal”. Mengenai kebudayaan ini, Anda dapat menyimak beberapa konsep dari beberapa pakar di bidang ini, antara lain C.A. Eliwood (Fairchild, H.P., dkk.: 1982) mengungkapkan: Kebudayaan adalah nama kolektif semua pola perilaku ditransparasikan secara sosial melalui simbol-simbol; dan sini tiap unsur semua kemampuan kelompok umat manusia yang karakteristik, yang tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan, moral, dan keyakinan kepercayaan saja, melainkan meliputi juga peralatan material atau artefak yang merupakan penjelmaan kemampuan budaya yang menghasilkan pemikiran yang berefek praktis dalam bentuk bangunan, senjata, mesin, media komunikasi, perlengkapan seni, dan sebagainya.

Pengertian kebudayaan secara ilmiah berbeda dengan pengertian konotatif sehari-hari. Hal tersebut meliputi semua yang dipelajari melalui sambung rasa atau komunikasi timbal arah. Hal itu meliputi semua bahasa, tradisi, kebiasaan, dan kelembagaan. Tidak ada kelompok umat manusia yang memiliki maupun yang tidak memiliki bahasa, tradisi, kebiasaan, dan kelembagaan-kebudayaan itu sifatnya universal yang merupakan ciri yang berkarakteristik masyarakat manusia. Konsep yang dikemukakan oleh Eliwood di atas sangat jelas dan gamblang bahwa kebudayaan itu hanya menjadi milik otentik manusia. Dari konsep tadi, tercermin pula konsep-konsep dasar antropologi yang melekat pada kehidupan masyarakat manusia. Namun demikian, konsep-konsep dasar itu akan diketengahkan kembali secara lebih lengkap.

Konsep-konsep dasar itu meliputi:

1. Kebudayaan
2. Tradisi
3. Pengetahuan
4. Ilmu
5. Teknologi
6. Norma
7. Lembaga
8. Seni
9. Bahasa
10. Lambang
11. dan banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya.

Sebelum kita membahas konsep dasar antropologi lebih lanjut, marilah kita simak konsep kebudayaan menurut C. P. Kottak (1990), bahwa semua populasi manusia mempunyai kebudayaan, yang menjadi milik umum yang melekat jenis manusia. Kebudayaan inilah yang secara umum merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh jenis manusia.

Konsep Dasar Sosiologi

Kita dapat mengamati dan menghayati sendiri, bahwa sejak lahir telah berhubungan dengan orang atau pihak lain, paling tidak dengan ibu dan anggota keluarga lainnya. Pada perkembangan dan pertumbuhan individu itu selanjutnya, hubungan dengan pihak lain itu tidak lagi hanya terbatas dalam keluarga, melainkan telah menjangkau teman sepermainan, para tetangga, dan

demikian seterusnya. Hubungannya pun tidak sepihak melainkan timbal balik. Atau dengan perkataan lain, terjadi interaksi antara seorang individu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, interaksi tadi, kita konsepkan sebagai interaksi sosial.

Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari “interaksi sosial” ini disebut sosiologi. Oleh karena itu, Brown & Brown (1980) mengemukakan: “Sosiologi secara kasar dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi umat manusia”. Sedangkan Frank H. Hankins (Fairchild, H.P. dkk.: 1982) Lebih rinci mengemukakan: Sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dari hubungan kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan insaninya dalam hubungan satu sama lain. Aliran sosiologi yang berbeda menentukan penekanan yang bervariasi berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan, sebagian menekankan hubungan pada hubungan diantara mereka sendiri seperti interaksi, asosiasi dan seterusnya, sedangkan aliran yang lain menekankan pada umat manusia dalam hubungan sosialnya, memfokuskan perhatian kepada hubungan sosial dalam berbagai peranan dan fungsinya.

Meskipun di antara dua konsep itu secara gradual perbedaan, bahkan pada konsep yang dikemukakan oleh Hankins juga dikemukakan berbagai penekanan yang berbeda dalam telaahan sosiologi itu, namun kita dapat menarik garis persamaan berkenaan dengan hubungan sosial, baik ditinjau sebagai interaksi sosial, asosiasi sosial, ataupun melihat umat manusia dalam hubungan sosialnya. Namun yang sudah pasti, semuanya itu memperhatikan manusia yang tidak terisolasi menyendiri, melainkan memperhatikan umat manusia dalam hubungan sesamanya. Atau dengan perkataan lain, sosiologi itu mempelajari manusia dalam konteks sosial yang melakukan interaksi sesamanya.

Sesuai dengan sifat manusia yang dinamis, sudah pasti interaksi sosialnya juga mengalami perkembangan dan perubahan. Akibat seluruhnya terjadi proses sosial dan perubahan sosial. Dalam proses sosial tersebut, terutama bagi manusia yang lebih belia, terjadi proses yang dikonsepsikan sebagai sosialisasi. Pada tahap-tahap selanjutnya, proses sosial dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya kemajuan. Pada keadaan yang demikian, terjadi apa yang dikonsepsikan sebagai modernisasi.

Atas pembahasan singkat yang baru dikemukakan, dapat diketengahkan konsep-konsep dasar sosiologi sebagai berikut:

1. Interaksi sosial
2. Sosialisasi
3. Kelompok sosial
4. Pelapisan sosial
5. Proses sosial
6. Perubahan sosial
7. Mobilisasi sosial
8. Modernisasi
9. Patologi sosial
10. dan konsep-konsep lain yang dapat digali proses kehidupan sehari-hari

Interaksi sosial sebagai konsep dasar sosiologi, telah cukup dibahas pada uraian terdahulu. Interaksi ini bagaimanapun intensitasnya, selalu dialami oleh tiap individu dan selalu terjadi di masyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat, dilandasi oleh berbagai kebutuhan, selalu melakukan interaksi, baik interaksi edukatif, interaksi ekonomi maupun interaksi budaya dan interaksi politik. Semua interaksi tersebut termasuk interaksi sosial. Hasil interaksi sosial berbagai pihak biasanya menelorkan konsensus sosial. Konsensus sosial atau kesepakatan sosial ini juga termasuk konsep dasar sosiologi.

Sebagai akibat proses sosial, perubahan sosial dan modernisasi, baik secara perorangan atau kelompok, terjadi perubahan status dari lapisan bawah ke lapisan menengah dan bahkan sampai ke lapisan atas. Atau juga terjadi perubahan status dari petani menjadi pedagang atau menjadi pegawai negeri. Perubahan status, baik yang dialami oleh perorangan maupun oleh kelompok, dikonsepsikan sebagai mobilitas sosial. Jika perubahan status tersebut dari lapisan bawah ke lapisan menengah sampai ke lapisan atas atau sebaliknya, dikonsepsikan sebagai mobilitas vertikal. Sedangkan perubahan status yang sifatnya setara seperti dari petani jadi pedagang, kemudian menjadi nelayan, dan demikian seterusnya, mobilitas sosial yang demikian dikonsepsikan sebagai mobilitas horizontal. Di dalam kehidupan masyarakat, konsep dasar mobilitas sosial ini dapat kita amati dan kita hayati proses berlangsung serta kejadiannya.

Konsep Dasar Psikologi Sosial

Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu, antara individu dengan kelompok atau antarkelompok, tidak dapat dilepaskan dari fenomena kejiwaan yang timbul dari orang per orang dan dalam kelompok. Reaksi emosional, sikap, kemauan, perhatian, motivasi, harga diri dan sebagainya sebagai fenomena kejiwaan yang tercermin pada perilaku orang per orang serta kelompok tadi, merupakan fenomena yang melekat pada kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Perilaku kejiwaan manusia dalam konteks sosial ini, merupakan objek kajian psikologi sosial.

Psikologi sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial, menurut Harold A. Phelps (Fairchild, H.P, dkk: 1982) “Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial”. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikologi sosial itu seperti telah dikemukakan tadi, meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya.

Mengenai psikologi sosial ini selanjutnya, secara singkat Krech, Crutfield dan Ballachey (1982) mengemukakan “Psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang peristiwa perilaku antar personal”. Ungkapan ini tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Phelps tadi. Titik berat perhatian kajiannya itu tertuju pada perilaku manusia dalam hubungan sosialnya. Dari pernyataan dan kenyataan yang dapat kita amati serta kita hayati, antara psikologi sosial dengan sosiologi, sangat erat kaitannya, kalau tidak dapat dikatakan sebagai ilmu yang dwitunggal.

Pada kenyataannya, interaksi sosial antarwarga masyarakat, tidak dapat selalu dilandasi oleh dorongan kejiwaan, apakah itu namanya perhatian, minat, harga diri atau kemauan lainnya. Kondisi emosional selalu menyertai proses yang kita sebut interaksi sosial. Selanjutnya, dorongan untuk berinteraksi sosial itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi proses kejiwaan saja, melainkan dipengaruhi Juga oleh faktor lingkungan.

Lingkungan-lingkungan tadi sangat berpengaruh terhadap kebanggaan, harga diri, sikap mental, dorongan berprestasi, etos kerja, semangat hidup, kesadaran seseorang ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Betapa bermaknanya keluarga sebagai lingkungan sosial terhadap dorongan berprestasi seorang anggotanya. Demikian pula peranan lingkungan sosial lainnya, seperti teman sepermainan, teman sejawat dalam pekerjaan atas

dorongan kepada seseorang untuk tetap hidup bersemangat, berprestasi, dan akhirnya mencapai keberhasilan Proses dan dinamika kejiwaan yang demikian itu, wajib mendapatkan perhatian, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di hari-hari mendatang.

Sebagai satu kesatuan mental-psikologi dengan fisik-biologis fenomena kejiwaan seseorang, terpadu dalam dirinya sebagai kepribadian. Pada kesatuan kepribadian ini, kita dapat mengamati dan menelaah hubungan antara faktor dalam diri seseorang (potensi mental-psikologis dan fisik biologis) dengan faktor luar yang disebut lingkungan (sosial, budaya, alam). Keunikan kepribadian seseorang yang terpecah pada perilakunya, merupakan hasil perpaduan kerja sama antara potensi dari dalam diri dengan rangsangan dari lingkungan (hukum konvergensi).

Psikologi sebagai salah satu bidang ilmu sosial, berperan strategis dalam mengamati, menelaah, menganalisis, menarik kesimpulan dan memberikan arahan alternatif terhadap masalah sosial yang merupakan ungkapan aspek kejiwaan. Patologi sosial yang pernah didiskusikan pada waktu membicarakan sosiologi, sesungguhnya juga menjadi salah satu garapan psikologi sosial. Setelah kita membicarakan apa dan bagaimana psikologi sosial itu, selanjutnya marilah kita memperhatikan konsep-konsep dasar psikologi sosial itu, yang menjadi salah satu bagian dan kajian ilmu sosial.

Konsep-konsep dasar tersebut dapat diikuti berikut ini:

1. Emosi terhadap objek sosial
2. Perhatian
3. Minat
4. Kemauan
5. Motivasi
6. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial
7. Penghayatan
8. Kesadaran
9. Harga diri
10. Sikap mental
11. Kepribadian
12. Masih banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita gali lebih lanjut.

Tiap individu yang normal, memiliki potensi psikologis yang berkembang dan dapat dikembangkan. Kadar potensi tadi bervariasi antara seseorang dengan yang lainnya bergantung pada kondisi kesehatan, maupun mental-psikologisnya. Mereka yang kesehatan jasmani dan rohaninya prima, peluang pengembang potensi psikologisnya lebih baik daripada mereka yang kurang sehat. Selain daripada hal tersebut, faktor lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya juga sangat berpengaruh. Ketajaman emosi dan reaksi emosional seseorang, sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti telah digambarkan tadi.

Emosi dan reaksi emosional dengan pengendaliannya, sangat penting kedudukannya dalam kehidupan sosial termasuk dalam interaksi sosial. Emosi dengan reaksi emosional, merupakan konsep dasar psikologi sosial yang perannya besar dalam mengembangkan potensi psikologis lainnya. Perhatian dan minat seseorang terhadap sesuatu benda, fenomena sosial, interaksi sosial dan lain-lainnya. Tinggi-rendahnya, terkendali-tidaknya emosi seseorang, sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial yang bersangkutan.

Oleh karena itu, emosi sebagai suatu potensi kepribadian wajib diberi santapan dengan berbagai pembinaan psikologis, termasuk santapan keagamaan. Konsep dasar yang merupakan komprehensif adalah kepribadian. Secara singkat, Brown & Brown (1980) mengemukakan bahwa “kepribadian tidak lain adalah pola karakteristik, sifat atau atribut yang dimiliki individu yang ajeg dari waktu ke waktu”. Sedangkan Honnel Hart (Fairchild, H.P. dkk: 1982) secara lebih rinci mengemukakan: Kepribadian yaitu organisasi gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina secara mendasar oleh potensi biologis yang diwariskan melalui mekanisme psikofisik organisme tunggal dan yang secara sosial ditransmisikan melalui pola budaya, serta yang terpadu dengan semua penyesuaian, motif, kemauan dan tujuan individu berdasarkan keperluan serta kemungkinan dari Lingkungan sosialnya.

Konsep dasar kepribadian yang dikemukakan oleh Brown & Brown hanya sebagai ungkapan denotatif, sedangkan yang diketengahkan oleh Hart dalam pengertian konotatif yang lebih komprehensif. Berdasarkan apa yang dapat kita simak konsep tersebut, kepribadian itu bersifat unik yang memadukan potensi internal sebagai warisan biologis dengan faktor eksternal berupa lingkungan yang demikian terbukanya. Pada kondisi kehidupan yang demikian terbuka terhadap pengaruh yang sedang mengurus secara global, faktor lingkungan itu sangat kuat.

Konsep dasar ekonomi dan koperasi

Pembahasan ekonomi sebagai salah satu bidang ilmu sosial akan dikaitkan dengan koperasi yang menurut undang-undang menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Tentu saja pembahasan kita tentang ekonomi sebagai bidang ilmu dengan konsep-konsep dasarnya, menjadi sorotan utama. Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown & Brown (1980) mengemukakan bahwa “ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui pranata-pranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya”.

Sedangkan Earl E. Muntz (Fairchild, H.P. dkk.: 1982) mengetengahkan bahwa “Ekonomi adalah suatu studi tentang cara bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja menopang dan meningkatkan kesejahteraan materialnya”. Sementara itu, dengan cukup panjang, Gerardo P. Sicut dan H.W Arndt (1991) mengemukakan: Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang (hari ini) dan penggunaan esok hari (masa depan). Selain itu, penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat maka diperlukan pertimbangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Dari tiga batasan ilmu ekonomi tadi, dapat ditarik garis persamaan yaitu bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai “bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi”. Selanjutnya bahwa di sekitar manusia itu terdapat sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan tadi, namun penyediaannya terbatas, bahkan ada yang sifatnya langka. Sementara itu, kebutuhan materi manusia cenderung tidak terbatas. Bahkan dari sumber daya tersebut terbuka kemungkinan alternatif penggunaan tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok manusia.

Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan “pertimbangan efisiensi penggunaan sumber-daya”. Hal inilah yang menjadi kajian Ilmu Ekonomi. Mengenai apa yang didefinisikan di atas, Anda dapat mengamati dan

menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal, fakta, dan masalah yang kita bersama alami sehari-hari tadi, dapat mengembangkan pemahaman tentang ekonomi. Penduduk yang jumlahnya terus meningkat yang dapat Anda hayati sendiri dalam keluarga, di lingkungan para tetangga, di kota atau kabupaten sampai di tingkat negara. Semua penduduk, baik yang berusia lanjut, orang dewasa, para remaja, anak-anak sampai bayi yang baru lahir, menurut pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan materi, paling tidak pangan, sandang dan papan (perumahan).

Untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi Bangsa Indonesia, telah diatur hitam di atas putih dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 33 yang terdiri atas tiga ayat, yaitu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 ini juga tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan sesuai dengan itu ialah koperasi. Secara konstitusional, perekonomian Indonesia itu mengutamakan rakyat banyak. Namun kecenderungan yang dapat kita amati dan kita hayati menunjukkan keadaan yang lain.

Beberapa gelintir keluarga makin hari makin kaya, sedangkan sebagian besar rakyat makin tidak berkemampuan, pemilikan lahan pertanian semakin sempit, bahkan akan hilang sama sekali. Pemilikan rumah kecenderungannya makin kecil, mengingat harganya terus meningkat, sedangkan kemampuan daya beli sangat lemah. Selanjutnya, sebelum kita membahas berbagai konsep dasar, lebih dahulu kita akan menyimak pengertian koperasi dari berbagai kalangan dan secara konstitusional ada dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dalam upaya memantapkan ekonomi keluarga.

Berdasarkan undang-undang tersebut “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”. Sedangkan

International Cooperative Alliance (ICA) dalam buku *The Cooperative Principles*, karangan P.E. Weraman (A.A. Chaniago, Ch. Towela dkk.: 1995) memberikan definisi: Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum; yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya melalui memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

Berdasarkan tulisan Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Mohammad Hatta, pada Hari Koperasi ke-1 tanggal 12 Juli 1951 (A.A. Chaniago, Ch Towela dkk.:1995) memberikan definisi: “Koperasi adalah bangun organisasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dari tiga batasan tadi dapat ditarik garis persamaan, yaitu bahwa koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama dari para anggotanya, berasaskan kekeluargaan, kerakyatan, demi keuntungan bersama, dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial.

Namun demikian, sebagai suatu bentuk kegiatan usaha, memerlukan penanganan dan pengelolaan yang profesional. Hal inilah yang belum dipenuhi oleh kegiatan usaha ekonomi yang disebut koperasi. Oleh karena itu, masih banyak koperasi yang menjadi proyek kasihani yang menjadi anak angkat perusahaan besar, belum menunjukkan kemandirian. Kondisi yang demikian, menjadi masalah bagi koperasi sendiri sebagai kegiatan usaha ekonomi rakyat. Dengan demikian, menjadi panggilan bagi Anda selaku guru IPS bagaimana memikirkan dan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tersebut, untuk meningkatkan kualitas usaha, tujuan mensejahterakan para anggota berdasarkan. asas kekeluargaan dan keuntungan sosial. Setelah kita memperhatikan batasan-batasan ekonomi dan koperasi, marilah kita mengamati konsep-konsep dasar yang menjadi kunci dua pokok persoalan yang erat kaitannya satu sama lain.

Konsep-konsep dasar itu sebagai berikut:

1. Kalangan sumber daya
2. Keterbatasan sumber daya
3. Kebutuhan yang tidak terbatas
4. Konsumsi-produksi-distribusi
5. Penawaran-permintaan
6. Kekeluargaan
7. Keuntungan ekonomi

8. Keuntungan sosial
9. Alternatif pemanfaatan sumber daya
10. Sumber daya alternatif
11. Sumber daya yang terbarukan
12. Sumber daya yang tidak terbarukan
13. Modal
14. Tenaga kerja
15. Pemuasan kebutuhan
16. Surplus-minus-keseimbangan
17. Efektif-efisien-produktif
18. dan hal-hal lain yang dapat digali sendiri lebih jauh

Sudah menjadi hukum alam bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tidak merata. Di suatu kawasan terjadi kelebihan (surplus), sedangkan di kawasan lain terjadi kekurangan (minus) atau keterbatasan, bahkan di kawasan lainnya lagi terjadi kelangkaan sumber daya. Pada proses pemenuhan kebutuhan akan sumber daya tersebut terjadi kegiatan ekonomi yang dikenal sebagai perdagangan. Dalam memenuhi sampai mencapai kepuasan kebutuhan, manusia baik perorangan maupun kelompok, melakukan kegiatan produksi, menghasilkan sesuatu baik yang langsung dari sumber daya alam maupun melalui pengolahan lebih dahulu. Proses produksi tadi memenuhi konsumsi yang selalu meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Konsep Dasar Politik dan Pemerintahan

Selaku warga negara dapat mengamati dan menghayati, bahwa kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, tidak dapat dilepaskan dari dua aspek kehidupan sosial berpolitik dan berpemerintahan. Politik di sini, bukan politik dalam arti sempit, seperti politik praktis, melainkan politik dalam bernegara, berpemerintahan dan berwarga dunia. Dan kehidupan berpolitik dalam arti yang luas itu juga, tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahannya.

Oleh karena itu, sebelum berbincang-bincang lebih jauh, marilah kita telaah lebih dahulu anti politik sebagai bidang ilmu sosial, dan anti pemerintahan dalam konteks Ilmu Politik. Secara singkat Mildred Parten (Fairchild, H.P, dkk: 1982) mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori kiat dan praktik memerintah. Sedangkan Brown & Brown (1980) mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan

tertentu. Di pihak yang lain, J. Barents (Miriam Budiardjo: 1991), dalam ilmu politika mengemukakan definisi: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

Akhirnya dapat dikemukakan di sini arti ilmu politik menurut Ossip K. Flechtheim (Miriam Budiardjo: 1991) dalam buku *Fundamental of Political Science*: “Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang memengaruhi negara”. Dari empat definisi ilmu politik tadi dapat dikemukakan garis umum, yaitu bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas tersebut, mempelajari kekuatan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memerintah negara.

Dalam definisi-definisi tersebut, terdapat konsep-konsep kekuasaan, negara, pemerintahan, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian, dalam konsep ilmu politik, tidak terpisahkan konsep-konsep dasar negara dan pemerintahan. Sesuai dengan judul Subunit 2 ini di antaranya membahas Ilmu Politik dan Pemerintahan maka pada pembahasan berikut ini akan diketengahkan pengertian pemerintahan. Menurut Brown & Brown (1980), ‘Pemerintahan adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negara’. Sedangkan menurut Charles J. Bushnell (Fairchild, ILP, dkk: 1982) “Pemerintahan adalah organisasi penjelmaan suatu negara, pemerintahan adalah negara dalam penampilan praktisnya, pemerintahan sebagai suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya”.

Dari dua acuan tentang pemerintahan, jelas yang dimaksud dengan pemerintahan itu tidak lain adalah penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan itu adalah aparat pelaksana negara. Oleh karena itu, tentu saja menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara. Negara dengan pemerintahannya, melekat satu sama lain. Setelah kita simak bersama apa dan bagaimana ilmu Politik serta pemerintahan itu, selanjutnya kita akan mengkaji konsep-konsep dasar kedua-duanya.

Konsep-konsep dasar itu sebagai berikut:

1. Kekuasaan
2. Negara
3. Undang-undang
4. Kabinet
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Mahkamah Agung
8. Kepemimpinan
9. Demokrasi
10. Wilayah
11. Kedaulatan rakyat
12. Otoriter
13. Monarki
14. Republik
15. dan hal lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman

Anda dan kita semua selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia merupakan suatu negara. Bahwa kawasan yang kita tempati sejak lahir, dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, adalah suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia.

Bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Wilayah Nusantara Indonesia kita ini merupakan wilayah daratan seluas 2.027.087 Km² yang terdiri atas 17.656 pulau, dan yang dihuni penduduk kira-kira 3.000 pulau. Dengan demikian, masih banyak pulau yang belum berpenduduk secara tetap. Sedangkan luas perairan laut 6.090.163 Km². Luas keseluruhan wilayah Nusantara 8.117.250 Km². Kenyataan ini telah diakui oleh negara lain, paling tidak oleh negara sahabat terdekat.
2. Penduduk Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990, wilayah Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa, dengan kepadatan 93, dan

laju pertumbuhan per tahun 1,98. Berdasarkan jumlahnya, Indonesia menempati peringkat empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan 1,98 menurut rumus Nathan Keyfitz, penduduk Indonesia akan menjadi berlipat dua dalam jangka waktu 35,35 tahun. Jadi jika pada tahun 1990 Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa maka pada tahun 2025 (1990 + 35) yang akan datang wilayah Indonesia akan berpenduduk 358.388.446 jiwa, merupakan jumlah yang besar. Hal tersebut menuntut perhatian dan kepedulian segala pihak, terutama dari tiap penduduk Indonesia sendiri.

3. Berpemerintahan Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat dinyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang, tegasnya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu memiliki pemerintahan, yaitu Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kedaulatan pada alinea keempat yang telah dikemukakan tadi, dalam kalimat itu selanjutnya dikemukakan “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan alinea tadi telah tegas juga tentang kedaulatan negara, yang dinyatakan sebagai berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, kedaulatan telah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Konsep dasar yang berkaitan dengan Ilmu Politik yang dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Miriam Budiardjo (1991) mengemukakan:

“Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”. Dalam hal penyelenggaraan negara atau pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dewan menteri atau kabinet yang diketuai oleh kepala pemerintahan atau kepala negara (perdana menteri, presiden).

Kekuasaan di sini dapat dinyatakan juga sebagai kepemimpinan. Menurut Charles J. Bushnell (Fairchild. H. P. dkk: 1982) paling tidak ada dua pengertian kepemimpinan, yaitu:

1. Suatu proses situasi yang memberikan peluang kepada seseorang atau orang-orang, karena kemampuannya memecahkan persoalan diikuti oleh kelompoknya, dan mampu memengaruhi perilaku kelompok yang bersangkutan.
2. Tindakan dari pengorganisasian dan pengarahan perhatian serta aktivitas sekelompok manusia, yang tergabung dalam suatu proyek atau perusahaan, oleh seseorang yang mengembangkan kerja sama, melalui pengamanan dan pemeliharaan keretaan yang disepakati sesuai dengan tujuan dan metode yang dikehendaki serta yang diadopsi oleh himpunan yang bersangkutan. Berdasarkan dua pengertian di atas, kepemimpinan, kekuasaan, kenegaraan dan pemerintahan itu kait-mengait dalam suatu situasi dan proses dalam wadah yang disebut negara.

Tinggal lagi bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan itu dilaksanakan, apakah dalam suasana demokrasi atau otoriter. Jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “.... suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” maka kepemimpinannya itu demokrasi, dan kekuatan ada di tangan rakyat, sesuai dengan pengertian demokrasi sendiri (Bahasa Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) berarti rakyat berkuasa atau kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan kepala negara atau kepala pemerintahan, hanya mendapat wewenang dari rakyat.

Terselenggaranya suatu negara dengan baik, tertib, dan aman karena adanya peraturan yang disusun bersama, disepakati bersama serta dipatuhi bersama keberlakuannya. Bagi tingkat negara dan pemerintahan peraturan atau norma tersebut tersusun dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang menjadi pokok utama atau induk dari segala peraturan, norma dan undang-undang adalah undang-undang dasar. Untuk Negara dan Pemerintah Indonesia, yang menjadi Undang-Undang pokok utama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala tata cara, upacara, pengaturan dan penyelenggaraan bernegara serta berpemerintahan, telah ditentukan secara garis besar pada Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan pelaksanaannya, terjabarkan dan terperinci pada undang-undang, peraturan pemerintah, garis-garis besar haluan negara, peraturan daerah, dan demikian seterusnya. Hal yang demikian itu, wajib Anda pelajari, selain untuk kepentingan sendiri, juga untuk kepentingan proses mengajar dan membelajarkan peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda serta tanggung jawab kita semua.

1.4 Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

Mempedomani Kamus Bahasa Indonesia (tanpa tahun), kata landasan memiliki beberapa arti, antara lain: 1) alas; bantalan; paron (alas untuk menempa, terbuat dari besi); 2) lapangan terbang, contoh: 'pesawat kami mendarat di landasan dengan selamat, 3) dasar; tumpuan (Kata Kiasan). Dapat disimpulkan arti kata landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Pengertian yang lebih umum, landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah *foundation*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi *fondasi*. *Fondasi* merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu.

Istilah lain yang hampir sama (identik) dengan kata landasan adalah kata dasar (*basic*). Kata dasar adalah awal, permulaan atau titik tolak segala sesuatu. Pengertian dasar, sebenarnya lebih dekat pada referensi pokok (*basic reference*) dari pengembangan sesuatu yang memiliki makna lebih pengertian dari kata *fondasi* atau *landasan*. Oleh Sanusi Uwes (2001), kata *fondasi* atau *landasan* dengan kata dasar (*basic reference*) merupakan dua hal yang berbeda

wujudnya, tetapi sangat erat hubungannya. Maka, setiap ilmu yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, merupakan hasil dari pemikiran tentang alam atau manusia. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu itu dapat dikatakan sebagai fondasi atau dasar pendidikan (Sunasi Uwes, 2001).

1.4.1 Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

Arindhaayuningtyas (2012), dalam tulisannya menjelaskan bahwa konsep kita mengenai sosial (masyarakat) mendasar bagi pemahaman diri kita sendiri. Sebagaimana Aristoteles menyebutkan manusia bagaikan seekor hewan sosial yang tidak bisa hidup terus di luar sebuah kelompok sosial, tetapi memiliki ketergantungan pada masyarakat manusia atau masyarakat lainnya.

Secara keilmuan, masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial, dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti:

1. Bidang kajian ekonomi, akan membahas tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas ketersediaannya
2. Bidang kajian politik, berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat
3. Bidang kajian psikologi sosial, yang pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia sebagai individu secara sosial
4. Bidang kajian antropologi budaya yang lebih menekankan pada masyarakat dan kebudayaannya, dan begitu seterusnya untuk ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi sosial, sejarah, maupun sosiologi.

Selanjutnya, Syafnidawaty (2020), secara sederhana ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Pada dasarnya ilmu bukan sekedar pengetahuan saja akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Pada dasarnya ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang lagi sejalan dengan

perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan dan ilmu kealaman.

Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena ilmu sangatlah penting di dalam kehidupan manusia. Jika seorang manusia tidak memahami akan pentingnya ilmu, maka akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain pengertian di atas secara sederhana ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun, diklasifikasikan, diorganisasikan, disistematisasi dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji ulang secara ilmiah. Sementara pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal yang diketahui melalui tangkapan panca indra, rasio, firasat, intuisi, insting dan pengetahuan sikap. Oleh karena itu tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tetapi semua ilmu adalah pengetahuan.

Adapun Sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat (*Philosophia*). Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah tidak lain daripada usaha mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus. Kattsoff menjelaskan bahwa filsafat adalah suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis atau sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan, dan hendaknya diingat bahwa yang dinamakan kegiatan kefilisafatan itu sesungguhnya merupakan perenungan atau pemikiran.

Pemikiran filsafat ini meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lainnya, menanyakan “mengapa”, mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada pandangan pertama. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keruntutan, dan keadaan memadainya pengetahuan agar kita dapat memperoleh pemahaman. Kegiatan filsafat adalah merenung, perenungan kefilisafatan adalah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri.

Secara sederhana, filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu *Filo* dan *Sophia* yang berarti mencintai kebijakan. Sebagaimana Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut Kant ada empat hal yang dikaji

dalam filsafat yaitu: apa yang dapat manusia ketahui (metafisika), apa yang seharusnya diketahui manusia (etika), sampai di mana harapan manusia (agama), dan apakah manusia itu (antropologi).

Dari filsafat tersebut lahir tiga cabang ilmu pengetahuan, antara lain:

1. Social Sciences (ilmu-ilmu sosial meliputi: sejarah, politik, ekonomi). Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah setiap saat. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu sosial antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dsb.
2. Humanities (ilmu-ilmu budaya meliputi: bahasa, agama, kesenian. Pengetahuan budaya). Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Pengetahuan budaya (The Humanities) dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian (disiplin) seni dan filsafat. Keahlian inipun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai bidang keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dll. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut dengan Basic Humanities. Sedangkan pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah The Humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya (homo humanus), sedangkan Ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-

konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan budaya.

Ilmu Budaya Dasar (Basic Humanities) adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain Ilmu Budaya dasar menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran dan kepekaan dalam mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan.

3. Natural Science (ilmu-ilmu alam meliputi: fisika, kimia, biologi). Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya adalah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan. Atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar dan 100% salah. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, mekanika.

Kemudian, perbincangan dan pemikiran dalam mempelajari ilmu sosial menjadi salah satu bagian penting guna memahami keterlibatan antara lingkungan sosial dan unsur budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Disiplin ilmu ini bahkan menjadi penting untuk diletakkan dalam setiap pondasi hubungan di masyarakat. Alasannya karena ilmu sosial dasar yang di dalamnya termasuk objek kajian sosiologi akan membuat seseorang memahami seluk beluk kehidupan yang dapat mendorong kemajuan serta menunjang penemuan baru. Ilmu sosial adalah sekelompok ilmu yang mempelajari aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Ilmu sosial banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ilmu ini yang membantu manusia untuk memahami segala hal yang terjadi di lingkungan. Mulai dari norma sosial hingga mencari solusi akan suatu permasalahan. Ilmu sosial dalam kajian keilmuan dapat dilakukan penelitian sosial dengan menggunakan metode kualitatif baik berdasarkan fenomena sosial yang ada mencari tahu akan penerapan sebuah permasalahan.

Berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat ditemukan ketika memahami dan mengerti tentang ilmu sosial, di antaranya:

1. Memiliki kesadaran akan permasalahan sosial, Ilmu sosial membuat seseorang lebih peka dan cepat memiliki empati, bahkan simpati pada kesempatan tertentu.
2. Mengenali antara satu orang dengan yang lain, ketika mau belajar ilmu sosial maka akan tahu adanya interaksi sosial. Melalui interaksi akan membuat seseorang saling mengenal antara satu dengan yang lain di berbagai lingkungan.
3. Mengenali memahami jalan pikir orang di lingkungan, mampu memahami bagaimana sudut pandang seseorang agar beberapa hal yang menjadi ciri khas seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pemahaman tersebut akan membuat seseorang sedikit banyak memahami jalan pikir orang-orang. Ketika hal tersebut telah terjadi mungkin akan menjadi sosok yang mudah bergaul.
4. Memiliki wawasan kepribadian yang baik, kepribadian pada dasarnya sudah ada sejak lahir, namun dengan memiliki ilmu sosial maka akan memperbaiki kepribadian yang kurang baik dengan banyak jenis kegiatan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing individu.
5. Mampu melakukan interaksi dengan baik, orang yang sering bertemu dengan banyak orang dan mengetahui cara berkomunikasi yang baik maka akan terjalin bentuk interaksi sosial saling terkait yang membuat orang disekitarnya merasa nyaman.
6. Memiliki keahlian yang positif dalam melakukan interaksi sosial, interaksi sosial yang terus berulang dan sering dilakukan maka seseorang dapat melakukan banyak hal dan menerapkan cara interaksi yang benar.
7. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari segala jenis kebutuhan ekonomi secara jelas. Pemahaman ilmu ekonomi ini akan membuat seseorang mampu memetakan mana yang prioritas dan tidak.

8. Bertindak dengan hati nurani, ketika terbiasa mempelajari sesuatu tidak hanya menggunakan pikiran tapi diselaraskan dengan perasaan maka akan menimbulkan tindakan seseorang yang berasal dari hati nurani sesuai dengan apa yang dirasakan.
9. Menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, kesadaran ini timbul dapat melalui ilmu sosial yang memberikan berbagai jenis teori yang akan membuat seseorang merasa percaya bahwa manusia merupakan makhluk sosial dengan segala kebutuhannya.
10. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, Ilmu sosial yang telah dikuasai membuat seseorang mampu memahami keadaan lingkungan. Pemahaman tersebut akan membuat seseorang mampu menyesuaikan dengan cepat di manapun tempatnya.
11. Memperkuat nilai-nilai agama dalam aspek sosial, nilai-nilai agama juga dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan aspek sosial. Tindakan yang mungkin dilakukan ialah terbiasa bersikap baik, tolong menolong, membantu orang yang kesusahan, dan lain-lain.
12. Mampu memiliki jaringan pertemanan yang luas, orang yang memiliki penguasaan ilmu sosial yang baik akan membuat seseorang mampu membuka diri dengan lingkungan sekitar. Ketika bertemu dengan orang baru akan mudah melakukan interaksi. Kemampuan interaksi tersebut akan menambah ruang lingkup pertemanan seseorang.
13. Membantu orang sekitar, kepekaan yang dimiliki akan membuat seseorang terdorong untuk saling tolong menolong. Sikap tolong menolong merupakan hasil dari penguasaan ilmu sosial yang kemudian diterapkan. Semakin baik penerapannya maka akan semakin luas jaringan yang dibuat.
14. Memahami hakikat manusia, salah satu cabang ilmu sosial memang secara penuh membahas tentang manusia yaitu bidang sosiologi dan antropologi, seperti yang selama ini kita pelajari. Semua tentang manusia telah dijelaskan dengan baik sehingga kita dapat memahami secara komplit.

Menurut Yoga Permana Wijaya (2014), ilmu adalah pengetahuan sehingga seseorang itu akan mengetahui penyebab terjadinya dan apa alasannya. Contohnya ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang badani (materil saja) atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika membatasi lingkup pandangannya ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang kongkrit. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam misalnya, mampu menjawab pertanyaan tentang berapa jauhnya matahari dari bumi dengan akurat. Berpijak dari pemisalan di atas, ternyata tidak semua pengetahuan dapat dijadikan suatu ilmu. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan, berguna dan mampu digunakan untuk memprediksi.

Untuk itu dibuat suatu metodologi ilmiah yang disesuaikan berdasarkan ruang lingkup ilmu tersebut, beserta syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:

1. **Objektif:** Sesuatu dapat disebut ilmu jika dicari dan diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang serta objek yang ditelitinya nyata. Selain itu kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Jadi bukan hanya kesimpulan yang diambil secara subjektif oleh peneliti atau subjek penunjang penelitian saja
2. **Metodis:** Metodis berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam menentukan suatu ilmu, harus memiliki cara yang valid dalam kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam ilmu yang telah teruji kebenarannya tersebut. Secara umum metodis adalah metode ilmiah untuk menguji kebenaran suatu ilmu.
3. **Sistematis:** Suatu ilmu harus bersifat sistematis. Hal ini dimaksudkan agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek ilmu itu sendiri.
4. **Universal:** Jelas dalam menemukan suatu ilmu tertentu harus memiliki sifat universal. Hal ini untuk menentukan ilmu tersebut dapat dipergunakan secara luas atau tidak. Seperti ilmu matematika dan ilmu fisika yang memiliki rumus-rumus yang valid sehingga di

belahan dunia manapun, ilmu tersebut dapat digunakan dan dapat diterima secara luas.

5. Memiliki masyarakat ahli (community scholar) atau pakar ilmu tersendiri.

Selain syarat ilmu di atas, berdasarkan pandangan filsafat ilmu, sesuatu dikatakan ilmu bila memenuhi syarat secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Berikut penjelasan dari syarat-syarat tersebut:

1. Setiap ilmu memenuhi syarat secara ontologis, apabila ilmu tersebut memiliki objek studi yang jelas. Objek yang dijadikan bahan studi hendaknya dapat diidentifikasi, dapat diberi batasan-batasan, dan dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi itu hendaknya tidak identik dengan objek studi dari ilmu lain, bukan pinjaman dari ilmu lain. Ia haruslah mandiri, tidak bergantung pada ilmu lain.
2. Sebuah ilmu memenuhi syarat secara epistemologi, bila ilmu tersebut mempunyai pendekatan dan metodologinya sendiri mengenai bagaimana atau dengan cara apa ilmu itu disusun, dibina, dan dikembangkan. Sudah sepantasnya bahwa pendekatan dan metode yang digunakan cocok dengan sifat-sifat hakiki dari objek studinya sendiri.
3. Sebuah ilmu memenuhi syarat secara aksiologi, bila ilmu tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep-konsep dan kesimpulan yang logis, sistematis, dan saling berkaitan. Di dalam teori atau konsep itu tidak terdapat kekacauan pikiran, atau pertentangan kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

1.5 Landasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Landasan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, menurut Sapriya (2018), diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi dan pemanfaatan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu.

Terdapat beberapa landasan pokok ilmu pengetahuan sosial, antara lain:

1. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu (aspek ontologis); bagaimana cara, proses atau metode membangun dan mengembangkan Pendidikan IPS hingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid atau terpercaya (aspek epistemologis); apa tujuan Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari Pendidikan IPS ini (aspek aksiologis). Keberadaan landasan-landasan ini telah dan akan memperkokoh body of knowledge Pendidikan IPS untuk eksis dan berkembang lebih luas

2. Landasan Ideologis.

Landasan ideologis dimaksudkan sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan:

- a. Bagaimana keterkaitan antara das sein Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan das sollen Pendidikan IPS
- b. Bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan Pendidikan IPS. Menurut O'Neil, ideologi sebagai landasan ini telah dan akan memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis

terhadap Pendidikan IPS yang tidak cukup di atasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-prinsip Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

4. Landasan Antropologis

Landasan antropologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan pola, sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar sosial-kultural masyarakat terhadap struktur Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

5. Landasan Kemanusiaan

Landasan kemanusiaan memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

6. Landasan Politis

Landasan politis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari Pendidikan IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi.

7. Landasan psikologis

Landasan psikologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara Pendidikan IPS membangun struktur

tubuh disiplin pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologisnya. Hal ini sejalan dengan hakikat dari struktur yang dapat dipelajari, dialami, didiversifikasi, diklasifikasi oleh anggota komunitas Pendidikan IPS berdasarkan kapasitas psikologis dan pengalamannya.

Bab 2

Perbedaan dan Hubungan Ilmu- Ilmu Sosial dengan Ilmu-ilmu Alam

2.1 Pendahuluan

Kata “ilmu” berarti mengerti, mengetahui atau memahami suatu pengetahuan, namun ilmu dan pengetahuan berbeda dalam aspek makna dan kriteria. Pengetahuan tidak selamanya sebagai ilmu, namun ilmu tentu sudah mencakup pengetahuan. Ilmu memiliki syarat-syarat ilmiah yang di dalamnya terkandung makna pemahaman yang lebih dalam akan sesuatu, terdapat proses kritik dan analisis tentang apa, mengapa dan bagaimana. Ilmu dapat diuraikan secara jelas, rasional, objektif, sistematis dan realistis serta berlaku secara universal, dalam perkembangannya dapat memicu lahirnya ilmu alam, namun jika pemahaman tersebut berkaitan dengan masalah-masalah sosial, seperti mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan manusia, lingkungan sosial dan hubungannya dengan dinamika manusia dan lingkungan yang melahirkan kebudayaan, sehingga masuk dalam kelompok ilmu yang mewarnai ilmu sosial (Abdullah, 2011).

Pengetahuan yang memenuhi syarat sebagai ilmu lahir dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu manusia pada suatu objek dan dikaitkan dengan hal yang terjadi di alam secara alamiah yang kemudian memunculkan kata filsafat yang kemudian dalam perkembangannya menjadi manifestasi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari filsafat sebagai induk yang bermetamorfosis dalam sikap kritis manusia adalah dasar-dasar yang lahir atas pemahaman intelektual tradisional yang di dilakukan oleh para filsuf Yunani Kuno di sekitar abad ke 6 SM. Sikap intelektual dalam filsafat kuno ini selanjutnya berkembang dan membentuk konfigurasi yang berusaha memberi penegasan-penegasan adanya bagian atau cabang ilmu (Afwadzi, 2017).

Sikap kritis manusia dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya dan didasari oleh sikap penasaran dan rasa ingin tahu, sehingga terbentuklah beberapa cabang ilmu pengetahuan sekaligus merupakan keadaan dan kondisi yang tanpa sengaja menjadi bagian yang berusaha memisahkan diri dari filsafat itu sendiri sebagai induk dan cikal bakal ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai induk ilmu secara alamiah tertinggal oleh sikap kritis intelektual manusia, di mana ilmu ini masing-masing berkembang secara mandiri melalui metodologi masing-masing oleh para penganutnya (Alatas, 2003).

Ilmu sosial mengupas berbagai aspek dalam masyarakat baik subjektif, objektif maupun objektif bahkan tidak sedikit mengupas tentang aspek-aspek intersubjektif masyarakat. Dasar metode dalam pembelajaran ilmu sosial, sehingga pada awalnya ilmu sosial pernah dianggap kurang memenuhi unsur ilmiah dibandingkan dengan ilmu alam. Seiring dengan perkembangan dalam pengungkapan ilmu pengetahuan yang menampilkan berbagai fakta dan menyajikan data dalam metode kuantitatif. Penelitian sosial yang dilakukan pada dua dekade terakhir yang mengarahkan pada penerapan pendekatan interdisiplin maupun lintas disiplin dalam memahami perilaku sosial manusia dan interaksi dengan lingkungan yang berpengaruh, membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik dan terlibat dalam metodologi ilmu sosial. Metode transisi dalam mempelajari aspek manusia pada sisi tindakan dengan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif serta saling membentuk interaksi dalam studi dinamika dan perilaku manusia, implikasi dan konsekuensi yang mungkin ada (Purba et al., 2020; Eluang and Antangan, 2010).

Metode kombinasi atau transisi ini dalam perkembangannya telah membentuk metamorfosis baru sebagai upaya penyederhanaan ilmu sosial dengan lahirnya Ilmu Pengetahuan Sosial yang berlaku khusus di Indonesia sebagai satu mata

pelajaran yang diterapkan pada siswa pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ilmu sosial telah berkembang pesat paralel dengan perkembangan ilmu alam dan semakin jauh meninggalkan intelektual tradisional filsafat sebagai induknya, lalu lahir filsafat alam yang menyatukan semua bidang pengetahuan. Selanjutnya filsafat alam berkembang menjadi berbagai cabang ilmu, salah satunya adalah filsafat sosial yang membahas tentang etika yang diperlukan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh penganut filsafat sosial, diantaranya Plato (429-347 SM) dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Keduanya, masing-masing melahirkan istilah baru dalam filsafat sosial dengan pemikiran-pemikirannya yang berkaitan dengan sosiologi bernegara oleh Plato dan etika sosial oleh Aristoteles (Tasmuji et al., 2018).

Ilmu sosiologi yang dilahirkan dari filsafat sosial dengan konsisten dan berjalan dinamis yang lebih condong pada realita-realita sosial yang dialami manusia di muka bumi dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara masyarakat dalam melaksanakan etika sosial. Konsep sosiologi lebih lanjut dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Thomas Hobbes, Jean Jaques Rousseau dan John Locke, namun demikian hingga akhir abad ke 18, konsep pemikiran sosiologi belum diterima sebagai ilmu. Menjelang pertengahan abad ke 19, tepatnya di tahun 1838 M oleh Herbert Spencer memperkenalkan sosiologi melalui tulisan yang populer berjudul *Principles of Sociologi* (Tamrin, 2019).

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia dengan memperkenalkan istilah Ilmu Sosial Dasar (ISD) dalam ilmu pengetahuan yang khusus menelaah masalah-masalah sosial dengan menggunakan pengertian berdasarkan fakta, teori dan konsep yang bersumber dari berbagai bagian keahlian dalam lapangan sosial seperti sejarah, geografi, antropologi. ISD bukan merupakan perpaduan ilmu sosial. Cabang-cabang ilmu sosial, seperti antropologi, ekonomi, ekologi, demografi dan ilmu sosial lainnya memiliki objek dan metode ilmiah sendiri, sedangkan ISD bukan merupakan ilmu tersendiri sebagai cabang ilmu sosial, karena tidak memiliki objek dan metode ilmiah yang tetap dan juga tidak dikembangkan berdasarkan konsep penelitian sebagaimana disiplin ilmu lain. Hal yang sama berlaku untuk ilmu sosial dasar yang selama ini diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan (Sudarmanto et al., 2020).

Ilmu sosial dasar (ISD) tidak memiliki objek dan tidak dikembangkan berdasarkan metode ilmiah. ISD bertujuan untuk pembentukan kepribadian

dan sikap, bukan untuk pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual, dengan demikian ISD bukanlah ilmu yang memiliki pengikut yang berusaha merintis jalannya sendiri untuk melahirkan cabang ilmu baru. ISD hanya berisi konsep sosial, masalah sosial dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat diperlukan dalam rangka menciptakan tatanan sosial dan keteraturan-keteraturan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial (Susanto, 2014).

2.2 Kedudukan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam terhadap Ilmu lain

Pembagian ilmu pengetahuan dikelompokkan dalam tiga bagian utama, bertujuan memberi penegasan dan garis pemisah antara bidang ilmu dan memberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu tersebut.

Kelompok utama ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah:

1. Ilmu-ilmu alamiah (natural science), dimaksudkan untuk mengetahui fenomena yang terdapat di alam semesta dengan berbagai keteraturan dan dinamika yang ada dengan menerapkan berbagai metode ilmiah untuk menentukan keteraturan apa yang berjalan untuk dijadikan panduan dan dasar dalam menentukan suatu kuantitas dan nilai.
2. Ilmu-ilmu sosial (social science), digunakan untuk mempelajari semua keteraturan yang berkaitan dengan interaksi dan dinamika antara manusia dengan menerapkan metode ilmiah yang merupakan konsep yang mengalami migrasi dari ilmu alam.
3. Pengetahuan budaya (the humanities), digunakan untuk memahami dan usaha untuk menemukan arti dan makna atas kenyataan-kenyataan bersifat manusiawi dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam mengungkap berbagai peristiwa dan fakta-fakta yang bersifat unik, sifat unik tersebut diberi arti (Sabari, 2011).

Prinsip pengelompokan ilmu pengetahuan dalam tiga golongan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pengungkapan dan para ilmuwan yang terlibat juga lebih jelas dalam pengungkapan fenomena keteraturan di alam

semesta, hubungan antar manusia dan fakta-fakta empirik yang berisi arti dan makna hidup dan kehidupan. Ilmu alam dan ilmu sosial di awal peradaban manusia tidak dikenal, namun seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika antar manusia termasuk dengan alam semesta dan makhluk di sekitarnya, mengalami perubahan-perubahan akibat kebutuhan alamiah manusia untuk bertahan hidup. Bekal modal intelektual manusia di masanya dan adanya wadah fenomena alam dan segala keteraturan di dalamnya memunculkan sikap kritis yang sesungguhnya merupakan bagian dalam mempertahankan hidup dan tetap ada di masa yang akan datang.

Sikap kritis dan modal intelektual manusia tersebut melahirkan kajian-kajian seputar masalah umum sesuai dengan cakrawala intelektual dalam mengaitkan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang didasari atas kecintaan pada dirinya, melahirkan implikasi sebagai sebuah kebutuhan dan berusaha untuk dilakukan komunikasi antar manusia dan manusia dengan alam sekitarnya (Eluang and Antangan, 2010).

Dinamika kehidupan manusia tersebut, mengilhami lahirnya sebuah istilah baru yaitu “filsafat” sebagai awal atas dimulainya pengetahuan yang memiliki dasar-dasar yang jelas dan mulai mengikuti patokan yang jelas. Filsafat yang lahir pada masa itu adalah bersifat teknis yang khusus melakukan kajian terkait masalah-masalah dasar dan umum, seperti pengetahuan, nilai, eksistensi, akal pikiran dan Bahasa. Jadi filsafat hanyalah istilah teknis untuk mempelajari hal-hal umum dalam kehidupan manusia, yang kemudian berkembang pesat akibat berbagai pertanyaan-pertanyaan para filsuf seperti: (1) Dapatkah manusia mengetahui segala sesuatu, (2) apakah ada cara yang lebih baik untuk menjalani kehidupan, (3) apakah hidup adil dan tidak adil adalah cara yang baik, dan (4) apakah manusia memiliki kehendak bebas (Natasya et al., 2020).

Pandangan historis, filsafat dipandang sebagai cakupan dari segala pengetahuan mulai dari zaman filsuf kuno hingga memasuki filsafat alam pada abad ke-19, ditandai dengan munculnya prinsip-prinsip matematika filosofi alam yang berfungsi ganda sebagai alat pengkajian dan media komunikasi yang dipimpin oleh Newton. Prinsip matematika inilah yang kemudian melahirkan istilah fisika yang mulai dikenal sebagai profesi dan terspesialisasi sekaligus tanda masuknya era filsafat akademik yang banyak melakukan kajian-kajian universal (Abdullah, 2007).

Kajian universal pada masa itu banyak dilakukan oleh para filsuf dan menghasilkan banyak istilah-istilah baru seperti aljabar, astronomi,

pengobatan, fisika yang semuanya di kemas dalam istilah filsafat alam dan selanjutnya bermetamorfosis menjadi ilmu alam. Perkembangan selanjutnya berjalan terus-menerus mengikuti kebutuhan dan kecintaan yang melahirkan kebijaksanaan, sehingga dilakukan kajian-kajian yang fokus pada hubungan antar manusia dan manusia dengan alam yang melahirkan disiplin baru (sosiologi, psikologi, ekonomi dan linguistik) yang mulai menjauh dan terpisah dari filsafat, kemudian diistilahkan dengan ilmu sosial. Tidak berhenti pada titik ilmu sosial dengan penampilan fakta empirik, ilmu-ilmu alam berjalan terus dan paralel merintis jalan-jalan baru, demikian pula ilmu sosial yang terus mengalami dinamika dengan berbagai rintisan kajian, sehingga melahirkan percabangan baru bidang seni, politik, keindahan (arsitektur) hasil kolaborasi kajian ilmu alam dan ilmu sosial yang kemudian dikemas dalam istilah humanitas dan kebudayaan (Marzuki et al., 2020; Aulya, 2020).



Gambar 2.1: Segitiga peradaban hubungan manusia dan alam semesta yang melahirkan ilmu pengetahuan

Perkembangan ilmu pengetahuan baik ilmu alam maupun ilmu sosial dan kedudukannya terhadap cabang ilmu lain dapat digambarkan dalam segitiga peradaban manusia, alam semesta dan seluruh kebutuhan dan dinamika yang ada di dalamnya. Tiga unsur peradaban manusia dan alam. Manusia adalah subjek atau pelaku yang selalu aktif berinteraksi dan dapat melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dan berpotensi melahirkan

perubahan. Alam semesta adalah objek yang di eksplorasi, dikaji segala rahasia atas keteraturan yang ada di dalamnya. Kebutuhan adalah pembenaran dan jembatan untuk melakukan kajian pengembangan agar terpenuhi kebutuhan dan keinginan dari manusia yang dilakukan atas dasar kecintaan, keindahan, seni dan kebijaksanaan (Natasya et al., 2020; Hermanto et al., 2012).

Hasil penelusuran di atas menegaskan bahwa kedudukan ilmu-ilmu alam adalah induk pertama turunan filsafat, sedangkan ilmu-ilmu sosial adalah induk kedua yang juga diturunkan dari filsafat yang lahir atas dasar kebutuhan, kebijaksanaan dan kecintaan manusia atas kehidupan dan empati atas keadaan alam wadiah mereka menjalani kehidupan. Ilmu-ilmu alam berjalan terus merintis jalannya masing-masing demikian pula ilmu sosial berjalan dan membentuk dinamika dan menemukan jalannya, yang pada titik tertentu terkadang ilmu alam dan ilmu sosial bersinggungan dan bersinggungan pada titik tertentu yang melahirkan kebudayaan.

Proses ini berjalan terus tanpa henti hingga saat ini, cabang-cabang ilmu alam dan ilmu sosial sebagai dua induk ilmu pengetahuan terus menelusuri jalannya oleh para ilmuwan sesuai bidangnya, hingga dikenalnya ilmu informatika, digital dan bahkan kejahatan teknologi informasi. Perubahan berjalan dinamis dan terus menerus sepanjang kehidupan manusia. Perubahan ini cenderung mengarah kepada kehidupan yang lebih baik dengan mengikuti keteraturan, kemudahan, kecukupan, rasa nyaman, meskipun tidak jarang dinamika perubahan kehidupan yang dinamis tersebut memunculkan implikasi dan konsekuensi sosial yang kurang seimbang dan merugikan, baik terhadap kehidupan manusia itu sendiri maupun terhadap lingkungan dan alam semesta (Abdullah, 2019).

2.3 Konsep Ilmu Sosial dan Ilmu Alam

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat menjalankan kehidupan yang normal tanpa hubungan dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan, lingkungan dan bahkan terhadap alam. Makhluk sosial adalah komunitas manusia atau masyarakat yang menjalankan kerja sama yang bersifat tetap yang mewarnai kehidupan, manusia sebagai karakter sebagai ciri masyarakat

tertentu dan hidup pada era dengan berbagai warna-warni budaya dan kehidupannya.

Konsep sosial masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang cukup terkenal dalam diktum homo homini lupus yang diperkenalkan oleh Thomas Hobbes dikenal dengan teori individualisme instrumental, Adam Smith dengan teori sistem sosial terintegrasi dengan diktum invisible hand, Karl Marx dengan teori konflik dan Max Weber dengan teori tindakan sosial dan birokrasi rasional, adalah para ahli yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar dan konsep dalam ilmu sosial. Pemikiran-pemikiran mereka di ilhami oleh konsep manusia adalah hewan sosial oleh Aristoteles, baik mereka yang sejalan maupun kontra dengan pandangan tersebut (Abas, 2015).

Ilmu sosial menurut Ralf Dahrendorf dalam bukunya *Class and class Conflict in Industrial Society*, sosiolog Jerman dan dikenal sebagai teori konflik non-Marxis. Ilmu-ilmu sosial mencakup bidang sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, politik hingga sejarah yang pada sisi yang lain termasuk humaniora. Penggunaan ilmu sosial oleh Comte kurang tepat dalam menggambarkan hubungan antar manusia, karena tidak konsisten pada arti dan makna yang dapat mengakomodir empat aspek dalam keilmuan sosial, yakni ekonomi, politik, budaya dan integrasi sosial (sosiologi). Namun demikian pandangan para ahli mengenai ilmu sosial yang berbeda-beda, tetapi hampir semua mengarah pada pemahaman yang menyatakan bahwa ilmu sosial mempelajari perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan bersama (Aulya, 2020).

Ilmu-ilmu sosial sering disebut ilmu pengetahuan sosial adalah kelompok ilmu yang dibentuk oleh sekelompok disiplin akademis, mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosialnya yang dikaji dengan menggunakan metode ilmiah termasuk metode kualitatif dan kuantitatif. Dewasa ini dikenal sekitar 23 cabang ilmu sosial yang seluruhnya berjalan dan berkembang merintis jalannya sendiri yang bukan tidak mungkin dapat melahirkan keturunan baru yang lahir dari cabang ilmu sosial maupun lahir dari induknya atau mungkin cabang ilmu sosial yang lahir atas kombinasi beberapa cabang ilmu sosial atau kolaborasi dari cabang ilmu-ilmu alam. Informatika adalah cabang ilmu baru yang diklaim sebagai turunan dari ilmu-ilmu alam, namun tidak sedikit yang menganggap sebagai bagian turunan ilmu sosial (Sudarmanto et al., 2020).

Perbedaan pengelompokan informatika sebagai turunan ilmu alam ataukah ilmu sosial, hingga kini belum konkret, meskipun dalam pelaksanaannya saat ini termasuk dalam bagian ilmu alam. Kasus yang sama untuk teknologi media dan Audio visual adalah cabang ilmu yang dianggap bagian dari ilmu alam, namun kemudian disepakati bahwa bidang kajian tersebut merupakan turunan dari cabang ilmu komunikasi bagian dari ilmu-ilmu sosial. Skema pengelompokan ilmu seperti di atas jauh dari realita yang ada saat. Khususnya pada kelompok ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan abstrak seolah-olah tidak memiliki induk atau garis keturunan yang jelas, meskipun diakui bahwa cabang-cabang ilmu pembentuknya seperti matematika, logika dan metafisika adalah manifestasi dari filsafat yang kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu alam, sedangkan kelompok ilmu pengetahuan humanisme yang memiliki anggota antropologi, sosiologi dan psikologi yang dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ilmu sosial.



Gambar 2.2: Skema Pengelompokan Tiga Ilmu Utama

Kerancuan lainnya atas skema di atas pada kelompok ilmu pengetahuan alam yang cabang-cabangnya di kebiri, seolah-olah bahwa ilmu alam adalah ilmu sempit. Penjelasan sebelumnya memberi pemisah yang jelas terkait ilmu-ilmu alam sebagai turunan pertama dari filsafat, dan ilmu-ilmu sosial yang lahir dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang lahir dari percabangan ilmu alam sebagai kelompok ilmu turunan kedua. Konsep ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam lahir dari satu sisi yang kemudian bercabang-cabang dan berjalan paralel (Marzuki et al., 2020).

Perkembangan dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat spesifikasi cabang ilmu yang berkembang saat ini atas dasar kebutuhan, namun sifatnya pada persoalan teknis. Spesifikasi cabang ilmu yang berkembang atas dasar kebutuhan teknis kadangkala tidak memiliki ruang lingkup operasional yang

jelas, karena lahir atas perkawinan dua atau lebih cabang ilmu, meskipun demikian tetap memiliki konsep dasar yang jelas sebagai kelompok ilmu-ilmu sosial atautkah dalam kelompok ilmu-ilmu alam (Eluang and Antangan, 2010).

Konsep ilmu pengetahuan perlu di pahami lebih dalam, bahwa ilmu harus didasarkan pada persyaratan dan kaidah ilmiah khususnya ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu dan telah diadopsi dalam ilmu sosial Persyaratan ilmiah untuk dapat diakui sebagai sebuah ilmu, meliputi:

1. Ilmu memenuhi unsur objektif sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi terhadap suatu kajian objek yang terdiri atas satu golongan masalah yang sifat dan hakikatnya dapat dilihat baik dari dalam maupun dari luar. Objek yang dimiliki bersifat ada atau mungkin ada, namun masih harus diuji kebenarannya. Ilmu tidak subjektif berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian.
2. Ilmu memenuhi unsur metodelis, yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran, dengan demikian metode memiliki konsekuensi tertentu yang menjamin adanya kepastian atas kebenaran tersebut. Metode yang digunakan harus merupakan metode ilmiah dan dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah dan prosedur ilmiah pula
3. Ilmu memenuhi unsur sistematis, yaitu ilmu dapat diuraikan dan disusun sistematis dan dapat dirumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu dan dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibat yang berkaitan dengan objek ilmu tersebut.
4. Memiliki unsur universal atas rencana capaian suatu kebenaran universal yang bersifat umum. Mencapai hal tersebut, maka harus tersedia konteks yang jelas dan tertentu. Semua unsur ilmu tersebut dapat dibuat dokumentasi yang jelas, sehingga dapat dilakukan penelusuran dalam hal penyusunan konsep dan pengembangan (Parinduri et al., 2020).

2.4 Perbedaan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam

Perbedaan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam cukup nyata dan dapat diadakan baik secara empirik maupun teoritis. Perbedaan ini hanyalah bersifat teknis dan bukan ditujukan pada perbedaan yang fundamental. Dasar epistemologi, aksiologi dan ontologis kedua ilmu tersebut adalah relatif sama. Metode yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan adalah metode yang sama, atau tidak terdapat alasan metodologis yang membedakan antara keduanya.

Ilmu-ilmu sosial menempatkan manusia sebagai objek utama penelaah. Manusia mempunyai satu karakteristik yang spesifik dan unik dan menjadi pembeda dari wujud yang lain. Ilmu sosial umumnya lebih kompleks dibandingkan ilmu alam. Ilmu-ilmu alam mempelajari objek dunia fisik, konstan dan tetap bahkan mudah di kontrol. Objek penelaah ilmu-ilmu alam dapat dikatakan tak pernah mengalami perubahan baik dalam perspektif tempat maupun waktu. Pendalaman pada ilmu alam umumnya dilakukan dalam satu kajian objek yang bersifat fisik, sedangkan dalam ilmu sosial, telaah juga, dapat berkaitan dengan hal-hal fisik namun membutuhkan penjelasan lebih spesifik. Penjelasan seperti pada hal yang didasarkan pada hukum-hukum fisik dalam menjelaskan ilmu sosial dipandang tidak cukup (Marzuki et al., 2020; Sabari, 2011).

Ilmu sosial atau social science adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menelaah tentang masalah-masalah sosial dalam sebuah masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar termasuk pengertian umum tentang konsep yang dikembangkan untuk pengkajian masalah manusia sebagai makhluk sosial yang berusaha untuk menghasilkan keteraturan-keteraturan di dalamnya. Pemecahan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang dikaji dalam aspek sosial umumnya menerapkan metode yang dipinjam dari metode pemecahan ilmu alam. Ilmu alam atau science adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pun pengetahuan yang meliputi suatu kebenaran umum dari hukum alam yang terjadi dan dapat dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains pada dasarnya merupakan satu pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dan dilanjutkan dalam suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode yang

biasa dilakukan dalam metode ilmiah. Kata sederhana dari ilmu alam adalah pasti dan ilmu sosial adalah berubah-ubah (Alatas, 2003).

Ilmu sosial merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial yang ada. Ilmu sosial juga mencakup berbagai lapangan yang meliputi perilaku dan intelektual manusia masa kini dan masa lalu termasuk ramalan manusia masa depan. Ilmu sosial mengupas berbagai aspek secara subjektif dan objektif atau struktural, yang sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibandingkan dengan ilmu alam, namun pada perkembangannya di masa kini, beberapa bagian dari ilmu sosial telah menggunakan metode kuantitatif dan dipadukan dengan metode kualitatif dalam menganalisis tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensi yang ada (Susanto, 2014).

Ilmu pengetahuan alam (natural science) adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu, di mana objek yang diteliti adalah benda-benda alam yang ditelaah berdasarkan hukum-hukum pasti dan umum dan harus dapat berlaku pada semua situasi waktu dan tempat. Ilmu alam adalah proses yang ditempuh untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah-langkah telaah tersebut dilakukan sistematis dan berurutan yang logis meliputi perumusan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimental, observasi atau pengamatan, pengumpulan data, interpretasi dan analisis data dan akhirnya diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.

Proses ini menjelaskan bahwa karakteristik ilmu alam adalah kuantitatif atau nilai yang berarti bahwa gejala alam dapat berbentuk kualitatif. Objek dan prinsip dari ilmu alam adalah aspek fisik dan non manusia yang berkaitan dengan bumi dan alam sekitarnya. Ilmu terapan yang kita kenal saat ini adalah manifestasi dari Ilmu alam yang keduanya berbeda dari ilmu sosial, humaniora, teologi dan seni. Ilmu alam dapat digunakan dalam mengenal ilmu sebagai suatu disiplin yang mengikuti metode ilmiah dan berbeda dengan filsafat alam. Ilmu alam memberikan kepastian relatif tinggi karena menggunakan objek yang konkret, sehingga ilmu alam juga sering kali disebut ilmu pasti.

Tabel 2.1: Perbedaan Ilmu-Ilmu Alam Dengan Ilmu-Ilmu Sosial

Aspek Telaah	Ilmu-Ilmu Alam	Ilmu-Ilmu Sosial
Objek kajian	Benda-benda alam Lingkungan fisik nyata	Manusia, lingkungan sosial, kompleks
Metode	Kuantitatif, kualitatif	Kualitatif
Sifat	Pasti	Bisa berubah-ubah
Proses	Sistematis, runtut eksperimen	Sistematis Survey, observasi
Ciri-ciri	empirik	abstrak
Narasi	Penjelasan yang tampak	Penjelasan tambahan
Jenis ilmu	terapan	Non terapan
Batasan	Gejala-gejala alam	Gejala kehidupan manusia
Tingkat kepastian	Tinggi	rendah

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa banyak perbedaan telah antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam. Perbedaan unsur telaah dimaksud antara kedua ilmu sosial dan ilmu alam adalah pada objek kajian, metode, sifat, proses, ciri-ciri, narasi yang disampaikan dan jenis ilmu yang dibangun. Banyaknya perbedaan tersebut tidak membentuk makna dalam hal tingkat atau kedudukan ilmu tersebut dalam hierarki, namun hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan pengkajian dan alur operasional pelaksanaan pencapaian dalam suatu riset.

Terlebih pada kondisi saat ini, tampak bahwa perbedaan nyata antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam semakin samar, hal ini dapat dilihat pada berbagai penelitian bidang ilmu sosial dalam pelaksanaannya juga mengikuti dan meminjam beberapa aspek dan prosedur yang selama ini dilakukan dalam penelitian ilmu-ilmu alam, sebaliknya pada kondisi saat ini tidak sedikit peneliti dari ilmu alam menjalin kolaborasi dan menjalankan penelitian bersama dengan dalam melakukan kajian aspek sosial dan aspek fisik untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi, khususnya pada aspek implikasi ke depan, pengaruhnya kepada manusia dan lingkungan yang ternyata dijelaskan berdasarkan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Sekali lagi ditegaskan bahwa perbedaan utama antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu terletak pada aspek teknis (Tasmuji et al., 2018).

Menelusuri perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan eksklusif antara bidang ilmu, dan bukan pula untuk memunculkan dikotomi bagi mereka yang menjalani pada bidang ilmu tertentu, tetapi semata untuk memberikan pengetahuan pada aspek sejarah dan untuk memberikan kesadaran bahwa sesungguhnya ilmu pada awalnya hanya satu, hanya karena perkembangan dan kebutuhan manusia pada sisi dan aspek teknis semata yang dalam perkembangannya melahirkan kelompok keilmuan, sehingga perlu dipahami bahwa pada hakikatnya semua ilmu yang dikenal saat pada akhirnya bermuara pada satu titik yakni memberi manfaat pada kehidupan manusia, makhluk lainnya, lingkungan dan alam semesta (Sulastriyono, 2014).

2.5 Hubungan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam

Mempelajari ilmu pengetahuan secara komprehensif tidak dapat dilepaskan berdasarkan pemahaman filsafat, karena memang kedua ilmu tersebut dilahirkan dari induk yang sama yaitu filsafat, hanya urutan kelahirannya atau awal pengkajian yang dilakukan berbeda, di mana ilmu-ilmu alam lahir lebih dahulu yang kemudian disusul dengan ilmu-ilmu sosial, dan selanjutnya kedua ilmu ini berkembang pesat oleh pengikutnya masing-masing, berjalan paralel dan meniti jalannya masing-masing untuk menemukan kebenaran yang pada akhirnya ketemu pada suatu titik tujuan yakni untuk mempermudah kehidupan manusia. Tabel 2.2, memperlihatkan beberapa aspek telaah yang sesungguhnya memiliki hubungan yang sama antara ilmu sosial dan ilmu alam, namun mungkin saja berbeda pada proses pencapaian dan alur narasi yang dikembangkan (Alatas, 2003).

Ada hal yang menarik dicermati dalam menelaah perbedaan dan persamaan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu pada sisi image masyarakat luas yang memunculkan stereotip yang berkembang bahwa ilmu-ilmu eksakta adalah jenis ilmu yang sulit dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial, sehingga di masyarakat menganggap bahwa mereka yang layak mempelajari ilmu-ilmu alam hanyalah orang-orang yang cerdas dan pintar (Sabari, 2011).

Tabel 2.2: Hubungan Ilmu-Ilmu Alam dengan Ilmu-Ilmu Sosial

Aspek Telaah	Ilmu-Ilmu Alam	Ilmu-Ilmu Sosial
Sumber rujukan	filsafat	filsafat
objek	empirik tentang gejala dan peristiwa yang mempunyai manfaat pada manusia	Implikasi dan interaksi antara manusia dan lingkungan yang memiliki manfaat pada manusia
Manfaat	Manusia dan lingkungan alam (nyata)	Manusia dan lingkungan sosial
Tujuan	Mempermudah kehidupan manusia	Pemahaman aspek kehidupan manusia

Image ini dengan sendirinya memunculkan dikotomi yang berkembang secara alami bahwa ilmu-ilmu sosial dan humaniora kerap dipandang sebagai ilmu kelas dua atau jenis ilmu yang statusnya rendah. Ilmu-ilmu eksakta dipandang memiliki status yang tinggi, karenanya orang yang mempelajari sains atau ilmu-ilmu alam eksakta kerap dipandang lebih terhormat ketimbang mereka yang mendalami ilmu-ilmu sosial, Anehnya, bahwa mereka yang terlibat dalam ilmu sosial cenderung menerima begitu saja penyematan status tersebut, sehingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih melekat predikat tersebut di tengah masyarakat awam. Di beberapa perguruan tinggi dapat ditemukan minat pada ilmu yang tidak jarang ditemukan bahwa pilihan ilmu-ilmu alam selalu menjadi pilihan pertama dan pilihan ilmu sosial pada urutan pilihan kedua atau pun ketiga. Sebuah realita, bahwa mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu sosial adalah mereka yang gagal masuk ke jurusan eksakta. Kasus seperti ini semakin membuat status ilmu sosial semakin terpuruk di hadapan dengan ilmu-ilmu alam atau eksakta (Eluang and Antangan, 2010).

Pertanyaan mendasar yang perlu dipecahkan bersama adalah, benarkah ilmu-ilmu sosial lebih mudah dibandingkan ilmu eksakta ?, sehingga dipandang bahwa jenis ilmu sosial dipandang kurang penting dan tidak bergengsi dibanding ilmu sains. Jika pertanyaan ini diajukan pada orang yang mendalami ilmu sains tentu jawabannya bisa dipastikan "ya", namun jika pertanyaan seperti ini diajukan kepada Jared Diamond, mungkin anda terkejut mendengarnya.

Jared Diamond adalah ilmu yang menata masa depan pada profesi di bidang fisika dan kimia, pernah menulis sebuah artikel, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini Benarkah ilmu-ilmu eksakta lebih sulit dibandingkan ilmu-ilmu sosial ?. Mengapa terkejut ?, karena Jared Diamond adalah seorang ilmuwan yang menguasai dua bidang ilmu eksakta, namun

banyak hasil penelitiannya dan ditulis dalam beberapa artikel dan bukunya yang menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan hebatnya artikel-artikelnya banyak dijadikan rujukan pada berbagai disiplin ilmu (Tasmuji et al., 2018).

Argumentasi yang disampaikan Jared Diamond yang melakukan penelitian dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah reaksi atau refleksi atas perdebatan panas yang melibatkan dua ilmuwan bergelar profesor yakni Samuel Huntington (ahli ilmu politik) dan Serge Lang (ahli ilmu matematika). Perdebatan tersebut dipicu oleh kritik Serge Lang terhadap karya-karya Huntington yang dianggap sebagai "pseudo-sains" yang dianggap tak layak sebagai karya ilmiah. Pada dasarnya Jared Diamond tidak senang dengan kritik dan sikap egois dan arogansi para saintis yang cenderung menganggap remeh para ilmuwan sosial, meskipun Diamond setuju bahwa ilmu sosial hendaknya hati-hati dalam menggunakan metode ilmiah yang kerap diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta, karena dianggapnya bahwa langkah seperti itu berlebihan dengan identifikasi ilmu sosial yang berlebihan menggunakan pendekatan dan metode ilmu eksakta. Cara seperti ini justru dapat mengacaukan dan membingungkan dalam memahami fenomena sosial di masa depan karena ilmu sosial tidaklah sepenuhnya ajek, seperti objek penelitian ilmu sains (Afwadzi, 2017).

Kritik lainnya oleh Jared Diamond terhadap Samuel Huntington yang dianggapnya kurang bijak adalah pada penggunaan metode kuantitatif yang dikembangkan dalam ilmu sosial, yang seolah-oleh mensaintifikasi penelitian dan objek studi mereka yang justru dianggap dapat mereduksi atau mengurangi makna sains (Afwadzi, 2017).

2.6 Kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Sosial Dasar terhadap Ilmu-Ilmu Sosial

Penerapan ilmu sosial dasar khususnya dalam sekolah tingkat dasar dan menengah pertama bertujuan membantu perkembangan pengetahuan, kepribadian dan pemikiran kritis agar memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan sikap dan tingkah laku yang

baik pada generasi remaja dan generasi muda. Beberapa tujuan khusus penerapan ilmu sosial dasar di sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah, yakni (1) menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bahwa ada kenyataan-kenyataan dan masalah sosial yang ada dalam masyarakat, (2) Menumbuhkan kepekaan pada masalah-masalah sosial dan tanggap untuk aktif dalam usaha penanganan atas masalah tersebut, (3) Menyadari bahwa setiap timbul masalah sosial dalam masyarakat senantiasa bersifat kompleks dan hanya dapat didekati sebagai bahan pembelajaran (Eluang and Antangan, 2010).

Ilmu sosial dasar (ISD) dan ilmu pengetahuan sosial (IPS) memiliki persamaan dan perbedaan, namun kembali lagi lebih banyak pada aspek teknis pelaksanaannya. Perbedaan tersebut, diantaranya:

1. IPS diterapkan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, sedangkan ISD disajikan pada jenjang pendidikan tinggi;
2. IPS adalah kelompok matakuliah atas sejumlah mata pelajaran yang mesti diikuti pada jenjang sekolah menengah atas, sedangkan ISD adalah matakuliah tunggal
3. IPS diarahkan untuk pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual, sedangkan ISD diberikan untuk pembentukan sikap dan kepribadian.

Selain perbedaan antara ISD dengan IPS, juga memiliki persamaan-persamaan, diantaranya:

1. Keduanya merupakan bahan studi untuk tujuan dan kepentingan program pendidikan
2. Keduanya bukan merupakan disiplin ilmu yang mandiri dan independen
3. Keduanya memiliki materi dengan konsep yang relatif sama secara substansi, yakni kenyataan sosial dan masalah sosial
4. Keduanya tidak membicarakan ilmu dan menghindarkan diri pada perdebatan konsep filsafat (Afwadzi, 2017).

Kedudukan ilmu sosial merupakan satu rumpun ilmu yang bersumber dari filsafat moral dan meniti jalannya secara alamiah menjadi ilmu-ilmu sosial dan bercabang-cabang mengikuti alurnya secara alamiah. Konsep ilmu sosial adalah manusia dan interaksi dengan makhluk lain di sekitarnya serta manusia

terhadap lingkungan dengan berbagai kenyataan-kenyataan dan permasalahan yang ada di dalamnya yang selalu bersifat dinamis dan kompleks (Tasmuji et al., 2018).

Hakikat ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial dasar adalah menumbuhkan dan membangkitkan keterampilan, pemahaman, kepribadian dan sikap untuk mengenali manusia, interaksi manusia dan lingkungan sosial yang dinamis dan berubah-ubah yang bertujuan menciptakan tatanan sosial dalam masyarakat, sehingga manusia dapat mengenali diri dan lingkungannya untuk bersikap dengan bijak atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Tamrin, 2019).

Beberapa alasan, mengapa ilmu pengetahuan sosial diterapkan dalam kurikulum sekolah, diantaranya:

1. Ilmu sosial berfaedah dalam membentuk kehidupan manusia dan masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang dapat dikendalikan
2. Ilmu sosial dapat memicu manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera
3. Ilmu sosial bermanfaat dalam menumbuhkan sikap dan perilaku yang dapat mengerti dan memahami orang lain, makhluk dan lingkungannya
4. Ilmu sosial dapat memberikan pemahaman yang baik, membentuk kepribadian dan mampu mengaitkan antar berbagai kenyataan dan permasalahan dalam masyarakat (Sabari, 2011).

2.7 Masa Depan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam di Era Digital

Eksistensi ilmu sosial di era digital semakin tampak. Ladang ilmu sosial justru terjadi di masa digital yang efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah, yang justru tidak dapat diselesaikan dengan ilmu-ilmu komputer. Perilaku manusia dan masyarakat hanya dapat diatasi dengan penjelasan dan pendekatan sosial seperti sosiologi, psikologi dan antropologi, termasuk ilmu bahasa yang dewasa ini semakin populer dalam mengenali pola-pola komunikasi dalam media sosial (Susanto, 2014). Ilmu sosial tetap dibutuhkan

selama masih ada manusia yang membentuk dinamika, kecuali apabila semua manusia diganti oleh robot, namun itu sulit untuk terjadi. Sehebat apapun algoritma, namun substansi yang ada di dalamnya adalah merupakan mesin yang hanya mampu mengolah data, di mana data di input oleh manusia. Ilmu apa pun yang dikembangkan, tetap tidak dapat dilepaskan dari alur berpikir kritis, agar tidak terjebak dengan pola berpikir dogmatis yang mengekang. Penelitian mengenai kejadian sosial tidak dapat diulang, khususnya pada kurang waktu yang singkat. Perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam penelitian ilmu sosial dapat menghasilkan suatu tabulasi yang menjadi ciri dasar dari ilmu alam (Eluang and Antangan, 2010).

Pelaku utama dinamika di muka bumi adalah manusia, karena manusia yang berpikir dan manusia yang dapat merencanakan sesuatu dan bahkan dapat mengubahnya. Kenyataan dan permasalahan sosial dalam masyarakat sangat kompleks dan dinamis, penuh dengan gejala sosial bersifat unik dan sukar Berulang kembali, mempelajari manusia, makhluk hidup yang penuh dengan tujuan dalam tingkat lakunya, kadang ilmu sosial tidak bersifat objektif, karena merupakan bagian integral dari objek yang ditelaah, mengamati dan mempelajari fakta dan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat kondisional, ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur jalinan kejadian sosial (Afwadzi, 2017).

Inti ilmu sosial adalah perubahan, dan yang berubah hanya manusia, di mana manusia berada dalam masyarakat yang selalu berkembang, berjalan paralel dengan inovasi-inovasi yang terjadi dalam ilmu sosial. Perubahan adalah keniscayaan, tidak abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan terjadi terus menerus yang tidak terkekang oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Perubahan bersifat universal, karena perubahan adalah manifestasi dari objek perubahan. Di era disrupsi saat ini, perubahan memiliki dua makna, yaitu inovasi dan gangguan. Perubahan dipandang sebagai gangguan oleh mereka yang konservatif yang selama ini berada pada zona nyaman. Pada sisi yang lain perubahan dipandang sebagai sebuah inovasi bagi mereka yang berpandangan bahwa perubahan adalah peluang untuk mengaktualisasikan diri yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi dirinya (Sudjatnika, 2018).

Perkembangan IPTEK berjalan sangat cepat dan signifikan serta memberi pengaruh masif pada berbagai perubahan aspek dan sendi-sendi segi kehidupan manusia termasuk di dalam kehidupan sosial dan budaya dengan berbagai dinamika yang ada. Salah satu pengaruh atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah aspek pola perubahan hubungan sosial dan

interaksi sosial dalam masyarakat yang selama ini dikaji dalam pendekatan ilmu sosial.

Revolusi Industri 4.0, bukan hanya berpengaruh pada ilmu eksakta saja yang berubah drastis, akan tetapi juga terhadap ilmu sosial. Salah satu diantaranya adalah perubahan pada struktur dan tatanan sosial masyarakat, ditandai dengan munculnya *new society 5.0* yang dimulai dan dipimpin oleh Jepang. Masyarakat baru era 5.0, mengandalkan “big” data di dalam hubungan sosial dan interaksi sosial antar individu, masyarakat dan individu dengan lingkungan, sehingga kolaborasi antar disiplin ilmu menjadi lebih urgen dan tepat dilakukan dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat (Abdullah, 2011) (Feriyanayah, Iqbal dan Simarmata, 2019).

Perubahan pola perilaku dan model kehidupan masyarakat, memengaruhi dan memicu munculnya inovasi ilmu sosial sebagai sebuah keniscayaan. Inovasi ini sangat penting dan diperlukan untuk mengadaptasikan dengan paradigma keilmuan sosial dari “teks” menjadi “konteks”. Selain itu, diperlukan inovasi yang dapat mengubah dan mampu menjadikan ilmu sosial, bukan hanya mampu dalam menafsirkan atau mendefinisikan tentang keadaan sosial dan ekonomi masyarakat akan tetapi ilmu sosial diharapkan mampu mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu pemecahan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan suatu inovasi nyata untuk memberdayakan manusia, masyarakat dan meningkatkan daya lingkungan. Inovasi ilmu sosial telah dibuktikan bahwa pribadi yang individualistis membawa efek buruk dalam pola kehidupan bersama atau bermasyarakat, Dampaknya sangat kompleks (Muhtamar and Ashri, 2020). Sebagai contoh dapat dilihat pada perkembangan teknologi *smartphone* yang menciptakan pribadi individualistis memunculkan efek pada pola komunikasi interpersonal atau kelompok. Kehadiran *smartphone* telah menimbulkan krisis komunikasi sosial, terutama pada generasi muda.

Fenomena seperti ini yang mengakibatkan krisis komunikasi sosial, bahkan bisa menjadi anti sosial. Anti sosial yang terjadi adalah manifestasi dari penggunaan *smartphone* dan media sosial yang memunculkan pribadi-pribadi lebih aktif dan reaktif terhadap dunia maya dibandingkan interaksi pada dunia nyata. Ekstremnya, orang akan menganggap bahwa dunia maya adalah dunia nyatanya. Hal ini adalah masalah sosial yang tidak dapat dibiarkan berlangsung lama dan meluas pada generasi muda. Berdasarkan kenyataan ini, maka masa depan ilmu-ilmu sosial semakin jelas dan cerah di masa digital saat ini, akibat banyaknya konflik dalam masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan pendekatan humanis.

Bab 3

Sosiologi

3.1 Pendahuluan

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang lahir pada abad ke 19. Kemunculan termasuk yang paling muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam (seperti matematika, fisika, dan biologi). Sosiologi memiliki spektrum yang luas dalam memahami dunia sosial. Oleh karenanya sosiologi disebut sebagai studi relasi antar manusia (Giddens & Griffiths, 2006). Sosiologi sebagai studi ilmiah mencoba menyelidiki berbagai kondisi yang terjadi di dunia sosial. Objek sosiologi adalah manusia itu sendiri. Manusia-manusia yang menjalin relasi dalam kehidupan bersama. Dalam kenyataannya relasi antar manusia tersebut tidak selalu mengalami keteraturan. Ada kalanya relasi yang dibangun memunculkan konflik dan pertentangan. Sosiologi melihat kondisi ini sebagai kondisi yang alamiah dalam kehidupan sosial.

Pada perkembangan ilmu sosiologi digunakan untuk memahami berbagai isu-isu sosial kontemporer dan sosiologi dianggap sebagai ratu dalam ilmu - ilmu sosial (Borgatta & Montgomery, 2000). Dengan demikian tulisan ini membahas sejarah kemunculan sosiologi, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai perintis awal, paradigma dalam sosiologi, relasi sosiologi dengan ilmu sosial lainnya dan isu-isu sosial mutakhir yang terjadi di saat ini.

3.2 Sejarah Kemunculan

Kemunculan sosiologi tidak terlepas dari berbagai persoalan dan kekacauan yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke 18-19. Banyak peristiwa penting dan perubahan yang terjadi. Setidaknya Laeyendecker mencatat perubahan-perubahan tersebut dikaitkan dengan berbagai peristiwa, seperti revolusi Prancis, Revolusi Industri, tumbuhnya kapitalisme, reformasi keagamaan Martin Luther, meningkatnya individualisme dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern (Laeyendecker, 1967). Dengan adanya perubahan yang terjadi maka Eropa Barat mengalami ancaman yang cukup serius dan nyata serta memberikan dampak terjadinya disintegrasi (Berger, 2011).

Para ilmuwan di masa itu mencoba merenungkan kembali bagaimana caranya untuk memulihkan masyarakat yang tengah mengalami dampak dari pergolakan sosial-politik. Auguste Comte (1798-1857) merupakan salah seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang menaruh perhatian terhadap persoalan yang tengah melanda Eropa Barat pada abad pertengahan tersebut. Selain itu Comte adalah orang pertama menggunakan istilah Sosiologi. Istilah sosiologi sendiri diambil dari bahasa Romawi *socius* dan bahasa Yunani *logos* yang kemudian dapat diartikan sebagai ilmu berteman/masyarakat. Bagi Comte sosiologi merupakan ratu dari ilmu-ilmu sosial (Reiss Jr, 1967).

Sosiologi sendiri merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan gejala sosial secara ilmiah. Disamping itu Comte dengan sosiologinya berupaya untuk menemukan hukum-hukum sosial layaknya hukum-hukum pada ilmu alam. Kemunculan Sosiologi terkait dengan karya Comte berjudul *Course de Philosophie Positive* (filsafat positif). Filsafat positif menjelaskan bahwa sejarah perkembangan manusia melalui tahapan-tahapan tertentu atau yang disebut dengan hukum tiga tahap (Sunarto, 2005). Tahapan paling awal adalah tahapan teologis di mana manusia mengacu kepada hal-hal yang bersifat adikodrati. Pada tahapan selanjutnya manusia mengacu kepada kekuatan secara abstrak dan metafisik. Pada tahapan yang paling akhir merupakan penjelasan terhadap gejala alam dan sosial didasarkan kepada penjelasan ilmiah (metode positif) dan bukan penjelasan secara teologis dan metafisik. Dengan demikian karya filsafat positif Comte memberikan sumbangsih terhadap lahirnya sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu (Browne, 2005).

3.3 Tokoh Perintis

Setelah Auguste Comte dianggap sebagai pendiri ilmu sosiologi maka terdapat tokoh-tokoh awal yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosiologi seperti Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx. Emile Durkheim adalah tokoh sosiologi yang mengembangkan sosiologi melalui tradisi Universitas. Durkheim lahir pada tahun 1858 di Prancis. Ia sangat produktif dan karya utamanya menjadi rujukan awal sosiologi, yaitu *The Division of Labor in Society* (1893), *Rule of Sociological Method* (1895), *Suicide* (1897) dan *The Elementary Forms of the Religious Life* (1912).

Durkheim pula yang secara tegas memisahkan antara sosiologi dengan filsafat. Dalam karyanya yang berjudul *The rule of Sociological Method* Durkheim berupaya untuk mendudukan metode-metode dalam sosiologi. Bagi Durkheim fokus sosiologi terletak kepada fakta sosial dan bukan fakta individu. Oleh karenanya fakta sosial senantiasa berada diluar individu yang kerap mengalami koersif (paksaan) tanpa disadari (Durkheim, 2004). Selanjutnya dalam pengamatan empirik mengenai studi bunuh Diri Durkheim yang mengaitkan bunuh diri tidak dengan motif individu melainkan pengaruh dari fakta sosial lainnya. Dengan demikian Dukheim secara tegas memisahkan sosiologi dengan psikologi (Sunarto, 2005).

Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Weber lahir pada tahun 1864 di Jerman. Dalam perkembangan sosiologi awal Weber memberikan sumbangan mengenai keterkaitan antara etika protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dalam karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1905). Dalam karyanya tersebut Weber berpandangan bahwa agama Kalvinis terdapat spirit kerja keras, tidak hidup berfoya-foya yang nantinya akan menuntun mereka kepada kemakmuran dan mencapai surga (Fischhoff, 1944). Sumbangan Weber lainnya adalah mengenai Tindakan sosial. Sosiologi menurut Weber sebagai ilmu memahami Tindakan sosial (social action) sebagai tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain ((Parsons, 1949).

Tokoh lainnya yang dianggap perintis sosiologi adalah Karl Marx. Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman. Marx dikenal sebagai seorang filsuf dan ekonomi. Perhatian Marx sendiri terkait dengan pembagian kerja. Adapun sumbangsih Marx terhadap sosiologi mengenai kelas (sumber). Marx berpandangan bahwa setiap sejarah masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas (Magnis-Suseno, 1999). Hadirnya Kapitalisme (industri) di tengah

masyarakat mengalami dua kelas yang saling mempertentangkan, yaitu kelas Borjuis dan Kelas Proletariat. Kelas borjuis digambarkan kelas yang memiliki penguasaan alat-alat produksi dan eksploitatif. Sementara itu kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi dan tenaga menjadi satu-satunya yang dapat dijual untuk memperoleh upah. Marx berkeyakinan bahwa dengan perjuangan kelas (bersatunya kelas proletariat untuk menumbangkan kelas borjuis) maka di dalam masyarakat tidak muncul lagi kelas-kelas (Magnis-Suseno, 1999) Cita-cita Marx ini sangat utopis meskipun sampai saat ini kelas borjuis tidak pernah terealisasi untuk ditumbangkan. Marx juga dianggap sebagai tokoh ideologi Marxisme sekaligus perintis sosiologi.

Tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas memberikan sumbangsih pemikiran dan karya terkait dengan perkembangan sosiologi. Sebagaimana dipahami Tokoh-tokoh seperti Emile Durkheim, Weber dan Karl Marx dianggap sebagai tokoh klasik dalam pemikiran sosiologi awal (Sunarto, 2005). Meskipun tokoh-tokoh sosiologi selanjutnya, seperti Dahrendorf, Talcott Parson, Collin, Giddens, Bourdieu, dst merupakan tokoh-tokoh era modern yang memiliki kesinambungan dengan pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Beberapa tokoh yang telah disebutkan menjadi eksemplar dalam perspektif atau paradigma sosiologi.

3.4 Paradigma Sosiologi

Sebagai ilmu pengetahuan, Sosiologi memiliki paradigma. Paradigma dapat dipahami sebagai suatu pandangan mendasar mengenai suatu disiplin ilmu terkait apa yang menjadi pokok subject matter /persoalannya (George Ritzer, 1975). Istilah paradigma ini pertama kali digunakan oleh Thomas Khun dalam bukunya berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Khun mencoba memberikan gambaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif melainkan secara revolusi ((Bird, 2014). Bagi Khun paradigma tidak bisa di dominasi oleh satu paradigma saja melainkan paradigma baru dapat muncul manakala pengaruh paradigma lama menurun dan digantikan dengan paradigma yang lain (baru). Hal inilah yang dimaksudkan Khun sebagai revolusi pengetahuan pada saat perubahan besar yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan (G Ritzer, 1997).

Sementara itu paradigma sosiologi merupakan paradigma yang multi-paradigm (Paradigma majemuk) atau dengan kata lain memiliki beberapa

paradigma. Masing-masing paradigma tersebut memuat beberapa bagian, seperti eksemplar, pokok persoalan, teori, dan metode.

Menurut George Ritzer (1975) paradigma sosiologi terbagi ke dalam tiga paradigma, yaitu:

1. Paradigma Fakta Sosial
2. Paradigma Definisi Sosial
3. Paradigma Perilaku Sosial

Dalam paradigma fakta sosial yang menjadi eksemplar adalah karya Emile Durkheim yang berjudul *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Pokok persoalan dalam paradigma ini memusatkan kepada fakta sosial. Secara umum fakta sosial berkaitan dengan struktur sosial. Oleh karena itu Fakta sosial dalam paradigma ini bagian terpenting dalam penelitian sosiologi. Secara umum fakta sosial dipahami sebagai cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah-laku yang bersifat memaksa di luar individu (Durkheim, 1973). Adapun teori-teori yang digunakan dalam paradigma ini adalah teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Teori struktural fungsional teori yang menekankan kepada keteraturan/keseimbangan (order) di dalam masyarakat. Sementara itu teori konflik merupakan perlawanan terhadap teori fungsionalisme struktural. Teori konflik melihat masyarakat kepada situasi yang mengalami proses perubahan dan pertentangan secara terus-menerus. Kedua teori ini dianggap sebagai teori yang dominan dalam paradigma fakta sosial. Adapun metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah kuesioner dan interview.

Sementara itu paradigma Definisi sosial yang menjadi eksemplar dari karya Max Weber. Weber memusatkan perhatian kepada tindakan sosial (social action). Berbeda dengan Durkheim yang lebih memusatkan kepada struktur sosial. Pokok persoalan dalam paradigma ini terkait dengan tindakan sosial yang berhubungan sosial. Bagi Weber tidak semua tindakan disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial dapat terjadi manakala tindakan-tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain dan diberikan arti dan makna tertentu (Weber, 2017). Sebaliknya bila tindakan individu tidak memiliki arti subyektif dan tindakannya tersebut tidak diarahkan ke orang lain maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial. Setidaknya ada empat tindakan yang dikemukakan oleh Weber (2004) yaitu tindakan rasional, tindakan irasional, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Keempat tindakan tersebut merupakan tipe-tipe dalam memahami tindakan Weber. Teori – teori

yang digunakan dalam paradigma ini adalah teori aksi, teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah metode observasi yang bersifat intersubjektif dan intersubjektif yang muncul dari tindakan individu yang diamati.

Lebih lanjut paradigma perilaku sosial dapat dipahami sebagai paradigma yang lebih dekat kepada pendekatan Behaviorisme. Pendekatan ini sejak lama dikenal khususnya dalam psikologi (George Ritzer, 1975). Adapun yang menjadi eksemplar dalam paradigma ini adalah karya B.F Skinner terkait dengan prinsip-prinsip psikologi dalam aliran Behaviorisme yang dituangkan ke dalam sosiologi. Pokok persoalan paradigma ini adalah proses interaksi (antar hubungan individu dan lingkungan yang bersifat objek sosial dan objek non sosial. Teori-teori yang digunakan ke dalam paradigma perilaku sosial ini, yaitu teori *Behavioral sociology* dan teori exchange (pertukaran). Teori Behavioral sociology merupakan teori yang dibangun berdasarkan prinsip - prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku dan perulangannya (contingencies of reinforcement). Sementara itu teori exchange (pertukaran) merupakan teori yang mengutamakan ganjaran (imbalan) dalam hubungan sosial. Metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah eksperimen.

Ketiga paradigma yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa paradigma sosiologi memiliki acuan, teori dan metode dari masing-masing paradigma tersebut. Namun demikian perdebatan antar paradigma dalam sosiologi tidak dapat dihindarkan.

3.5 Keterkaitan Sosiologi dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya

Sosiologi memiliki keterkaitan terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti politik, sejarah, antropologi, dan komunikasi. Hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial karena memiliki titik pertemuan dan persamaan terhadap kajian masing-masing disiplin ilmu (Supardan, 2017).

Keterkaitan sosiologi dengan politik

Dalam ilmu politik kekuasaan menjadi hal yang penting. Namun dalam proses perebutan kekuasaan memberikan dampak terhadap pertentangan dan konflik.

Sosiologi yang secara khusus mengkaji politik (kekuasaan) dikenal dengan sosiologi politik. Salah satu gambaran sosiologi politik adalah melihat dinamika kontestasi (perebutan kekuasaan) antarindividu dan antarkelompok (Setiadi & Kolip, 2013).

Keterkaitan sosiologi dengan sejarah

Ilmu sejarah secara umum dapat dipahami sebagai ilmu yang terkait dengan peristiwa yang telah terjadi (masa lampau). Ilmu sejarah menekankan periodisasi pada setiap peristiwa. Dalam berbagai peristiwa tersebut melibatkan waktu dan individu/kelompok. Sosiologi memberikan kontribusi terhadap sejarah terkait dengan memahami setiap konteks sosial yang terjadi (Supardan, 2017). Sebagai contoh perkembangan kapitalisme berhubungan dengan masyarakat industri.

Keterkaitan sosiologi dengan antropologi

Kedua ilmu ini sulit untuk dibedakan secara tegas. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda namun sosiologi dan antropologi memiliki keterkaitan khususnya pada perkembangan teori-teori kedua ilmu tersebut. Antropologi dipahami sebagai ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaannya (Ihromi, 1999).

Keterkaitan sosiologi dan komunikasi.

Pada umumnya komunikasi merupakan suatu proses sosial yang terpenting dalam kehidupan manusia. Komunikasi dan sosiologi memiliki keterkaitan dalam interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak dan komunikasi (Sunarto, 2005). Disamping itu kekhususan sosiologi yang berkaitan dengan komunikasi dinamakan sosiologi komunikasi. Dengan demikian sosiologi memiliki arsiran terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya. Keterkaitan tersebut tidak hanya sebatas persamaan objeknya namun juga memberikan kontribusi antara yang satu dengan yang lainnya.

3.6 Beberapa Isu Kontemporer

Isu-isu sosiologi mutakhir terkait dengan permasalahan aktual yang terjadi di tengah masyarakat baik secara lokal maupun global. Sebagai contoh adalah isu LGBT (Lesbian, Gender, Biseksual dan Transgender). LGBT adalah kelompok yang belum dapat diterima oleh masyarakat luas. Pada kenyataannya

di beberapa negara seperti Malta dan Belgia kelompok LGBT dapat diterima (<https://voi.id/berita/28129/tiga-negara-paling-ramah-lgbt>). Isu-isu LGBT sendiri telah menjadi concern sosiologi. Sosiologi memandang kelompok LGBT sebagai kelompok yang kontroversi dan selalu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

Isu lainnya adalah persoalan yang dihadapi masyarakat secara global yaitu pandemi covid-19. Isu covid-19 menjadi perhatian sosiolog masa kini. Dengan adanya pandemi proses sosial yang dialami masyarakat tengah mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi bisa berkumpul secara ramai-ramai. Perlunya social distancing dalam berinteraksi. Menjaga jarak dan tidak bisa intim memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat selama pandemi. Masyarakat dalam berinteraksi termediasi oleh teknologi dan informasi. Hal ini untuk memberikan keamanan bagi setiap orang untuk tidak saling menularkan virus covid-19. Selanjutnya kebersihan menjadi hal yang prioritas. Masyarakat pun sekarang tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan penutup mulut (masker). Kenormalan baru dalam situasi pandemi menuntut masyarakat untuk memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan, misalnya bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Penelitian yang terkait dengan covid-19 banyak dilakukan para sosiolog.

Oleh karenanya tugas para sosiolog untuk mengamati berbagai persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat saat ini melalui penyelidikan dengan menggunakan metode-metode sosiologis.

Sosiologi sebagai studi ilmiah menaruh perhatian terhadap relasi antar manusia (masyarakat). Perkembangan sosiologi terkait dengan sumbangsih perintis sosiologi awal. Dalam hal penyelidikan berbagai fenomena sosial, sosiologi menggunakan banyak perspektif/paradigma. Dengan demikian sosiologi menjadi disiplin ilmu yang memberikan pengaruh terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya.

Bab 4

Antropologi

4.1 Pendahuluan

Manusia merupakan sosok makhluk yang penuh kreasi. Kehidupannya dihiasi aktivitas. Aktivitas memenuhi kebutuhan, bekerja dengan berbagai profesi, seperti; petani, pedagang, pegawai, ahli medis, teknisi dan pekerjaan lain. Memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan kreativitas dan inovasi. Ini bertujuan memudahkan kehidupan, meningkatkan solidaritas sesama makhluk. Penemuan peralatan pendukung hidup dikerjakan, aspek kehidupan menjadi semakin maju. Penemuan aspek pendukung hidup manusia dilakukan tanpa henti. Inovasi dan perbaikan setiap saat dilakukan. Ini menjadi budaya dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari berulang-ulang. Budaya ini melekat sebagai suatu cara hidup yang berkembang. Budaya yang dianut secara bersama-sama, diwariskan dari sekelompok orang dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari aspek kehidupan yang dialami manusia, termasuk sistem agama dan politik, adat sistiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni (Mughtar, Koswara and Setiaman, 2016).

Ini mendominasi di keseharian, diterapkan dan dijadikan kebiasaan dan membudaya. Kompleksitas budaya mulai dari yang berbentuk sederhana sampai budaya dalam bentuk yang modern dan canggih. Suatu budaya diterapkan di kehidupan bersama, pembentukannya terjadi secara alamiah.

Budaya dibahas ilmu antropologi. Bab ini menguraikan pengertian dan ruang lingkup antropologi, makhluk manusia, kebudayaan dan masyarakat.

4.2 Ruang Lingkup Antropologi

Antropologi dikategorikan ilmu sosial. Ilmu ini produk peradaban barat dan relatif baru. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* ilmu. Antropologi erat kaitannya dengan manusia (Siregar, 2002). Antropologi merupakan suatu disiplin ilmu yang fokus membahas umat manusia, menyusun generalisasi, baik perilaku maupun karya, aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaan. Ini untuk menciptakan pemahaman keanekaragaman manusia (Laksono, 2013). Antropologi mempelajari: Pertama; Asal dan perkembangan manusia. Kedua; Aneka ragam manusia dan ciri fisiknya. Ketiga; Perkembangan dan penyebaran aneka ragam kebudayaan. Keempat; Bahasa. Kelima; Masyarakat dan kebudayaan manusia.

Antropologi terbagi ke dalam dua bagian, antropologi fisik dan antropologi budaya. Pertama; Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme, perkembangan manusia, evolusi dan variasi biologis dalam berbagai jenis (spesies) (Alam, 2014). Kedua; Antropologi budaya mempelajari kebudayaan manusia dan cara hidup bermasyarakat. Antropologi budaya ini terbagi ke dalam arkeologi, linguistik dan etnologi.

Mempelajari antropologi budaya seseorang dituntut memahami hakikat kebudayaan, konsep kebudayaan dan karakteristik budaya. Juga memahami bahasa dan komunikasi, hakikat bahasa, bahasa dalam kerangka kebudayaan. Selain itu, memahami kebudayaan dan kepribadian. Antropologi budaya juga mengkaji praktik-praktik sosial yang dilakukan manusia, bentuk ekspresif dan penggunaan bahasa. Ini sering dilakukan di suatu tempat. Pemakaian berbeda ditempat lain. Tabu di suatu lokasi, sementara di bagian lain tidak, bahkan normative. Cabang-cabang ilmu antropologi berkembang dengan fokus membahas aspek kehidupan manusia, diantaranya antropologi ekonomi, antropologi medis, antropologi psikologi dan antropologi sosial (Ruswanto, 2014).

1. Antropologi ekonomi.

Antropologi ekonomi mempelajari cara-cara manusia mempertahankan dan mengekspresikan diri di kehidupan, pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan hidup. Antropologi ekonomi mencakup riset teknologi ekonomi, produksi, perdagangan, konsumsi serta berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis yang mendukung kehidupan kolektif (Yevita Nurti, 2017). Antropologi ekonomi mempelajari teori ekonomi, rasionalitas, kalkulasi, optimalisasi produk dan jasa.

Lebih-lebih lagi di awal terbentuknya antropologi dipengaruhi aliran Marxisme yang marak memengaruhi sisi kehidupan manusia. Marxisme mencuat era 1960-an dan 1970-an. Ini ditandai dengan munculnya istilah surplus dalam kehidupan masyarakat. Marxisme semakin berkembang menjadi sistem mendunia. Menguasai pangsa pasar. Bertarung dengan kekuatan kapitalis. Perekonomian komunitas dibentuk, seperti; asosiasi ekonomi rumah tangga, kelompok kekerabatan, lingkungan pemukiman, serikat pengrajin, sekte keagamaan.

2. Antropologi medis

Antropologi medis membahas penyakit dan kebudayaan yang memengaruhi kesehatan manusia, terutama paleopatologi (Sabin et al., 2020). Penyakit yang menghinggapi manusia, pengobatan danantisipasi dilakukan. Ini dikerjakan sehingga menjadi bahasan tersendiri dan menjadi budaya mengatasi penyakit. Budaya keseharian manusia yang mendukung kehidupan sehat atau manusia yang kurang perhatian dengan kesehatan (Dumatubun, 2002).

Antropologi medis ini semakin luas, lebih-lebih lagi disaat wabah merebak, budaya dan kebiasaan yang kurang peduli dengan sistem hidup sehat. Perhatian ini membuat antropolog memfokuskan aspek medis. Orang-orang di masyarakat menderita penyakit diperhatikan dan diberikan penyelesaian serta pengobatan (D. Ohlendorf et al., 2020).

3. Antropologi psikologi.

Antropologi psikologi membahas makna hubungan antar individu, kebiasaan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem budaya yang ada. Antropologi psikologi fokus pada individu yang berada di masyarakat. Individu yang memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan individu lain. Sosok individu yang perlu diperhatikan, dikarenakan ada hambatan berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain (Damanik and Agustina, 2018). Antropologi psikologi memahami bentuk budaya dan keragaman budaya yang dipicu aspek psikologis, seperti; kepercayaan, agama, praktik ritual agama, praktik ritual.

4. Antropologi sosial

Antropologi sosial membahas permasalahan sosial kehidupan masyarakat, mendeskripsikan hambatan sosial yang berkembang. Ini memengaruhi sikap bahkan berkembang menjadi budaya. Perkembangan budaya masyarakat direkonstruksi, mulai dari masyarakat primitif sampai masyarakat modern (Fellow, Ruben and Blocher, 2018). Antropologi psikologi melakukan kajian masyarakat menggunakan metode sosiologi, kultur masyarakat dijadikan pembahasan. Perilaku sosial masyarakat yang membudaya diperhatikan. Antropologi sosial marak berkembang di abad 20. Ini dipergunakan untuk memahami budaya manusia. Budaya yang mendukung pembangunan lingkungan sehingga diterima masyarakat.

4.3 Makhluk Manusia

Manusia sosok makhluk yang paling indah dan sempurna. Manusia dilengkapi dengan perasaan, hawa nafsu dan akal sehat. Akal memicu mengikuti pendidikan, melakukan inovasi aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang diinovasi meliputi peralatan hidup, seperti; transportasi, alat telekomunikasi, tempat tinggal dan berbagai peralatan lain. Peralatan ini di awal pembuatan berbentuk sederhana. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan, efektivitas dan efisiensi diutamakan sehingga melakukan penemuan baru. Keadaan ini

memicu motivasi mempermudah sistem hidup. Lebih-lebih lagi, manusia kemampuannya bertambah dengan mengikuti pendidikan dan pembelajaran serta pengalaman hidup yang dialami (Alam, 2014). Manusia memiliki potensi. Potensi ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan potensi melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal.

Manusia makhluk pintar, ia dilengkapi akal sehingga mampu mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan. Dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dijadikan alasan pengerjaan. Manusia dipermukaan bumi sebagai kreator, merubah alam sekitar menjadi produktif. Kosong dimanfaatkan. Kurang indah ditata menjadi menarik dan menyenangkan. Ini keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain. Kreasi manusia menata, menjaga kehidupan dengan membentuk sistem untuk menetralsir situasi dan keadaan alam. Ini dilakukan semata-mata membuat hidup lebih dinamis. Mengolah dan mengelola alam bagian dari tugas manusia. Mengolah alam ataupun bumi mencakup pengolahan secara langsung maupun mengolah dengan merumuskan sistem. Seperti; sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan teknologi. Di sini, manusia menjalankan seluruh aspek kehidupan agar terbentuk lingkungan yang adil, sejahtera (Apomfires, 2002).

Kesejahteraan umat manusia diimbangi dengan materi dan non materi. Begitu juga dengan budaya. Budaya menjadi sarana penunjang kehidupan, seperti; peralatan sehari-hari dan transportasi. Alat ini mengantarkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Peralatan hidup yang diciptakan manusia untuk efektivitas kegiatan yang dilakukan. Peralatan ini dimanfaatkan. Penemuan baru dilakukan. Keadaan ini membentuk budaya. Budaya yang diasimilasikan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat (Affandi, 2016).

Budaya dan manusia berpasangan. Manusia yang membuat dan menerapkan budaya. Tidak heran, manusia dijadikan objek pembahasan antropologi. Karena ia menciptakan aspek hidup lebih dinamis. Manusia menjadi objek pembahasan antropologi disebabkan sisi kehidupannya menerapkan budaya. Budaya yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini tercatat dalam artefak dan bahkan ada yang tercatat di batu. Catatan aspek hidup manusia dari masa ke masa dikenal masyarakat meskipun telah lama berlalu (Cameron, Kocum and Berry, 2020).

Masyarakat manusia terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perilaku, perilaku setiap suku bangsa berbeda-beda dan menjadi identitas budaya.

Budaya manusia dijadikan objek antropologi karena manusia selaku pemilik budaya hidup dinamis dan bermasyarakat. Ada peran yang dijalankan masing-masing. Dari peran ini terbentuk budaya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari (Cornell, 2020).

4.4 Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan serta hasil karya manusia yang mendukung aspek kehidupan masyarakat yang diperoleh setelah melalui proses belajar (Mahyudi, 2006). Belajar secara formal maupun belajar dalam sistem informal. Ada aspek peningkatan sumber daya dari waktu ke waktu. Kebudayaan di kehidupan manusia diimplementasikan ke dalam bentuk yang beragam, seperti; seni dan beragama, antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Perbedaan penerapan dan pemakaian. Ini membudaya di suatu tempat, kemudian disepakati dan dibudayakan. Kebudayaan masyarakat muncul dalam tingkah laku sewaktu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain (Johnson, 2018).

Kebudayaan menjelma di masyarakat sebagai tingkah laku. Tingkah laku yang dapat dipelajari. Kebudayaan muncul setelah menjalani proses belajar maupun asimilasi. Salah satu media pembelajaran budaya melalui enkulturasi, yaitu; proses sosial budaya yang dipelajari dan ditransmisikan kepada orang lain, generasi ke generasi berikut. Kebudayaan berperan menghubungkan manusia dengan lingkungan dan alam sekitar. Kebudayaan juga media mengelola lingkungan tempat menetap dan berkembang menjadi asri. Alam dikelola dan interaksi dijalin dengan sesama manusia. Interaksi dan komunikasi ini membentuk kebudayaan yang disugesti oleh unsur budaya. Unsur kebudayaan manusia antara lain sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian atau ekonomi dan sistem peralatan hidup atau teknologi.

Manusia berkebudayaan seperti yang disaksikan hari ini diperoleh dengan cara belajar, interaksi dan komunikasi dengan sesama manusia. Interaksi yang dilakukan memberikan inspirasi mengerjakan sesuatu yang bernuansa berbeda

dari yang lain. Ciptaan yang berbeda, diselaraskan dengan kebutuhan, menciptakan budaya baru. Budaya baru ini diinternalisasikan anggota kelompok sehingga melekat dan menjadi identitas.

Penginternalisasian budaya dilakukan masyarakat. Ini ditopang sistem. Ada nilai dan kontrol yang menyeimbangkan. Tentu, setelah disepakati secara bersama-sama. Penerapan budaya termasuk budaya yang berbeda dijadikan perekat komunikasi dan saling menghargai. Baik sesama anggota dan kelompok lain pun mematuhi. Ini disebabkan keterikatan dengan nilai-nilai, norma dan aturan hidup berdampingan yang disepakati bersama-sama.

Kelompok budaya memiliki ciri dan kekhasan masing-masing, pola perilaku dan pemikiran ada persamaan. Ini dikarenakan proses belajar yang dijalani. Belajar didapatkan dari berbagai tempat dan setiap tempat dipengaruhi lingkungan. Hasil belajar yang didapatkan juga ada diserapi budaya setempat. Ini menciptakan budaya baru. Budaya yang berasimilasi dan terbentuklah suatu budaya baru. Budaya diserap dan diimplementasikan menjadi pola tingkah laku. Di dalam kebudayaan terdapat suatu nilai yang mengatur cara hidup dan tingkah laku masyarakat. Budaya yang sesuai lingkungan dan diakui bersama para anggota. Seorang individu dikategorikan melanggar budaya bila tidak mengikuti budaya yang telah disepakati. Kebudayaan masyarakat bersifat dinamis, berubah secara bertahap. Perubahan budaya dipengaruhi perkembangan lingkungan dan teknologi. Ini menimbulkan budaya baru mengikuti dinamika perkembangan zaman.

Wujud kebudayaan yang ada di masyarakat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu wujud kebudayaan bersifat ide atau gagasan, aktivitas dan artefak. Wujud kebudayaan ini bersifat ideal. Ini suatu bentuk kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan yang bersifat abstrak (Passini, 2020).

1. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide atau gagasan. Ide dan gagasan serta norma yang berlaku di masyarakat dijadikan aturan sopan santun. Ini melekat di kehidupan. Bagi pelanggar diberikan sanksi sosial.
2. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Sistem aktivitas yang telah disepakati dan diatur secara bersama-sama diikuti kelompok. Seperti budaya perkawinan. Tahapan dan pelaksanaan mengikuti aturan yang telah disepakati.

3. Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Artefak sebetulnya peninggalan masa lalu yang memiliki kemiripan dengan peralatan hidup. Ada juga berbentuk batu. Artefak ini dipelihara dan dipersyaratkan keberadaannya melakukan suatu acara keagamaan.

Ketiga wujud kebudayaan seperti di atas dipergunakan masyarakat, antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Ini dikarenakan penggunaan budaya dipahami sesuai dengan proses belajar yang dialami. Budaya berkembang dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat sehingga unsur budaya pun juga dikembangkan (Tseole and Vermaak, 2020)

Unsur kebudayaan di setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Setidaknya, unsur budaya ini memiliki kesamaan. Akan tetapi, dielaborasi sesuai dengan alam suatu kebudayaan diimplementasikan. Unsur kebudayaan diterapkan dalam sistem norma dan nilai. Ini memungkinkan kerja sama antara anggota masyarakat atau kelompok di suatu komunitas. Selain itu, juga diterapkan organisasi ekonomi. Dikembangkan dalam pemakaian alat-alat atau lembaga masyarakat dan pendidikan serta organisasi sosial maupun politik.

Unsur kebudayaan yang berkembang di antaranya:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mencakup pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi.
2. Mata pencaharian dan sistem ekonomi. Ini meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi dan sistem distribusi.
3. Sistem kemasyarakatan. Ini mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, hukum, sistem perkawinan, sistem warisan.
4. Keempat; Sistem bahasa. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan memiliki verbalisasi yang spesifik. Ini berbeda antara satu bahasa dengan bahasa lain. Penggunaan bahasa di suatu tempat dikategorikan sopan. Namun, di daerah lain suatu pelanggaran budaya.
5. Kelima; Kesenian. Ini menjadi nilai seni di kehidupan, hiburan di masyarakat. Seni mencakup seni rupa, seni suara dan seni gerak serta seni lain yang berkembang.

6. Religi atau sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada di masyarakat dihormati. Kepercayaan ini menjadi suatu rutinitas, dilakukan berulang-ulang oleh anggota masyarakat. Sistem kepercayaan ini suatu simbol yang digunakan berkomunikasi dengan Penciptaan Alam. Mengimplementasikan sistem kepercayaan ini terjadi beragam bentuk. Pemahamannya sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat memiliki beberapa fungsi, antara fungsi kebudayaan adalah pedoman hidup, media atau alat dan kontrol sosial. Pertama; Pedoman hidup. Kebudayaan dijadikan pedoman berperilaku sehari-hari. Ini dijadikan nilai dan hukum. Fungsi ini terus disampaikan kepada anak cucu, generasi ke generasi (*shared culture*). Kedua; Media atau alat. Kebudayaan dijadikan media atau alat membantu hidup manusia. Ini dibuat ke dalam bentuk penciptaan teknologi, penopang hidup. Seperti; alat produksi, senjata, wadah makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah serta alat transportasi. Ketiga; Kontrol sosial. Kebudayaan berfungsi sebagai kontrol sosial di kehidupan masyarakat. Dijadikan penerbit anggota yang mengabaikan identitas kelompok. Sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial.

Perwujudan kebudayaan di masyarakat mempunyai ciri yang sesuai dengan situasi lingkungan tempat suatu budaya dikembangkan. Ini mengikuti dinamika, dituangkan ke dalam bentuk ungkapan “di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Menerapkan suatu kebudayaan memperhatikan konteks sosial masyarakat. Kebudayaan tidak dapat dipaksakan, namun memiliki daya tarik tersendiri bagi orang yang suka dengan suatu kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki suatu daerah ada perkembangan yang pesat. Ini dikarenakan kebudayaan bersifat dinamis. Kebudayaan berkembang seiring dengan perubahan sistem hidup. Budaya berubah sesuai zaman. Suatu budaya menjadi hilang dan ditinggalkan pengikut jika tidak mengayomi aspirasi anggota.

Kebudayaan mengisi norma dan nilai seorang warga masyarakat berperilaku. Kebudayaan merupakan atribut manusia. Kebudayaan mengisi kehidupan dan membantu menetralkan perilaku, menjaga keseimbangan (Daniela Ohlendorf et al., 2020). Kebudayaan dijadikan sistem kehidupan dan aturan berperilaku. Sistem hidup yang mengatur kelompok. Sistem ini berubah dari waktu ke waktu sehingga terjadi perubahan budaya (Özçelik, Aybas and Uyargil, 2016). Perubahan kebudayaan dipengaruhi invention, discovery dan diffusion. Invention berkaitan penemuan atau penciptaan sesuatu peralatan, sistem hidup yang baru. Ini berupa

teknologi dan peralatan. Discovery penemuan suatu benda. Penemuan ini tidak melalui penciptaan barang baru, penemuan suatu benda yang telah ada. Akan tetapi, baru diketahui. Diffusion proses penyebaran suatu kebudayaan ke daerah lain, kemudian meenjadi bentuk baru yang sesuai dengan lingkungan.

4.5 Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup berkelompok, menempati suatu wilayah dan terikat dengan aturan yang disepakati bersama (Young, 2014). Kehidupan anggota masyarakat terjalin erat dengan sistem dan tradisi. Masyarakat terbentuk dari beberapa kelompok kecil, kemudian menerapkan sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral (Mishra and Anand, 2020). Ini bertujuan menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan sesama anggota. Kebebasan di kehidupan masyarakat diberikan pembatasan. Ini menjaga stabilitas. Bila tidak diberikan batasan akan meluas menjadi konflik. Konflik tidak perlu dilestarikan.

Kehidupan masyarakat memiliki beragam budaya dan dilestarikan (Sodiqin, 2013). Anggota masyarakat menjalin hubungan timbal balik, saling menghargai antara satu sama lain. Hubungan timbal balik yang dilakukan berpotensi membentuk kebudayaan baru, mengadopsi pola-pola hidup bersama yang saling memberikan kemudahan. Kehidupan masyarakat dominan menerapkan saling bekerja sama membangun ikatan sosial, membangun solidaritas sosial yang kuat. Ikatan sosial yang mendukung kesinambungan persatuan dan integritas. Ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat menjadi penguat persaudaraan. Meminimalisir konflik, apalagi permusuhan. Ini untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis.

Masyarakat harmonis menjalin interaksi dan bekerja sama menopang kehidupan. Keadaan ini mampu menciptakan kebudayaan baru, penemuan budaya yang diterima anggota masyarakat. Namun, tidak menghilangkan budaya yang telah ada. Masyarakat berkebudayaan menerapkan free public share, ruang publik yang dapat dipergunakan mengutarakan pendapat. Pendapat yang diutarakan terikat dengan sopan santun (Kulaksiz, 2015). Interaksi yang dijalin tetap mempertimbangkan aspek suku, ras dan agama. Bagian akhir pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa antropologi suatu cabang ilmu sosial yang membahas budaya manusia. Budaya nenek moyang dan budaya yang berkembang dari hasil difusi dan asimilasi.

Bab 5

Ilmu Ekonomi

5.1 Pendahuluan

Ilmu ekonomi tidak diciptakan secara mendadak tetapi berkembang melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru mulai tahun 1776, yaitu sejak ditulis dan diterbitkannya buku yang terkenal yang berjudul: *The Wealth of Nation* tahun 1776 karya Adam Smith. Sejak saat itu ekonomi sebagai ilmu mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Jadi, perhatikan bahwa bapak ilmu ekonomi adalah Adam Smith karena beliau adalah yang memberikan dasar dan konsep yang jelas serta utuh (Hasoloan, 2010; Romadhina, 2020).

Sebenarnya penelaahan ekonomi sudah mulai dipelajari orang sejak Aristoteles (350 Sebelum Masehi). Namun penelaahan ekonomi pada waktu itu baru dipelajari pada tingkat yang sangat mendasar, lebih bersifat filosofis. Kemudian tahun 1270, penelaahan ekonomi tersebut diusahakan untuk lebih dikembangkan lagi oleh Thomas Aquinas dengan beberapa tambahan pemikiran yang bersumber pada kitab Injil. Pada tahun 1758, Francois Quesnay mencoba untuk menjelaskan lebih jauh, namun sampai tahap ini perkembangan penelaahan belum sampai membentuk satu disiplin ilmu sendiri. Sampai tahapan ini ekonomi sering disebut dengan Fisiokrat. Pada

tahun 1776 muncul tokoh baru, yaitu Adam Smith, yang berhasil mengangkat penelaahan ekonomi menjadi disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Sejak saat itu, ilmu ekonomi sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh manusia di dalam usaha mereka untuk meningkatkan kualitas hidup (Agung and Gusti, 2008).

Ilmu ekonomi terus berkembang. Gagasan Adam Smith tersebut menjadi dasar bagi ahli ekonomi lainnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo dan John Stuart Mill. Ahli ekonomi yang disebut belakangan ini dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik ini seterusnya dikembangkan oleh Mazhab Austria dan diteruskan oleh Leon Walras, Alfred Marshall, dan lain-lain pada tahun 1890-an. Tradisi klasik ini menelorkan perkembangan bagian teori ekonomi yang dikenal sebagai teori ekonomi mikro (Putong, 2015).

Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an melahirkan ahli ekonomi baru. Karya terbesar lainnya dalam bidang ekonomi dicapai pada tahun 1936 ketika sebuah buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* diterbitkan oleh seorang ekonom besar, John Maynard Keynes. Buku ini berhasil meyakinkan para ahli ekonomi maupun para pengambil keputusan dalam mengatasi krisis-krisis ekonomi yang dialami pada saat itu. Kedua karya besar dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi itu terus berkembang sampai sekarang tidak hanya di negara maju, melainkan pula di negara berkembang (Purba, 2013, 2019; Machfudz, 2016; Purba, Nainggolan, et al., 2020; Purba, Sudarmanto, et al., 2020).

5.2 Batasan, Definisi, dan Permasalahan Ilmu Ekonomi

Istilah ekonomi memang telah muncul sejak zaman Yunani kuno atau sejak Romawi. Istilah itu mulai digunakan oleh seorang ilmuwan Xenophon. Secara etimologis ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Oikos dan Nomos: Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, dengan demikian oikos nomos berarti tata aturan rumah tangga. Batasan-batasan ilmu ekonomi begitu banyak jumlah dan ragamnya, sebanyak dengan lamanya manusia memperhatikan terhadap masalah masalah ekonomi itu sendiri. Ada dua versi yang menyatakan awal kelahiran ilmu ekonomi yaitu:

Pertama; menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi terjadi sejak lahirnya kaum phsyokrat yakni pada saat tulisan Francois Quesnay (Perancis) yang berjudul *Tableau Economique* diterbitkan kira-kira pada tahun 1750. Alasan mereka karena *Tableau Economique* merupakan karya pertama yang memandang kehidupan perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan suatu sistem yang diatur oleh hukum- hukum sendiri. Atas dasar tersebut, kaum physiokrat dipandang sebagai peletak dasar ilmu ekonomi yang pertama.

Kedua, menyatakan bahwa titik awal kelahiran ekonomi sebagai ilmu setelah terbitnya buku Adam Smith (1776) yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang sering disingkat *The Wealth of Nations*. Mereka beranggapan bahwa Adam Smith dengan karyanya itu berhasil menjelaskan bahwa ekonomi telah memenuhi kriteria dasar keilmuan, yakni memiliki objek baik formal maupun material, mempunyai metodologi atau pendekatan, dan tersusun sangat sistematis. Di samping itu, ekonomi memenuhi tiga aspek persyaratan ilmiah, yaitu aspek ontologi, epistimologi maupun aspek aksiologi (Chapra, 2001; Priyarsono, 2017; Fatihudin, 2020).

Dari dua pandangan di atas, pandangan kedua lebih kuat argumentasinya. Oleh karena itu, sampai sekarang Adam Smith dianggap merupakan tokoh utama yang melahirkan ilmu ekonomi. Bahkan karena jasanya yang begitu besar dalam melahirkan ilmu ekonomi, Adam Smith dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi. Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi biasa orang akan melihat apa dan bagaimana definisi itu dikemukakan. Untuk itu marilah kita uraikan mengenai batasan-batasan ilmu ekonomi sejak pertama ekonomi menjadi ilmu. Batasan yang pertama tentang ilmu ekonomi adalah Adam Smith, yaitu "Political economy as an inquiry into the nature of the wealth of nation ... wealth is an annual produce of land and labor of the society. "

Kemudian batasan lain yang dikemukakan seorang ekonom Inggris Alfred Marshall (1880-1920) dalam bukunya *Principles of Economic* memberikan batasan sebagai berikut. "Political economy or economic is a study of mankind in the ordinary business life it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the national requisites of well being". Dari dua batasan di atas bahwa politik ekonomi dan ilmu ekonomi masih mempunyai arti yang sama karena itu pendapat di atas biasa digolongkan kepada kaum Klasik. Pada saat ini politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi disamakan dengan ilmu ekonomi (Hasoloan, 2010; Romadhina, 2020).

Sekarang dapat di kemukakan batasan-batasan ilmu ekonomi lain yang akan memberikan gambaran agar dapat menganalisis dan membandingkan dari setiap batasan tersebut: Fred Rogers Fairchild (1954) dalam bukunya *Principles of Economic* menyatakan: "Economic is the study of man's activities devoted to obtaining the material means for the satisfaction of his wants that the material means which serve to satisfy human wants include human beings as well as external object". George Leland Bach dalam bukunya *Economic An Introduction to Analysis and Policy*. Menjelaskan bahwa; "Economic is the study of how the goods and services we want get produced and how they are distributed among us". Batasan yang dianggap paling modern dikemukakan oleh Leonel Robbin (1945) dalam bukunya yang berjudul *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*: "Economics as the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use" (Machfudz, 2016).

Dari batasan di atas nampak jelas mengandung konsep ends, scarce means dan alternative uses dari masalah itu jelas bahwa permasalahan ekonomi timbul karena adanya kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas, sedangkan alat-alat pemuas kebutuhan adanya terbatas (scarce means). Supaya para pembaca dapat menganalisis dari berbagai batasan yang berbeda itu. Masih banyak definisi ilmu ekonomi yang lain, seperti yang disampaikan dalam bukunya *Economic* yang dikarang oleh ekonom terkenal saat ini, Paul A Samuelson, antara lain:

1. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi di antara banyak orang.
2. Ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi misalnya kecenderungan (trends) dalam harga hasil produksi dan pengangguran. Begitu gejala tadi terlibat maka ilmu ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonominya.
3. Ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang langka atau terbatas (misalnya tanah, tenaga kerja, mesin, keterampilan teknis) untuk memproduksi berbagai komoditi (misalnya beras, daging, pakaian, televisi, jalan raya, senjata) dan

menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi.

4. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya.
5. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, suku bunga, modal dan kekayaan (Agung and Gusti, 2008; Putong, 2015; Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 2019; Sari et al., 2020; Sherly et al., 2020; Sudarmanto et al., 2020).

Kemudian dari sekian banyak definisi di atas, Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai berikut: Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyebarkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Dari batasan-batasan yang telah dikutip di atas tampak bahwa arah perkembangan ilmu ekonomi selama ini ditandai oleh pusat perhatian para tokoh ekonomi. Arah itu menjadi semakin jelas di mana para tokoh ekonomi tersebut dalam memberikan batasan ilmu ekonomi terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama, memberikan batasan ilmu ekonomi dengan menekankan pada dua asumsi (preposisi), yaitu: manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan di pihak lain sumber yang tersedia guna memenuhi kebutuhan tersebut relatif terbatas. Kalau batasan/definisi ilmu ekonomi didasarkan pada dua preposisi tersebut di atas maka definisi ilmu ekonomi tersebut disebut definisi formal. Kelangkaan sumber yang memiliki berbagai alternatif penggunaan mengharuskan manusia memilih sehingga sebagian ilmuwan ekonomi lebih senang menyebut ekonomi sebagai ilmu yang mengkaji perbuatan manusia melakukan pilihan di antara beberapa alternatif.

Kelompok kedua, menekankan bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia mencapai kemakmuran atau yang dipelajari dari hakikat atau tujuan ilmu ekonomi atau didasarkan pada isi dan sebab maka batasan/definisi ilmu ekonomi tersebut disebut definisi secara material.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa secara realitas manusia dihadapkan pada konflik antara kelangkaan sumber-sumber ekonomi dengan kebutuhan yang tak terbatas menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh semua masyarakat manusia baik secara individu, kelompok maupun negara, baik kecil maupun besar yang sudah maju maupun yang masih terbelakang untuk mencapai kemakmuran (Romadhina, 2020).

5.3 Tindakan dan Prinsip Ekonomi

Mempelajari ilmu ekonomi berarti kita mempelajari perilaku atau tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi hasil artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Kedua, sisi biaya artinya kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu maka dilihat dari biayanya. Kedua aspek itulah yang disebut prinsip ekonomi. Secara ringkas prinsip ekonomi menyatakan bahwa, untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin; dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin (Hasoloan, 2010).

Jadi, prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Efisiensi dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat dan menjiwai kegiatan ekonomi (Romadhina, 2020).

5.4 Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu-Ilmu Sosial

Ilmu sosial adalah ilmu yang subject matters-nya masyarakat, apakah kelompok dalam masyarakat lembaga-lembaga dalam masyarakat, hubungan antarmanusia hubungan antarkelompok serta lembaga, juga hubungan antara manusia dengan benda dan dengan segala macam yang dibutuhkan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan

benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi adalah ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Tetapi keterkaitan antar disiplin ilmu dalam bidang ekonomi merupakan fakta yang perlu disusun dan diatur dengan tujuan untuk pengembangan dan pengujian teori ekonomi itu sendiri.

Ilmu sosial merupakan tinjauan ilmiah yang membahas gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sosial insani. Berdasarkan pengalaman sehari-hari, kita menyadari bahwa gejala sosial itu bermacam ragam coraknya. Atau bisa juga, satu gejala sosial mengandung beberapa yang kompleks. Akibatnya, ilmu pengetahuan sosial harus terbagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu (Putong, 2015).

Apakah yang menjadi tugas ilmu ekonomi? Ekonomi mempersoalkan usaha manusia untuk meningkatkan kemakmurannya, baik secara perorangan maupun secara berkelompok (keluarga, bangsa dan masyarakat). Sebagai suatu ilmu, ekonomi tentunya memiliki objek material (apa yang dipelajari) dan objek formal (bagaimana mempelajarinya). Objek material ekonomi meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan keuangan, perdagangan dan dunia usaha. Sedangkan objek formal ekonomi meliputi kemakmuran manusia di masa sekarang dan masa depan (Priyarsono, 2017).

5.5 Ilmu Ekonomi dalam Pemerintahan

Samuelson menjelaskan bahwa kegiatan politik sering kali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti pertemuan puncak menteri-menteri bidang ekonomi, proteksi terhadap industri tekstil, undang-undang pajak, pencegahan polusi udara dan sanksi-sanksi ekonomi. Kegiatan ilmu ekonomi dalam pemerintahan dipelajari secara khusus melalui "politik ekonomi" atau "kebijakan ekonomi". Kenneth E. Boulding mengemukakan tujuan politik ekonomi ada 4 macam, yaitu: kemajuan ekonomi, stabilitas ekonomi, keadilan ekonomi, dan kebebasan ekonomi (Romadhina, 2020).

Dalam tahun-tahun terakhir ini banyak ahli ekonomi yang telah menjadi penasihat presiden dan perdana menteri. Agenda politik penuh dengan

permasalahan ekonomi: haruskah kita menaikkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran? Apakah sebaiknya upah minimum dinaikkan? Apakah sebaiknya pemerintah mengatur bank-bank lebih ketat? Para pemimpin politik memerlukan penasihat ekonomi untuk memberikan nasihat atas berbagai pertanyaan yang rumit.

Kini semakin banyak aspek internasional dari kegiatan ekonomi yang menarik perhatian para pembuat kebijakan. Ketika defisit perdagangan meningkat di tahun 1980-an, Kongres Amerika bekerja keras menyusun ulang peraturan perdagangan internasional. Setiap orang cemas terhadap kemungkinan Amerika Serikat kehilangan teknologinya, dan kemungkinan negaranya menjadi kekuatan kelas dua di belakang Jepang dan Eropa. Contoh lain, keprihatinan terhadap pemanasan global semakin tinggi, telah menimbulkan dukungan internasional untuk mengurangi konsumsi energy (Agung and Gusti, 2008; Fatihudin, 2020).

Kepala pemerintahan harus terus menerus membuat keputusan penting yang melibatkan ilmu ekonomi. Tentu saja, pemimpin-pemimpin nasional tidak perlu menjadi ahli dalam ilmu ekonomi. Namun mereka harus menjadi “konsumen” terpelajar atas nasihat ekonomi yang diberikan kepada mereka. Para presiden yang membawa perubahan ekonomi besar kepada Amerika Serikat – Franklin Roosevelt, John Kennedy, dan Ronald Reagan - bukanlah ahli ekonomi profesional. Akan tetapi, mereka mempunyai gabungan otak para penasihat yang ahli dalam permasalahan ekonomi dan dapat mengusulkan pemecahan terhadap berbagai persoalan saat itu (Romadhina, 2020).

5.6 Hukum Ekonomi dan Keberlakuannya

Lebih dari seabad yang lalu, seorang ahli matematika Perancis bernama Laplace berpendapat bahwa orang dapat melihat masa depan dengan jelas melalui masa kini dengan perhitungan matematis asalkan data dan waktu cukup tersedia. Sekarang dalam zaman ketidakpastian in kita tahu bahwa hal itu tidak benar. Ada sesuatu yang tidak teramalkan, bahwa dalam ilmu pengetahuan yang pasti. Dalam ilmu sosial, ternyata tikus tidak selalu menempuh jalan yang sama dalam kotak percobaannya. Freud mengatakan

bahwa alam bawah sadar kita mengembang tidak terduga dan menghasilkan tindakan-tindakan yang sering mengejutkan. Coba perhatikan, pandangan yang sekedarnya saja pada seseorang akan mengubah tingkahnya (Priyarsono, 2017).

Selama 30 tahun terakhir ini, ilmu ekonomi berada di garis depan dalam mengembangkan model-model yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian memengaruhi tindakan manusia. Model-model tersebut merupakan hubungan antara variabel ekonomi yang satu dengan variabel ekonomi lain atau yang disebut sebagai hukum ekonomi. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sebab akibat (kausal) atau hubungan fungsional. Dalam ilmu ekonomi keberlakuan hukum tersebut tidak pasti (absolute), melainkan bersifat relatif. Hukum ekonomi berlaku hanya pada derajat rata-rata. Artinya di sini, bahwa hukum ekonomi berlaku apabila dipenuhi persyaratannya atau asumsi-asumsi yang mendasarinya. Hal ini mengingatkan ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial di mana segala aturannya terikat pada ruang dan waktu (Putong, 2015).

5.7 Tujuan Ilmu Ekonomi

Tujuan ilmu ekonomi adalah:

1. Untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi baik hubungan yang bersifat kausal maupun hubungan yang bersifat fungsional;
2. Untuk menguasai peristiwa-peristiwa tersebut dan untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Dengan generalisasi atau kesimpulan yang telah ada diperoleh dari hasil penelitian yang saksama serta teori yang telah kita miliki maka akan memungkinkan bagi kita untuk menciptakan suatu kejadian atau kondisi yang menguntungkan kepada ekonomi kita atau setidaknya-tidaknya kita dapat mengadakan pencegahan atau pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang merugikan terhadap ekonomi kita (Hasoloan, 2010).

Ilmu ekonomi yang lahir sejak diterbitkannya buku “The Wealth of Nation” karya Adam Smith (1776) merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari

usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas relatif terbatas. Keadaan demikian menunjukkan adanya kelangkaan mengenai sumber-sumber ekonomi yang mendorong dilakukannya tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan tindakan alternatif dalam memilih sumber daya yang langka tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi atau menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Tindakan ekonomi merupakan tindakan yang dilandasi oleh prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menunjukkan adanya pengorbanan yang tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimum atau untuk menghasilkan sejumlah hasil tertentu berusaha mengeluarkan biaya yang paling kecil (Chapra, 2001; Junaidi and Zulgani, 2011).

Dilihat dari strukturnya ilmu ekonomi terbagi atas ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori dan ekonomi terapan. Sedangkan dilihat dari sifatnya ilmu ekonomi terdiri dari ekonomi positif dan ekonomi normatif.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti, ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi. Kegiatan ekonomi sehari-hari juga terikat pada hubungan antarvariabel ekonomi yang disebut hukum ekonomi. Walaupun keberlakuan hukum ekonomi bersifat tidak absolut atau relatif. Tujuan ilmu ekonomi adalah Untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik hubungan yang bersifat kausal maupun hubungan yang bersifat fungsional serta untuk menguasai peristiwa-peristiwa tersebut dan untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Bakti, Sumanjaya and Hasution, 2010; Putong, 2015).

Bab 6

Ilmu Sejarah

6.1 Pendahuluan

Manusia, baik secara individu, maupun secara kolektif dalam melangsungkan kehidupannya berinteraksi satu dengan yang lain, baik antar individu, antar kolektif guna mempertahankan diri selalu berada pada tempat (geografis) tertentu dan dibatasi oleh waktu (periode) pula. Tempat atau geografis itulah merupakan panggung di mana terjadi peristiwa terjadi, seperti peperangan, perdamaian, perjanjian, kesedihan, kegembiraan disebabkan kemenangan, panen hasil pertanian ladang atau sawah, hasil berburu di hutan, hasil tangkapan ikan di laut, atau danau, dan peristiwa lain seturut dengan kejadian yang dialami secara individu maupun kolektif.

Waktu kejadian, merupakan momen di mana suatu peristiwa yang dialami oleh individu, maupun kolektif manusia itu sendiri. Peristiwa itu hanya sekali terjadi dalam waktu, minute, periode tertentu. Sebagai contoh peristiwa hilangnya pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500, terjadi pada hari minggu 10 Januari 2021, diperkirakan pukul 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), merupakan minute yang dialami oleh manusia, baik yang berada di dalam pesawat sebagai korban, maupun bagi keluarga yang kehilangan, dan pihak maskapai yang mengalami kerugian.

Berdasarkan peristiwa tersebut, muncullah cerita kehidupan manusia, baik itu secara lisan, maupun secara tertulis, atau secara visual melalui alat-alat rekaman yang sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan peristiwa masa lampau umat manusia. Narasi tentang masa lampau manusia yang terjadi pada tempat (geografis) tertentu dan pada waktu, atau periode tertentu yang dijelaskan oleh manusia itu pula berdasarkan sumber sejarah yang diperolehnya itulah bagian dari ilmu sejarah.

Bab ini akan menjelaskan pengertian sejarah, metodologi sejarah, Hubungan sejarah dengan Ilmu sosial lainnya, teori-teori sejarah, filsafat sejarah dan Historiografi atau sejarah penulisan sejarah.

6.2 Apa itu Sejarah?

Sejarah adalah ilmu tentang masa lampau manusia. Objek kajian sejarah adalah manusia, bukan hewan, tumbuhan, atau alam semesta beserta isinya. Sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang masa lampau umat manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa sejarah merupakan studi tentang sebab dan akibat, namun tidak semua peristiwa masa lalu merupakan peristiwa sejarah (Sutrasno, 1975). Proses perkembangan alam semesta yang telah berlalu, seperti terjadinya gunung berapi, bukanlah suatu peristiwa sejarah. Seorang penulis sejarah berkeyakinan bahwa apa yang dituliskannya benar sesuai dengan fakta, dan tidak memberikan opini pribadi secara subjektif. Peristiwa sejarah bermakna apabila penulisnya dapat menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Sering terjadi bahwa orang berpikir bahwa membaca sejarah berarti mencari makna dan arti dalam sejarah, jika tidak maka mempelajari sejarah hanya sekedar mengingat fakta dan data.

Kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengambil alihnya dari kata Arab, yaitu *syajarah* (Gazalba, 1966) Kata *syajarah* mengandung arti 'pohon'. Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Dalam kaitan ini maka terdapat beragam pengertian "sejarah" seperti: silsilah, riwayat, babad, tambo maupun tarikh (Tamburaka, 1999). Silsilah yaitu daftar asal-usul, ranji keturunan yang kalau digambarkan secara skematis menyerupai pohon dengan cabang dan rantingnya. Riwayat juga diartikan sebagai babad yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya riwayat kerajaan, riwayat bangsa,

buku tahunan, kronik, misalnya Babad Tanah Jawi yang isinya menceritakan tentang silsilah kerajaan Singasari.

Dalam khasanah bahasa Indonesia, sejarah setidaknya mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Sejarah adalah silsilah atau asal usul;
2. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau;
3. Sejarah adalah ilmu, pengetahuan, dan cerita pelajaran tentang kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau.

Masuknya pengaruh kebudayaan Eropah ke Nusantara membawa istilah yang ekuivalen dengan sejarah yaitu: *history* (Inggris), *geschichte* (Jerman), dan *geschiedenis* (Belanda). Ketiga istilah tersebut menunjukkan bahwa yang disebut sejarah ada tiga hal yaitu:

1. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seluruhnya yang berhubungan dengan negara, manusia, benda dan sebagainya, atau dengan singkat, yaitu seluruh perubahan yang nyata di dalam diri manusia sekitar kita;
2. Cerita yang tersusun secara sistematis dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa umum;
3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perkembangan-perkembangan negara, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau.

Sejarah mengandung arti yang mengacu kepada: (1) sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita,; (2) cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut, dan ; (3) ilmu yang bertugas meneliti perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas masa lampau manusia (Ali, 1963).

Dalam bahasa Inggris *history* (sejarah) berasal dari kata benda Yunani *istoria*, yang berarti ilmu. Dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani Aristoteles, *istoria* berarti suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologi merupakan faktor atau tidak di dalam pertelaan; penggunaan itu, meskipun jarang, masih tetap hidup dalam bahasa Inggris di dalam sebutan *natural history*. Aristoteles menggunakan kata *historia* untuk

menjelaskan suatu penelaahan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, baik itu menyangkut susunan kronologis maupun tidak. Lama-kelamaan, makna istilah ini menyempit. Istilah ini diperuntukkan untuk menyebutkan penelaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal-ikhwal manusia) dalam urutan kronologis (Gottschalk, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengkajian sejarah bergantung sepenuhnya kepada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar pernah terjadi di seputar kehidupan masa lalu umat manusia.

6.2.1 Sejarah Dalam Pandangan Para Ahli

Herodotus yang hidup pada sekitar tahun 484-425 Sebelum Masehi, adalah seorang ahli sejarah pertama di dunia berkebangsaan Yunani yang dijuluki sebagai *The father of History* atau bapak sejarah. Herodotus berpendapat bahwa sejarah tidak berkembang kearah depan serta dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia, yaitu: *Hybris* dan *Memesis*. Segala peristiwa yang terjadi menurut Herodotus dipengaruhi oleh perbuatan dewa-dewa atau tergantung dari kemauan dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu ditentukan dalam perbuatannya bukan oleh sebab-sebab yang objektif baik, melainkan oleh perasaan antipasti dan simpatik para dewa terhadap manusia. Yang sanggup mengatasi dewa-dewa dan keputusan mereka adalah *Fatum* dan *Moira* yang perbuatannya tidak dapat dipahami oleh manusia. Pandangan sejarah Herodotus ini bersifat *religious* (Funk, vol 13, 1876).

Menurut Kartodirdjo (2019) bahwa istilah sejarah secara umum digunakan untuk menunjuk cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejarah dalam arti subjektif. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang, penulis). Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang, maka mau tidak mau memuat sifat-sifatnya, gaya bahasanya, struktur pemikirannya, pandangannya dan lain sebagainya.

Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan unit yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsure bertalian satu sama lain

dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsure-unsur itu saling menopang dan saling tergantung satu sama lain.

Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi. Bagi orang yang ada kesempatan mengalami suatu kejadian pun sebenarnya hanya dapat mengamati dan mengikuti sebagian dari totalitas kejadian itu; jadi tidak mungkin mempunyai gambaran umum seketika itu. Keseluruhan proses situ berlangsung terlepas dari subjek manapun juga; jadi objektif dalam arti tidak memuat unsure-unsur subjektif (pengamat atau pencerita).

Dalam ucapan “sejarah berulang” rupanya yang dimaksud ialah sejarah dalam arti objektif, sedang “kita perlu belajar dari sejarah” akan lebih menunjuk sejarah dalam arti subjektif. Skhema seperti gambar dibawah ini menjelaskan keterangan tersebut.



Gambar 6.1: Sejarah dalam arti subjektif dan objektif (Sumber: Kartodirdjo, 2019/diolah)

Menurut Collingwood (1985), sejarawan berpikir bahwa sejarah merupakan ilmu atau suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tindakan manusia pada masa lalu. Jawaban itu diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah dan dari self-knowledge manusia. Kuntowijoyo (2003), berpendapat bahwa sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unit, dan empiris. Sejarah itu bersifat diakronis karena berhubungan dengan perjalanan

waktu. Sejarah mencatat segala sesuatu berdasarkan rentang waktu. Ibarat meneliti sebuah pohon, sejarah berisi penelitian tentang asal bibit, kapan pohon tumbuh, kapan pohon bercabang dan beranting, dan kapan pohon berbuah. Sejarah bersifat ideografis karena sejarah bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menceritakan sesuatu. Berbeda dengan ilmu sosial yang lain, sejarah berusaha melukiskan sesuatu sedetail mungkin. Sejarah bersifat unik karena berisi hasil penelitian tentang hal-hal yang unik dan secara khas hanya berlaku pada sesuatu, hal yang ada dalam suatu tempat dan pada waktu tertentu. Hal ini terlihat dalam topik-topik sejarah yang bersifat tunggal dan sekali terjadi. Misalnya, revolusi Perancis, revolusi Indonesia, dan perjuangan Sisingamangaraja XII.

Selain itu, sejarah juga bersifat empiris. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Tanpa pengalaman empiris, sejarawan tidak bisa berbicara. Oleh karena harus bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh, sejarah harus berdasarkan pada fakta dan penelitian yang akurat. Akan tetapi, banyak juga sejarah yang ternyata tidak berasal dari fakta-fakta yang akurat. Tugas kitalah untuk selalu meneliti dan mempelajari sejarah dengan seksama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah pada intinya merupakan cerita tentang masa lampau umat manusia. Cerita yang ditulis berdasarkan sumber sejarah berupa fakta untuk menjelaskan realitas di masa lampau.

6.3 Sejarah Sebagai Peristiwa, Kisah, Ilmu, dan Seni

Sejarah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dari titik mana orang menyaksikan sebuah peristiwa tersebut. Adanya suatu kejadian atau peristiwa dapat dinyatakan dalam ilmu sejarah yaitu: “sejarah sebagai peristiwa”, “sejarah sebagai sebuah kisah”, “sejarah sebagai ilmu”, dan “sejarah sebagai seni” (Gottschalk, 2006).

Sejarah sebagai peristiwa

Sejarah sebagai peristiwa merupakan sejarah sebagaimana terjadinya (*histoire realite*). Peristiwa yang dimaksudkan disini bukanlah semua peristiwa, namun

peristiwa itu harus dihubungkan dengan manusia. Selain itu, dimensi waktu dari sejarah perlu diperhatikan, sebab tidak semua peristiwa di masa lalu dianggap sebagai sejarah jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses atau dinamika dalam suatu konteks historis. Antara peristiwa-peristiwa itu terdapat hubungan sebab akibat. Penyebab merupakan hal yang menyebabkan suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh sejarah sebagai peristiwa adalah pergerakan nasional di Indonesia lahir pada awal abad ke-20 karena pada masa itu muncul kesadaran kebangsaan dikalangan kaum terpelajar Indonesia. Hubungan sebab akibat itu merupakan suatu dinamika menuju perubahan sebagai suatu hakikat sejarah.

Kesinambungan antara peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain dalam hubungan sebab akibat terdapat dalam konteks waktu (temporal), manusia sebagai pelaku, dan tempat lokasi peristiwa atau aspek geografis (spasial). Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa sejarah juga bersifat unik karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali secara persis. Selain abadi dan unik, peristiwa sejarah juga merupakan peristiwa yang penting karena peristiwa itu mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak.

Sejarah sebagai kisah

Huizinga, sejarawan Belanda, mengatakan bahwa sejarah adalah “suatu kisah yang telah berlalu”. Sejarah, sebagaimana dikisahkan (*histoire-recite*) mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana terjadinya (*histoire realite*). Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Tamburaka, 1999). Ada kemungkinan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif (Gottschalk, 2006). Subjektivitasnya terletak pada bagaimana sejarah tersebut dituturkan atau diceritakan oleh seseorang. Hal ini disebabkan oleh kepribadian si pencerita atau si penutur sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya, kelompok sosial di mana dia berada, perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki, dan kemampuan bahasa yang dimilikinya (Kuntowijoyo, 2006).

Faktor kepentingan terlihat dari cara seseorang menuturkan kisah sejarahnya. Biasanya, dalam penulisan biografi, seorang tokoh secara pribadi ingin menunjukkan bahwa pribadinya memiliki peran penting dalam suatu peristiwa

sejarah. Nilai-nilai yang diperjuangkan terlihat dalam corak tulisan sejarah yang disampaikan oleh seorang penutur. Misalnya, seorang yang berhaluan nasionalis akan cenderung menulis sejarah tentang nasionalisme. Begitu juga dengan seseorang yang berhaluan agamis atau sosialis, yang cenderung menulis sejarah berdasarkan nilai yang ia yakini.

Faktor kelompok sosial yang dimiliki si penutur sejarah juga dapat memengaruhi cara penulisan sejarah. Misalnya, seorang sejarawan akan menulis sejarah dengan menggunakan kaidah akademik ilmu sejarah, sedangkan seorang wartawan akan menulis sejarah dengan bahasa wartawan. Pengetahuan dan latar belakang keilmuan penutur sejarah juga memengaruhi kisah sejarah yang disampaikannya. Pengaruh ini dapat dilihat dari kelengkapan kisah yang disampaikan, gaya penyampaian, dan interpretasinya atas peristiwa sejarah yang akan dikisahkan. Misalnya, kisah tentang sejarah Indonesia pada abad ke-20 pasti akan lebih lengkap dipaparkan oleh seorang sejarawan daripada seorang fisikawan. Oleh seorang yang mempunyai latar belakang keilmuan ekonomi, kisah tersebut cenderung akan ditafsirkan dengan menggunakan perspektif ekonomi. Kemampuan bahasa seorang penutur sejarah juga memengaruhi hasil rekonstruksi kisah sejarah yang ia tuturkan. Penuturan sejarah sebagai kisah memang sangat bergantung pada kemampuan bahasa si penutur kisah sejarah.

Sejarah sebagai Ilmu

Banyak contoh sejarawan bukanlah orang yang memang terdidik untuk menjadi sejarawan, tetapi penulis sejarah dapat datang dari mana saja. Wartawan, guru, politisi, sastrawan, dan pendeta boleh saja menulis sejarah. Kalau dokter atau Insinyur harus datang dari orang yang memang dididik dalam ilmunya, tidak demikian sejarawan. Sejarah adalah ilmu yang terbuka. Kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis, memperkuat keterbukaan itu. Keterbukaan itu membuat siapa pun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu (Kuntowijoyo, 1997).

Sejarah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah berguna untuk memberikan pelajaran bagi seseorang untuk memperbaiki diri pada masa depan dari kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Sejarah juga dapat membuat orang menjadi bijaksana (*history make man wise*). Oleh karena itulah, sejarah merupakan

guru yang baik bagi manusia atau dalam kehidupan (*historia vitae magistra*) baik secara individu atau kolektif (Sulasman, 2014).

Sejarah sebagai ilmu bermula dari anjuran Leopold von Ranke (yang dikenal sebagai bapak historiografi modern) kepada para sejarawan untuk menulis apa yang sesungguhnya terjadi. Penulisan sejarah dengan apa yang sesungguhnya terjadi, membuat sejarah semakin menjadi objektif. Penulisan terhadap aktivitas manusia tertentu yang mempunyai tempat dan waktu tertentu, serta terlibat dalam kejadian tertentu, sejarah sebagai ilmu membedakan ilmu sejarah dengan filsafat yang bersifat abstrak dan spekulatif (Gottschalk, 2006).

Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara yaitu:

1. Perkembangan dalam filsafat
2. Perkembangan dalam teori sejarah
3. Perkembangan dalam ilmu-ilmu lain
4. Perkembangan dalam metode sejarah.

Perkembangan dalam sejarah selalu berarti bahwa sejarah selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi. Perkembangan dalam filsafat ditunjukkan ketika filsafat sejarah zaman Pertengahan didominasi oleh filsafat sejarah Kristen, maka penulisan sejarah yang menonjolkan peran orang-orang suci juga nampak. Riwayat penyebaran Kristen di Irlandia oleh Saint Patrick pada abad ke-5 masih diperingati sampai sekarang.

Perkembangan dalam teori sejarah yang ditunjukkan ketika dalam seminar sejarah I di Yogyakarta pada tahun 1957 telah dicanangkan perlunya nasionalisme dalam penulisan sejarah, yaitu sejarah yang menunjukkan peran orang Indonesia “Indonesia-sentrisme” untuk menggantikan “sejarah dari atas geladak kapal” yang menunjukkan peran para penjajah Belanda “Neerlandosentrisme” (Kartodirdjo, 2020). Tantangan itu mendapat jawaban ketika pada tahun 1962 Jhon Smail menulis tentang mungkin kita menulis sejarah Indonesia yang otonom yang para pelakunya adalah orang Indonesia sendiri. Misalnya, kita akan menulis sejarah Aceh. Asal kita selalu dapat mengembalikan semua peristiwa pada pertentangan antara uleebalang dan ulama kita akan mendapatkan sejarah Indonesia yang otonom. Orang-orang asing yang ada hanya mempunyai peran sebagai pembantu pihak dalam yang sedang bertikai.

Perkembangan dalam ilmu-ilmu lain juga berpengaruh pada perkembangan sejarah. Ketika sosiologi menjadikan kota sebagai bahan kajian, maka sejarah muncul dengan Sejarah Kota. Demikian juga ketika psikologi Freudian digantikan oleh psikologi Neo Freudian dalam sejarah muncul psikohistori, sejarah yang menguraikan kejiwaan tokoh-tokoh sejarah.

Perkembangan dalam metode juga sangat berpengaruh. Ketika dalam sejarah muncul metode kuantitatif, maka di Amerika dan Eropa muncul Sejarah Kuantitatif, karena di tempat-tempat itu sumber sejarah lama sangat memungkinkan untuk dikuantifikasikan. Demikian pula kegiatan-kegiatan penerbitan sumber. Penerbitan Arsip Nasional tentang Sarekat Islam Lokal telah mendorong banyak penelitian (Kuntowijoyo, 1997).

Sejarah sebagai ilmu ditunjukkan oleh unsur yang merupakan ciri-ciri keilmuannya. Secara seksama dapat dipahami bahwa ciri-ciri dalam unsur-unsur sejarah sebagai ilmu yaitu:

1. Ada objek
2. Ada metode
3. Sistematis
4. Kausalitas sebagai hukum sejarah
5. Adanya teori
6. Adanya pendekatan ilmiah
7. Perspektif filsafat.

Suatu pengetahuan menjadi ilmu harus memiliki syarat-syarat yang mencakup subjek, objek, dan hubungan subjek dengan objek. Subjek adalah orang yang mengetahui sesuatu (peristiwa). Objek adalah sesuatu (peristiwa) yang diketahui oleh subjek. Hubungan subjek dengan objek menyebabkan suatu objek menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang menjadi landasan ilmu sejarah adalah peristiwa sejarah. Sejarawan tidak mungkin dapat merekonstruksi sejarah tanpa mengetahui dan memahami peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah berisi pengalaman manusia pada masa lampau. Dengan demikian ilmu sejarah termasuk ilmu empiris, karena sejarah berlandaskan pengalaman manusia pada masa lampau yang menjadi pengetahuan sejarawan. Pengalaman itu direkam dalam dokumen (Sulasman 2014)

Sejarah memiliki metode. Proses rekonstruksi sejarah mulai heuristik, kritik sumber, interpretasi sampai dengan historiografi, harus berdasarkan metode, khususnya metode sejarah (Seignobos. Ch & Langlois.Ch.V, 1904). Dengan

metode sejarah, rekonstruksi sejarah akan menghasilkan tulisan sejarah ilmiah. Penulisan sejarah tanpa dilandasi oleh metode sejarah hanya akan menghasilkan tulisan populer. Sejarah ditulis secara sistematis, yaitu hubungan antar bab dan hubungan antar sub bab pada setiap bab disusun secara berurutan atau kronologis, sehingga uraian secara keseluruhan bersifat diakronis. Sejarah sebagai ilmu memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu penerapan konsep dan teori ilmu sosial (Kartodirjdo, 2019).

Perspektif filsafat digunakan untuk mencapai objektivitas dan kebenaran sejarah. Filsafat adalah landasan berpikir untuk menegaskan kebenaran ilmu. Pemikiran filsafat, khususnya logika berpikir dapat meningkatkan kualitas pengetahuan manusia. Oleh sebab itu sejarah sebagai ilmu memiliki filsafat sejarah. Objektivitas sejarah merupakan syarat mutlak dalam ilmu sejarah. Objektivitas dalam istilah sejarah ialah dalam aktualitas: jadi, kejadian itu sendiri terlepas dari subjek. Bertolak dari suatu sejarah atau konstruk sebagai sejarah dalam arti subjektif, dalam proses komunikasi antar individu timbul penyampaian suatu sejarah dalam arti subjektif kepada orang kedua. Dapatlah dikatakan bahwa sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif. Komunikasi secara lebih luas membuat fakta semakin intersubjektif, artinya semakin dimiliki oleh banyak subjek. Akhirmya pada suatu waktu fakta menjadi inter-subjektivitas di kalangan yang sangat luas menjadi umum sekali atau dengan istilah tepat menjadi fakta keras.

Tidak semua fakta berkembang menjadi fakta keras, dapat tetap menjadi fakta lunak, yaitu apabila masih tetap diragukan kepastian fakta itu. Apabila suatu fakta secara intersubjektif telah diterima sebagai kebenaran, maka bagi yang menerimanya fakta tersebut dapat dikeluarkan dari subjek secara individual; jadi diobjektivitaskan menjadi satu objek. Dengan demikian fakta tersebut dapat diterima oleh kelompok yang bersangkutan sebagai objektif (Kartodirjdo, 2019).

Sejarah dapat dilihat sebagai ilmu dengan karakteristik tertentu. Sejarah termasuk ilmu manusia (*humaniora*) yang dalam perjalanan waktu dipecah menjadi ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Sebagai salah satu ilmu manusia, dalam hal tertentu, sejarah berbeda dengan ilmu alam. Di satu sisi, ilmu-ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum dan bersifat *nomothetic* (satu hukum), sedangkan sejarah berusaha mencatat hal-hal yang

khas atau bersifat ideografis. Selain itu, dalam ilmu alam, hukum-hukum berlaku secara tetap tanpa memandang orang, tempat, waktu dan suasana.

Sejarah termasuk ilmu empiris. Karena itulah sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam berbagai dokumen. Dokumen-dokumen itu diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta sejarah. Sejarah berbicara tentang manusia sehingga digolongkan dalam ilmu humaniora atau kemanusiaan. Namun, sejarah berbeda dengan antropologi dan sosiologi. Sejarah membicarakan manusia dalam kurun waktu atau periode.

Dalam hal kurun waktu, setidaknya ada empat hal yang menjadi titik penjelasan, yaitu:

1. Perkembangan
2. Kesenambungan
3. Pengulangan
4. Perubahan

Dalam hal ini, sejarah melihat perkembangan masyarakat dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya, sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia yang dimulai dari lahirnya organisasi modern yang bersifat kebangsaan meninggalkan kedaerahan yang dimulai dari Budi Utomo di pulau Jawa pada awal abad ke-20. Sejarah juga melihat kesinambungan yang terjadi dalam suatu masyarakat, misalnya, kolonialisme merupakan kelanjutan dari patrimonialisme. Sikap Belanda meniru raja-raja pribumi dalam menarik upeti ketika menjajah nusantara adalah sebagai contoh kesinambungan. Sejarah juga melihat pengulangan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pengalaman pada masa kolonial, bahwa kaum pemodal besar menyengsarakan penduduk dan menimbulkan protes sosial seperti aksi buruh.

Era kini, pemodal juga muncul lagi dengan membuka berbagai usaha dan perusahaan dan protes sosial terjadi di mana-mana sebagai reaksi atas kehadiran pemodal dengan perusahaannya. Sejarah juga melihat perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang biasanya disebabkan oleh pengaruh eksternal. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kelanjutan gerakan romantik di Eropa, gerakan pan-islamisme di Timur Tengah, gerakan Turki muda yang berhasil menjatuhkan kekuasaan monarki, dan kemenangan kelompok nasionalis di bawah pimpinan Sun Yat Sen di Cina (Wicaksono, 2015).

Dalam meneliti objeknya, sejarah berpegang pada teorinya sejarah. Teori sejarah ditemukan dalam setiap tradisi sejarah. Teori hanyalah gagasan yang memudahkan dalam menginterpretasikan data (Gottschalk, 2006). Dengan demikian teori apapun dapat digunakan sepanjang dapat menjelaskan data yang terkumpul atau tersedia. Pada teori-teori yang didasarkan pada epistemology realis, kaitan antara teori dan data adalah mutlak, karena keduanya mewujudkan kenyataan yang an sih. Dengan kata lain fakta adalah interpretasi teoritis atas bahan-bahan yang tersedia. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pilihan teori harus konsisten dengan pilihan metodologi. Metodologi struktural harus menggunakan teori struktural (Sulasman, 2014). Di Amerika, yang para sejarawannya berorientasi pragmatis, teori sejarah yang filosofis tidak diajarkan. Di negeri Belanda, yang mempunyai teori kontinental yang lebih kontemplatif, diajarkan teori sejarah yang filosofis. Teori sejarah diajarkan sesuai dengan keperluan peradaban masing-masing tradisi.

Selain mempunyai teori, sejarah juga mempunyai generalisasi. Seperti ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Sering kali generalisasi sejarah merupakan koreksi atas kesimpulan-kesimpulan ilmu lain. Misalnya, revolusi Indonesia bukan pekerjaan kaum ekstremis seperti propaganda Belanda, melainkan merupakan revolusi pemuda (Anderson, 1988). Untuk itu, sejarah juga mempunyai metode sendiri (Sjamsuddin, 2007). Berbeda dengan hukum ilmu-ilmu sosial yang terlalu bersifat mekanis, metode sejarah bersifat terbuka dan hanya tunduk pada fakta. Walaupun sejarah merupakan ilmu yang terbuka dan menggunakan bahasa sehari-hari dengan nalar umum, sejarah juga seperti ilmu-ilmu lain yang membutuhkan riset, penulisan yang baik, penalaran yang teratur, dan sistematika yang runtut, serta konsep yang jelas.

Sejarah sebagai seni

Sejarah juga dapat dilihat sebagai seni (Kuntowijoyo, 1997). Sebagaimana seni, sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Sering kali dalam memutuskan apa yang harus dilakukan, sejarawan menggunakan intuisinya. Kebutuhan sejarawan akan intuisi terlihat ketika ia melakukan penelitian. Untuk mendapatkan intuisi, sejarawan harus bekerja keras dengan data yang ada. Hal inilah yang membedakan pengarang dengan sejarawan. Pengarang cenderung bekerja sambil menghayal. Sementara itu, sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya.

Dalam melihat sejarah sebagai seni yang memerlukan imajinasi (Kartodirdjo, 2020), sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Misalnya, seorang sejarawan yang menulis tentang perlawanan arek-arek Surabaya. Cenderung dituntut untuk dapat membayangkan keadaan kota Surabaya saat itu. Penulisan sejarah juga memerlukan emosi. Penulisan sejarah dengan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai, asalkan penulisan itu tetap setia pada fakta. Dalam penulisan sejarah yang melibatkan emosi, pembaca seakan-akan diajak hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Penulisan sejarah juga membutuhkan gaya bahasa yang baik yang dapat menggambarkan detail-detail sejarah secara lugas dan tidak berbelit-belit.

Sejarah sebagai seni mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya karena seni merupakan hasil imajinasi. Ketepatan dan objektivitas sangat perlu dalam penulisan sejarah. Ketepatan berarti kesesuaian antara fakta dengan tulisan sejarah. Objektivitas berarti tidak ada pandangan yang individual. Kedua, sejarah akan terbatas. Hanya sejarah yang dapat dideskripsikan sebagai karya seni yang diakui. Sementara itu, tema-tema sejarah yang penting lainnya, seperti sejarah ekonomi dan sejarah kuantitatif yang menyuguhkan angka-angka dan analisis tidak akan tertulis (Sulasman, 2014).

Walaupun demikian, seni juga memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah. Seni memberikan karakteristik yang dapat menggambarkan watak orang dalam biografi kolektif. Misalnya, dalam penulisan sejarah tentang Perang Diponegoro, seorang sejarawan akan terdorong untuk mengungkapkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Perang Diponegoro tersebut. Pengungkapan berbagai peristiwa ini akan semakin lengkap jika ada pelukisan watak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di sinilah seni memainkan perannya. Selain itu, seni juga memberikan struktur plot atau alur tulisan sejarah yang kerap kali dilupakan oleh sejarawan.

6.4 Generalisasi, Periodisasi, dan Kronologi

6.4.1 Generalisasi

Generalisasi merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antar konsep-konsep dan berfungsi sebagai pembantu untuk berpikir dan mengerti. Generalisasi tidak hanya mendeskripsikan data tetapi juga memberikan struktur pada data ini. Seperti halnya dengan fakta-fakta, generalisasi-generalisasi dapat didukung atau ditolak dengan kembali merujuk kepada berbagai macam evidensi yang dapat diamati. Juga seperti halnya dengan konsep, generalisasi ini penting dalam pengembangan berbagai ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial dan sejarah, karena fungsinya dapat membantu manusia sendiri memahami dunia dengan segala fenomena di sekelilingnya di mana mereka hidup. Hanya generalisasi berbeda dengan fakta dalam hal: jika fakta menunjukkan kepada peristiwa, individu, atau situasi tunggal atau unik, maka hubungan-hubungan yang disarankan oleh generalisasi itu menunjuk kepada lebih dari suatu kemungkinan. Ilmu-ilmu sosial sangat kaya dengan generalisasi.

Begitu pula dengan sejarah, terutama setelah sejarah menggunakan berbagai konsep ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan pokok kajiannya. Hanya bedanya, (1) generalisasi dalam sejarah biasanya secara eksplisit atau implisit menyebut keterangan waktu; (2) generalisasi dalam ilmu-ilmu sosial menunjukkan hubungan konsep-konsep yang benar-benar “umum”. Sedangkan sejarah meskipun kelihatannya umum, namun secara eksplisit maupun implisit mengandung “kekhususan”. Artinya masih menunjukkan pada peristiwa-peristiwa khusus, tempat-tempat tertentu, serta waktu-waktu lampau tertentu (Syamsuddin, 2007).

Generalisasi adalah pekerjaan penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Generalisasi yang tersedia dapat menjadi dasar penelitian bila sifatnya sederhana, sudah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya, dan merupakan *accepted history*. Generalisasi itu dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan sementara. Biasanya itu hanya berupa generalisasi konseptual. Meskipun demikian, pemakaian generalisasi yang bagaimanapun sederhananya harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris.

Generalisasi sejarah yang sebenarnya adalah hasil penelitian. Kata “revolusi” yang merupakan penyimpulan dari data yang ada memang dapat menjadi dasar penelitian, sementara “revolusi pemuda” adalah kesimpulan yang didapatkan sebagai hasil penelitian. Akan tetapi sejarah adalah ilmu yang menekankan keunikan, jadi semua penelitian tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi umum. Generalisasi atau simpulan memang sangat perlu dalam sejarah, sebab sejarah adalah ilmu. Orang yang tak melakukan generalisasi tidak akan bisa membedakan “pohon dengan hutan”. Juga ia tidak bisa membedakan hutan dan tanaman. Sebab keduanya mempunyai unsur yang sama, yaitu pohon, danau, dan gundukan tanah.

Demikian pula ia tidak akan mengerti lalu lintas. Yang dilihatnya hanyalah lampu hijau-kuning-merah, polisi, mobil, dan jalan raya. Generalisasi sejarah dapat berarti spesifikasi atau bahkan anti-generalisasi bagi ilmu lain. Generalisasi bertujuan 2 hal yaitu: (1) saintifikasi dan (2) simplifikasi (Kuntowidjoyo, 1997).

Saintifikasi berasumsi bahwa semua ilmu menarik kesimpulan umum. Keajegan menjadi tumpuan dalam generalisasi. Kalau kita akan memberi warna pada tembok kita perlu tahu kita butuh beberapa kaleng cat. Dari perhitungan luas tembok dan beberapa meter dapat dicat oleh setiap kaleng, kita akan dapat meramalkan dengan penuh kepastian, kita memerlukan beberapa kaleng. Ramalan itu dalam ilmu sosial, termasuk sejarah, tidak dengan penuh kepastian, hanya berupa kemungkinan. Dalam sejarah generalisasi sama dengan teori bagi ilmu lain. Dalam ilmu antropologi kita kenal teori evolusi. Dalam sejarah kita mengenal generalisasi tentang perkembangan sebuah masyarakat. Kalau orang menggunakan istilah teori untuk sejarah, maka yang dimaksud adalah generalisasi.

Generalisasi sejarah sering dipakai untuk mengecek teori yang lebih luas. Teori di tingkat makro seringkali berbeda dengan generalisasi sejarah di tingkat mikro. Misalnya, bagi marxisme semua revolusi adalah perjuangan kelas. Mula-mula tesis ini dipakai untuk menganalisis Revolusi Perancis, kemudian dipakai juga untuk semua revolusi, termasuk yang terjadi di Amerika Latin (Skopel, Theda, 1991).

Khusus mengenai Revolusi Perancis, mereka berpendapat bahwa evolusi itu adalah perjuangan kelas borjuis dan petani melawan kaum feodal. Dari penelitian sejarah ternyata generalisasi itu tidak benar. Ada petani di suatu daerah yang berbuat sebaliknya. Banyak petani yang takut pada kaum borjuis

dan lebih senang bersama kaum bangsawan. Pertanyaan kita ialah kalau sebuah generalisasi tidak berhasil menghadapi ujian sejarah, dan banyak perkecualiannya, apakah itu masih sah sebagai generalisasi?. Demikian juga halnya dengan revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia bukanlah perjuangan kelas, tetapi digerakkan oleh cita-cita nasionalisme. Kesalahan generalisasi serupa juga dibuat PKI menjelang kudeta 1965. Mereka tidak melihat bahwa petani sepanjang abad lebih mudah digerakkan oleh faktor budaya daripada faktor ekonomi. PKI rupanya lebih percaya pada ideology dari pada generalisasi sejarah (Kuntowidjoyo, 1997).

Simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengkajian sejarah. Kita dapat mengenang gerakan rakyat dalam peristiwa daerah di Pekalongan, Tegal dan Brebes pada pasca revolusi. Anton Lucas (1989) sejarawan Australia telah menyederhanakan peristiwa itu dengan menyebutnya “bambu runcing menembus payung”. Demikian juga peristiwa Cumbok dapat disederhanakan dalam “pertentangan antara uleebalang dengan ulama”. Revolusi Sosial di Sumatera Timur yang banyak memakan korban tak bersalah, seperti Amir Hamzah, sering disederhanakan dengan “rakyat melawan bangsawan”. Demikian juga bangsa-bangsa yang baru merdeka di Asia dan di Afrika setelah Perang Dunia II menghadapi berbagai macam masalah politik, sosial, dan ekonomi. Demikian juga: Seluruh transisi dari tradisionalisme ke modernisasi ditandai oleh perlawanan-perlawanan sosial yang serupa dengan pemberontakan di Banten tahun 1888 (Kartodirdjo, 1984).

Simplifikasi diperlukan supaya sejarawan dapat melakukan analisis. Demikianlah Madura dapat disederhanakan sebagai daerah dengan ekologi tegal yang selalu mengalami kelangkaan sumber. Penyederhanaan yang ditentukan lewat pembacaan itu akan menuntun sejarawan dalam mencari data, melakukan kritik sumber, interpretasi dan penulisan. Ada memang metode penelitian sosial yang menganjurkan supaya orang datang ke lapangan dengan kepala kosong. Anjuran itu paling tepat bagi sejarawan. Akan tetapi cepat atau lambat orang harus melakukan penyederhanaan supaya ia dapat merealisasikan sesuatu (Kuntowidjoyo, 1997).

6.4.2 Periodisasi

Periodisasi merupakan hal yang penting dalam sejarah. Dengan periodisasi, sejarawan dapat lebih memfokuskan dirinya pada penelitian dalam suatu pembabakan sejarah. Hasil penelitiannya juga akan lebih sempurna. Kesempurnaan ini akan semakin lengkap jika hasil penelitian sejarah itu

disajikan secara kronologis di mana urutan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah itu dapat dilihat dengan baik (Gottschalk, 2006). Periodisasi merupakan pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabakan tertentu. Dalam membuat periodisasi, para sejarawan pasti membuat kesimpulan umum mengenai sebuah periode.

Contoh periodisasi dalam sejarah terlihat dalam pembagian sejarah perkembangan budaya manusia oleh para ahli atas dua periode besar berikut:

1. Zaman prasejarah, yakni zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Babakan ini dimulai sejak adanya manusia hingga ditemukannya peninggalan-peninggalan tertulis.
2. Zaman sejarah, yakni zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Babakan ini dimulai sejak manusia mengenal tulisan hingga sekarang.

Periodisasi dalam penulisan sejarah tergantung pada jenis penulisan sejarah yang akan dilakukan (Kartodirdjo, 2019). Periodisasi dapat dilakukan berdasarkan perkembangan politik, sosial ekonomi, kebudayaan, dan agama. Berdasarkan perkembangan politik, periodisasi dapat dilakukan berdasarkan raja-raja yang memerintah di suatu daerah, seperti kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan perkembangan ekonomi, periodisasi dapat dilakukan dengan pembagian sejarah berdasarkan sistem mata pencarian masyarakat. Misalnya, masa berburu dan hidup berpindah-pindah yang diikuti dengan masa bercocok tanam dan hidup menetap. Berdasarkan perkembangan kebudayaan, periodisasi dilakukan dengan mengelompokkan masyarakat dari kebudayaan yang terendah dengan teknologi yang sederhana sampai masyarakat dengan kebudayaan yang sudah tinggi dengan teknologi canggih.

6.4.3 Kronologi

Istilah kronologi dipahami sebagai urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Kronologi sendiri merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu *chronos* dan *logos*. *Chronos* berarti waktu dan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002) menuliskan bahwa kronologi dipahami sebagai ilmu pengukuran berdasarkan satuan waktu dan urutan-urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa tertentu.

Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan bantuan konsep kronologi, kita juga dapat melihat kaitan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di belahan bumi yang satu dengan peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Kronologi merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi ilmu sejarah karena konsep ini menggambarkan proses sejarah (Gottschalk, 2006).

Sebuah kronologi dapat disusun berdasarkan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Misalnya, hari terjadinya atau tahun terjadinya. Catatan tentang tahun terjadinya suatu rentetan peristiwa sejarah biasa disebut kronik. Salah satu cara yang baik dalam menunjukkan tatanan kronologis di mana peristiwa-peristiwa terjadi adalah penggunaan garis waktu. Suatu garis waktu dapat menunjukkan peristiwa-peristiwa dalam suatu hari atau seluruh abad. Hal ini tergantung pada skala garis tersebut. Dalam menentukan skala garis waktu itu, sejarawan sering harus membagi waktu dalam banyak cara. Kadang-kadang, mereka menggunakan periode waktu yang panjang. Misalnya, mara Orde Baru adalah sebutan yang diberikan untuk suatu periode pada akhir abad ke-20 di Indonesia. Periode tersebut merupakan masa pemerintahan rezim Soeharto yang berkuasa antara tahun 1966 – 1998.

Dalam mengurutkan berbagai peristiwa sejarah secara kronologis, sejarawan menggunakan urutan waktu. Ada berbagai macam ukuran waktu atau sistem penanggalan. Ada penanggalan Kristiani dan ada penanggalan Islam. Penanggalan Kristiani berawal dari penanggalan Romawi Kuno. Penanggalan ini diganti oleh Penanggalan Julian. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penanggalan Julian kemudian diperbaiki dalam penanggalan Gregorian yang diajukan oleh Paus Gregorius XIII. Penanggalan inilah yang banyak digunakan orang saat ini. dalam penanggalan Kristiani, kita menyebut tahun-tahun sebelum Yesus dilahirkan dengan istilah BC (Before Christ [sebelum Kristus]). Misalnya 1901 BC. Tahun pertama kalender Kristiani adalah tahun ketika Yesus lahir. Untuk menunjukkan pada tahun-tahun sesudah Kristus lahir, digunakan istilah AD (Anno Domini) dalam bahasa latin yang berarti tahun “Tuhan Kita”. Misalnya, abad ke-20 AD.

Penanggalan Islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW. melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah sekitar tahun 622 AD. Jadi, tahun 622 AD merupakan tahun pertama dalam penanggalan Islam atau 1 Hijriah. Penanggalan Islam banyak digunakan di Asia Barat dan masyarakat di negara-negara muslim di dunia. Selain itu, penanggalan ini banyak digunakan di negara-negara Islam di luar wilayah itu bersamaan dengan penanggalan Kristiani.

6.5 Kegunaan Sejarah

Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Adalah suatu realita bahwa sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan di sepanjang waktu, merupakan bukti bahwa sejarah itu perlu (Kuntowijoyo, 1997). Pada saat kita mempelajari sejarah, kita juga mempelajari kebudayaan dan prestasi yang berhasil dicapai para leluhur masyarakat di berbagai belahan dunia. Melalui sejarah, kita diajak untuk memahami, menghargai, serta menghormati kebudayaan dan prestasi orang lain. Melalui sejarah, manusia tidak hanya mengagumi sejarah bangsanya sendiri, tetapi juga sejarah bangsa lain.

Mempelajari sejarah berarti belajar memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan. Belajar sejarah juga berarti merasakan dan menghayati semangat zaman (*zeit geist*) yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah dimasa lalu. Kesadaran akan masa lalu dapat menjadi pedoman dalam melangkah di masa depan. Dengan mempelajari sejarah niscaya kita akan mampu memahami, menilai dan mengambil keputusan secara lebih cermat dan bijaksana. Oleh karena itu, kegunaan sejarah dapat dilihat secara intrinsik maupun ekstrinsik (Kuntowijoyo, 1997).

6.5.1 Guna sejarah secara Intrinsik

Menurut Kuntowijoyo, secara intrinsik, ada empat guna sejarah yaitu:

1. sejarah sebagai ilmu
2. sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau
3. sebagai pernyataan pendapat
4. sebagai profesi.

Sebagai ilmu, sejarah adalah ilmu yang terbuka dan berkembang baik dari sudut teori maupun metodenya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sejarah selalu responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Perkembangan teori terlihat dalam pencanangan perlunya nasionalisme dalam penulisan sejarah pada Seminar Sejarah Nasional I di Yogyakarta. Setelah pencanangan tersebut ada pergantian “sejarah dari geladak kapal” ke sejarah yang indosentrisme (Kartodirdjo, 2000). Perkembangan dalam metode sejarah masa ini terlihat ketika dalam sejarah muncul metode kuantitatif. Keterbukaan sejarah terlihat dari penggunaan bahasa sehari-hari dalam penulisan sejarah dan dari kesempatan yang diberikan kepada siapapun untuk menjadi sejarawan, asalkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu.

Ilmu sejarah sangat dibutuhkan dalam upaya menjelaskan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Ilmu sejarah akan membantu kita memahami berbagai peristiwa sepanjang masa. Dalam konteks ini, ilmu sejarah memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, arti penting ilmu sejarah dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tiang pegangan untuk melangkah ke masa depan. Dengan mempelajari sejarah, kita akan dapat memahami apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang harus kita lakukan di masa kini, dan apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Dengan demikian, arti penting sejarah adalah sebagai kompas penunjuk arah kemajuan suatu masyarakat.

Dengan mengetahui keadaan pada masa lampau, orang dapat mengetahui dua sikap. Pertama, orang akan melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna. Misalnya, untuk kepentingan politik dan pariwisata, beberapa daerah menghidupkan kembali upacara-upacara lama, seperti upacara sekaten. Kedua, orang akan menolaknya karena menganggap peninggalan masa lampau tidak diperlukan lagi. Misalnya, sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 ada daerah yang berusaha menolak kehadiran kerajaan dalam usaha konsolidasi politik.

Sejarah juga berguna untuk menyatakan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Pendapat yang dibuat oleh para penulis sejarah umumnya ditujukan untuk memberikan masukan bagi segenap elemen bangsa agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Pendapat tersebut berisi usulan-usulan untuk mengupayakan terciptanya kemajuan bangsa di masa mendatang.

Sejarah juga dapat berguna sebagai profesi. Ada banyak profesi yang berkaitan dengan sejarah. Diantaranya adalah guru sejarah, pegawai sejarah, peneliti sejarah dan penulis sejarah. Guru sejarah selalu berhubungan dengan pelajar dalam pengajaran sejarah. Pegawai sejarah mencakup pegawai purbakala, pegawai museum dan monumen, serta pegawai balai-balai kajian sejarah dan pegawai arsip. Tugas kesejarahan mereka adalah untuk menanamkan kesadaran sejarah di tengah-tengah masyarakat. Peneliti sejarah dan penulis sejarah dihasilkan melalui penelitian di berbagai perguruan tinggi. Namun tidak jarang, jenis profesi lain, misalnya wartawan dan sastrawan juga mempunyai bakat dan kemampuan untuk menjadi peneliti dan penulis sejarah (Kuntowijoyo, 1997).

6.5.2 Guna Sejarah sebagai Ekstrinsik

Secara ekstrinsik, sejarah dapat memberikan sumbangan bagi berbagai aspek pendidikan di luar kepentingan keilmuan sejarah. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan dan ilmu bantu (Kuntowijoyo, 1997).

Peran pendidikan moral sejarah dapat dilihat dari berbagai peristiwa sejarah yang dikandungnya. Berbagai peristiwa sejarah, menunjukkan banyak contoh tindakan dan sikap moral yang dapat diteladani atau yang harus dihindari. Dalam peristiwa pergerakan nasional, rakyat desa membantu para serdadu Indonesia, berupa menyumbangkan beras, bahan makanan lainnya menyokong kehidupan tentara yang berperang di medan jagan, ini merupakan tindakan yang benar dan patut dicontoh. Pada sisi lain ada juga diantar tindakan yang buruk yang tidak pantas ditiru, yaitu adanya mata-mata musuh diantara penduduk bangsa sendiri, yang memberikan informasi kepada pihak musuh tentang keberadaan bangsa sendiri.

Peristiwa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1950, diperlihatkan bahwa rakyat di desa ternyata tetap dermawan walaupun kehidupan beitu sulit dibawah tekanan pihak asing. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan perbuatan yang berani dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 17-8-1945. Para pemimpin rakyat yang dicatat dalam sejarah, seperti perintis kemerdekaan (Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Ki Hajar Dewantara, Bung Tomo, dll) dan para prajurit lainnya adalah exemplary center (pusat rujukan) dalam dunia pendidikan. Maka dapat dikatakan bahwa sejarah adalah guru yang paling baik.

Penalaran merupakan daya pikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa sejarah. Dengan demikian bahwa peranan sejarah sebagai pendidikan penalaran dapat dilihat melalui hubungan sebab akibat yang dikandung dalam setiap peristiwa sejarah. Hubungan sebab akibat ini mengantar orang yang mempelajari sejarah untuk tidak berpikir monokausal (pikiran yang menyatakan bahwa suatu peristiwa terjadi karena satu alasan). Cara berpikir monokausal menafikan kesadaran manusia dan membuat manusia berpikir sempit. Sejarah harus membuat orang berpikir plurikausal, yaitu beranggapan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh banyak hal. Dengan berpikiran seperti itu, segala sesuatu akan dilihat secara multidimensional (Kuntowijoyo, 1997).

Peran sejarah sebagai pendidikan politik adalah untuk membangun kesadaran warganya dalam berbangsa dan bernegara secara tertib. Pemerintah memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk warga negaranya dalam rangka sejarah bangsanya. Dalam hal ini tentu perlu ditanamkan pendidikan mengenai sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah sebagai pendidikan kebijakan diperlukan oleh semua lembaga penelitian. Untuk menentukan suatu kebijakan diperlukan pandangan tentang lingkungan alam, masyarakat, dan sejarah. Misalnya, kebijakan perpajakan diambil dengan lebih dahulu mengetahui sejarah ekonomi bangsa itu, khususnya kebijakan fiskal di masa sebelumnya, seperti bagaimana pajak ditarik pada masa indonesianisasi atas usaha-usaha asing. Kalau keadaan serupa terjadi masa kini bagaimana kebijakan pajak akan dikerjakan? Akhir-akhir ini di Sumatera Utara ada upaya pemekaran Provinsi menjadi dua yaitu: Sumatera Utara dan Tapanuli. Tentunya bagaimana dapat melakukan kebijakan tersebut tanpa mengetahui sejarah perkembangan Sumatera bagian Utara, di mana pada sebelum kemerdekaan bahwa Tapanuli pernah dibuat menjadi sebuah Keresidenan Tapanuli yang ibukotanya Sibolga; sementara ada juga Residensi Sumatera Timur yang wilayahnya kawasan tanah Melayu dan berpantai ke Selat Malaka. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan Kolonial.

Peran sejarah sebagai pendidikan perubahan diperlukan oleh politisi, ormas-ormas, usaha-usaha dan pribadi-pribadi. Dengan mempelajari sejarah, kelompok politisi dapat mengantisipasi gelagat perubahan. Sebagai rekonstruksi masa lalu, sejarah tidak hanya membangun masa lalu itu untuk kepentingan masa lalu saja. Sejarah sebagai kisah nyata pengalaman hidup manusia yang unik dapat digunakan untuk memprediksi dan mengantisipasi kejadian berikutnya yang memiliki kecenderungan yang sama dengan pengalaman tersebut. Pengantisipasi perubahan tidak hanya penting bagi

politisi, tetapi juga bagi ormas. Mereka perlu mengenalkan kepada anggotanya tentang pentingnya pengelolaan perubahan untuk menghindari konservatisme atau radikalisme yang dapat merusak organisasi. Hal yang sama juga berlaku bagi pribadi-pribadi. Autobiografi dan biografi yang banyak bercerita tentang perubahan akan memberi inspirasi untuk melangkah.

Sejarah negara-negara yang sudah maju seperti Amerika dan Jepang yang sudah lama menjadi negara industri perlu dipelajari oleh negara-negara yang sedang melakukan industrialisasi. Hal itu, perlu ditempuh agar di masa depan mereka dapat menghindari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara industri tersebut sebelumnya. Dengan mempelajari sejarah negara-negara yang lebih maju, suatu bangsa dapat merancang masa depannya.

Ketika seseorang pergi ke candi dan menemukan lukisan di dinding candi, dia dapat membayangkan keindahan yang ada pada saat lukisan itu dibuat. Ketika kita membaca sejarah kota-kota kuno di Eropa, seperti di Yunani dan Mesir kita dapat merasakan keindahan kota tersebut. Dengan mempelajari sejarah, dampak-dampak dari peristiwa-peristiwa politis yang terjadi dapat dianalisis. Dengan mempelajari sejarah arsitektur, dapat direncanakan model-model arsitektur yang tepat dengan kondisi lingkungan dan zamannya. Dengan mempelajari sejarah kedokteran, misalnya kita dapat mengetahui cara menanggulangi epidemi di masa lalu. Dengan mempelajari sejarah perencanaan kota, kita dapat menyusun perencanaan kota yang tepat sehingga masalah yang terjadi di masa sebelumnya tidak terulang kembali.

6.6 Metode Penelitian Sejarah

Setiap ilmu memiliki metode. Dalam melakukan penelitian sejarah juga menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2006). Metode penelitian sejarah merupakan instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, menjadi sejarah sebagai kisah.

Dalam ruang lingkup ilmu sejarah metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah menggunakan prosedur dengan mengajukan 6 (enam) pertanyaan yang merupakan elemen dasar. Pertanyaan tersebut adalah:

1. Apa (What), peristiwa apa yang terjadi;
2. Kapan (When), kapan terjadinya;
3. Di mana (Where), di mana terjadinya;
4. Siapa (Who), siapa yang terlibat dalam peristiwa itu;
5. Mengapa (Why), mengapa peristiwa itu terjadi;
6. Bagaimana (how), bagaimana proses terjadinya peristiwa itu (Sulasman, 2014; juga Gottschalk, 2006).

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang tergolong metode historis, yaitu penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah melalui tahapan tertentu. Penerapan metode historis menempuh 4 tahapan kerja yaitu:

1. Heuristik, yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau
2. Kritik sejarah, yaitu menyelidiki apakah jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya
3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu
4. Penyajian, yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah kisah (Notosusanto, 1984).

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* artinya: *to find*. *To find* berarti tidak hanya “menemukan”, tetapi “mencari dahulu baru menemukan”. Kalau dalam bahasa Indonesia, menemukan itu hanyalah: “nah ini saya menemukan”. Tetapi kalau *to find* artinya ialah mencari dahulu baru menemukan; itulah arti heuristik. Heuristic adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber. Dalam hal ini yang dikumpulkan dan ditemukan itu adalah sumber sejarah, yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Misalnya saja kalau yang ditulis itu adalah sejarah sebuah kerajaan di Simalungun. Kerajaan tersebut lenyap pada tahun 1945, sebagai akibat dari berdirinya NKRI proklamasi 17 Agustus 1945. Maka sumber yang dikumpulkan menurut bahannya ada dua yaitu: (1) sumber tertulis, dan (2) sumber tidak tertulis atau dokumen dan artifact.

Setelah sumber sejarah yang diperlukan ditemukan, maka sumber tersebut diuji dengan kritik. Kritik ini ada 2 jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini menyangkut dokumen-dokumennya. Kalau ada dokumen, misalnya, kita teliti apakah dokumen itu memang yang kita kehendaki atau tidak, apakah palsu atau sejati, apakah utuh atautkah sudah diubah sebagian-

sebagian. Kalau kita sudah puas mengenai satu dokumen, artinya kita sudah yakin bahwa memang dokumen itulah yang kita kehendaki, baru kita menilai isinya, dan menilai isinya ini dilakukan kritik intern.

Tujuan kritik seluruhnya ialah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Di kalangan masyarakat luas, biasanya data dan fakta dicampur adukkan. Tetapi sesungguhnya ada bendanya. Data ialah semua bahan, fakta ialah bahan yang sudah lulus diuji dengan kritik. Itu baru fakta. Jadi fakta itu sudah terkoreksi. Setelah kita memperoleh sejumlah fakta yang cukup, maka kita harus melakukan usaha merangkaikan fakta-fakta itu menjadi sesuatu keseluruhan yang masuk akal (Notosusanto, 1984).

Tahap interpretasi adalah merupakan tahap penafsiran. Tahap ini terdiri dari interpretasi monoistik dan interpretasi pluralis. Selain itu menurut Garraghan ada juga interpretasi verbal, interpretasi verbal, interpretasi teknis, interpretasi logis, interpretasi psikologis, dan interpretasi faktual (Sulasman, 2014).

Tahapan historiografi merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis / diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Keduanya harus benar-benar tampak, karena merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.

6.7 Sejarah dan Ilmu Sosial

Kedudukan sejarah dan ilmu-ilmu sosial (bahasa, geografi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi) adalah saling memerlukan dan saling memberikan kontribusi. Dalam hal ini, penelitian dan penulisan sejarah senantiasa memerlukan bahasa sebagai sarana primer untuk mengungkapkan data, analisis, dan kesimpulan yang terkait dengan seluruh aspek yang terkait dengan manusia dan waktunya.

Sejarah dan ilmu sosial memiliki hubungan yang timbal balik. Karena pada dasarnya sejarah adalah bagian dari ilmu sosial. Sejarah dan ilmu sosial mempunyai ikatan yang tidak terpisahkan. Sejarah pada dasarnya ialah ilmu diakronik, yaitu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Ilmu sosial adalah ilmu yang sinkronik, yaitu menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Sehingga ketika sejarah dan ilmu sosial bersentuhan, maka sejarah akan menjadi ilmu yang diakronis sekaligus sinkronis, yaitu melebar dalam waktu, melebar pula dalam ruang. Dengan demikian, sejarah dapat

menjadi ilmu yang mampu mencangkup segalanya. Oleh karena itu seorang sejarawan harus bisa berpikir ganda, baik diakronis maupun sinkronis (Kuntowijoyo 2003).

Di Indonesia penganjur pertama pendekatan timbal balik antara ilmu sejarah dan ilmu sosial adalah Sartono Kartodirjo. Perkuliahan yang disampaikan beliau kepada para mahasiswa di Universitas Gajah Mada sejak 1967, kemudian buku yang ditulisnya sebagai editor yang berjudul *Sejarah Nasional Indonesia* (6 jilid pada 1970), serta karya penelitiannya yang berjudul *Peasant's Revolt Of Banten in 1888* (1966) dan *Protest Movement in Rural Java* (1973) menunjukkan kedekatan sejarah dan ilmu sosial.

Hubungan Sejarah dengan Sosiologi, Gejala sosial sangatlah wajar dan relevan untuk dipelajari dengan pendekatan sosiologis. Misalnya saja perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan tema yang cukup luas cakupannya. Perubahan sosial secara intern juga mencakup transformasi struktur pada sistem produksi, sistem sosial, dan politik. Analitis historis yang memakai perspektif struktural hanya bisa dijelaskan dengan pertolongan ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya. Selain itu sejarah analitis dan sejarah struktural hanya dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis pada khususnya dan ilmu sosial pada umumnya.

Dengan perkembangan jenis-jenis sejarah tersebut terbuka kesempatan luas munculnya perspektif dan paradigma sejarah baru, seperti: sejarah politik gaya baru, sejarah sosial, sejarah sosiologi, sosiologi sejarah, sejarah agraris. Sejarah sosiologi menunjuk pada sejarah yang disusun dengan pendekatan sosiologi, yang dilakukan oleh seorang sejarawan, sedangkan sosiologi sejarah adalah studi sosiologi mengenai suatu kejadian atau gejala di masa lampau, yang dilakukan oleh sosiolog. Hasil dari keduanya mungkin tidak banyak berbeda. Dalam perkembangannya sampai sekarang rupanya lebih banyak karya sosiologi sejarah.

Penggarapan sejarah oleh seorang sosiolog didasarkan atas bahan-bahan sejarah yang diperoleh oleh sejarawan. Sosiolog tidak dapat melakukan kritik sumber. Pendekatan sosiologi dapat saja dilakukan oleh sejarawan yang telah menguasai konsep dan teori tentang sosiologi. Pada sejarawan masih ada kewajiban melakukan kritik sumber yang pengkajiannya menuntut hal itu.

Hubungan Sejarah dengan Antropologi. Hubungan antara sejarah dan antropologi dilihat karena keduanya mempunyai persamaan yang menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek dalam kajiannya. Di

samping terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, bila sejarah membatasi pada penggambaran suatu peristiwa sebagai proses di masa lampau dalam bentuk cerita einmalig (sekali terjadi), hal ini tidak termasuk bidang kajian antropologi, namun jika suatu penggambaran sejarah menampilkan masyarakat di masa lampau dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, religi, dan keseniannya. Maka gambaran tersebut mencakup unsur-unsur kebudayaan masyarakat, dalam hal ini ada persamaan bahkan tumpang tindih antara sejarah dan antropologi (Kartodjirjo, 2019).

Dalam studi antropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur sosial berupa lembaga-lembaga, pranata, dan sistem-sistem, yang semuanya itu akan dapat dijelaskan lebih rinci apabila diungkapkan bahwa struktur itu adalah hasil dari suatu perkembangan di masa lampau. Karena antropologi juga mempelajari objek yang sama, yaitu tiga jenis fakta yang terdiri atas artifact, sociofact, dan mentifact, di mana semua itu adalah produk historis dan hanya dapat dijelaskan dengan melacak sejarah perkembangannya.

Fakta adalah petunjuk suatu kejadian. Sebagai suatu konstruk maka fakta adalah hasil strukturasi oleh seorang sejarawan (Kartodjirjo, 2019). Begitu pun artifact sebagai benda fisik adalah konkret dan merupakan hasil buatan. Artifact menunjukkan kepada proses pembuatan yang telah terjadi di masa lampau. Sebagai analoginya, sociofact yang menunjuk kepada kejadian sosial (interaksi antara aktor dan proses aktivitas kolektif) yang telah mengkristalisasi sebagai pranata, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa untuk memahami struktur dan karakteristik sociofact perlu dilacak asal usulnya, proses pertumbuhannya, sampai wujud sekarang. Segala sesuatu dan keadaan yang kita hadapi dewasa ini tidak lain adalah hasil dari perkembangan masa lampau jadi produk sejarahnya (Kartodjirjo, 2019).

Hubungan Sejarah dengan Psikologi sosial. Dalam cerita sejarah, pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi, minat, konsep diri dan sebagainya yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan sebagainya.

Begitu pula dalam pelaku yang bersifat kelompok menunjuk sifat kolektif, yaitu gejala yang menjadi objek khusus psikologi sosial. Dalam peristiwa sejarah, perilaku kolektif sangat mencolok, antara lain sewaktu ada huru hara,

gerakan sosial, protes yang revolusioner, semuanya menuntut penjelasan berdasarkan psikologi dari motivasi, sikap, dan tindakan kolektif. Dalam hal tersebut psikologi berperan untuk mengungkap beberapa faktor tersembunyi sebagai bagian proses mental (Kartodjirjo 2019).

Manusia yang telah mengalami proses sosialisasi sudah barang tentu membangun pada dirinya suatu struktur perwatakan yang terdiri atas unsur-unsur mental yang berasal dari proses internalisasi pelbagai norma dan nilai sosial, sehingga akhirnya mengendap atau mengkristalisasi sebagai struktur kepribadian. Salah satu dimensi dari struktur kepribadian itu adalah citra yang ditandai oleh sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Tipologi psikologis sering menonjolkan sifat tertentu, seperti sifat melankolis (serba kesedih-sedihan), sanguinis (serba bergairah), plegmatis (serba tidak acuh), koleris (suka marah). Dalam masyarakat tradisional, sewaktu belum banyak transportasi dan komunikasi, satu komunitas masih terisolasi dari yang lain; maka mudah timbul watak kolektif tertentu yang khusus dan yang memberi ciri atau identitas tertentu. Maka dari itu, pada komunitas itu terdapat mentalitas khusus, ada kesamaan kepribadian pada para anggotanya. Mentalitas tersebut ada pada komunitas lokal, kelompok sosial, golongan kepercayaan tertentu, kesatuan etnik, religious, atau politik tertentu (Kartodirdjo, 2019).

Hubungan Sejarah dengan Ilmu Politik. Sejarah adalah identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya memperoleh apa, siapa, kapan, dan bagaimana (Kartodirdjo 2019). Sampai sekarang pun sejarah politik masih menonjol, walaupun tidak terlalu dominan seperti masa lampau. Pengaruh politik dan ilmu-ilmu sosial sangat besar dalam penulisan sejarah politik atau disebut sejarah politik gaya baru.

Apabila politik didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan maka faktor sosial, ekonomi, dan kultural, akan menjadi variabel pengaruh dalam sejarah. Barang siapa yang mempunyai status atau menduduki posisi tinggi maka ia dapat mempunyai kesempatan untuk memperoleh kekuasaan tertentu, dan lebih mudah mengambil peranan sebagai pemimpin. Berdasarkan relasinya, ada sumber daya ekonomi untuk melakukan peranan politiknya, artinya menyebarkan pengaruhnya. Kalau dapat dibenarkan status sering membawa kekayaan, namun tidak selalu benar kekayaan dapat membawa status dan kekuasaan (Kartodjirjo 2019).

Dalam distribusi kekuasaan, faktor budaya juga merupakan penentu, sebab jenis otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai pandangan hidup para pelaku. Kerangka konseptual ilmu politik menyediakan banyak alat analisis untuk menguraikan berbagai unsur politik, aspek politik, kelakuan pelaku, nilai-nilai yang melembaga sebagai sistem politik dan lain sebagainya (Kartodirjo 2019).

Hubungan Sejarah dengan Ilmu Ekonomi. Mulai abad 20 sejarah ekonomi dalam berbagai aspeknya semakin menonjol, apalagi setelah proses modernisasi, di mana hampir setiap bangsa di dunia lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Terutama proses industrialisasi beserta transformasi sosialnya menuntut kajian ekonomi dari sistem agraris menuju ke sistem industrial yang dimulai dari negara-negara Eropa, terus menyebar ke belahan dunia Asia, Afrika, Amerika dan Australia semuanya tidak luput (Kartodirjo, 1993).

Terbentuknya jaringan transportasi, perdagangan, jaringan daerah industri dan bahan mentah menyebabkan munculnya sistem ekonomi global. Globalisasi ekonomi semakin melanda dunia, dan negara-negara di dunia semakin ketergantungan satu dengan yang lain. negara Industri membutuhkan bahan baku, daerah pemasaran hasil industri. Sistem ini mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam, tidak hanya di bidang ekonomi melainkan juga bidang politik. Untuk menguasai perdagangan global membutuhkan hubungan dengan penguasa lokal, hal ini sudah melibatkan politik dan terjadi pertumbuhan kapitalisme. Dengan adanya ekspansi politik yang mendukungnya maka timbulah the scramble for colonies, perebutan jajahan atau imperialisme (Kartodirjo, 2019).

Kompleksitasnya sistem ekonomi membutuhkan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik dll. Untuk mengkaji fenomena ekonomis di negeri yang sedang berkembang perlu pula dipergunakan ilmu bantu seperti antropologi ekonomi. Dalam pendekatannya, sistem ekonomi berangkat dari pola produksi, distribusi dan konsumsi yang sering ditentukan oleh sistem sosial dan stratifikasinya. Akhirnya, kesemuanya dipengaruhi oleh faktor budaya, selanjutnya dalam perkembangannya sejarah ekonomi mengalami pula diferensiasi dan subspecialisasi, antara lain:

1. Sejarah pertanian
2. Sejarah perkotaan
3. Sejarah formasi kapital

4. Sejarah bisnis
5. Sejarah perbudakan.

Hubungan Sejarah dengan Geografi. Setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang), kedua-duanya merupakan faktor yang membatasi gejala sejarah tertentu sebagai unit (kesatuan), apakah itu perang, riwayat hidup, kerajaan dan sebagainya. Pertanyaan tentang di mana sesuatu terjadi sudah barang tentu menunjukkan kepada dimensi geografis, yaitu apabila yang dikaji adalah proses sejarah nasional (Kartodirjo, 2019).

Mengenai kedekatan ilmu geografi dan sejarah tersebut, ibarat sekutu lama sejak zaman Herodotus di mana beliau ini disebut sebagai geografiwan dan sejarawan dari Yunani Kuno. Herodotus berpendapat bahwa sejarah dan geografi sudah demikian terkait, ibarat terkaitnya pelaku, waktu dan ruang secara terpadu sehingga dapat dikatakan secara kiasan bahwa suatu daerah atau tempat mempunyai karakteristik atau ciri khas karena bekas-bekas peristiwa sejarah yang terjadi di tempat tersebut.

Proses sejarah mengintegrasikan daerah-daerah tertentu sebagai unit budaya atau politik. Pada hakikatnya peta politik menunjukkan bahwa negara-negara nasional adalah unit wilayah yang terbentuk oleh proses sejarah, mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjang adalah merupakan produk historis. Peta geografi budaya mewujudkan mozaik daerah-daerah yang sama kebudayaannya tetapi terpisah satu dari yang lain. Dalam kerangka negara nasional tanah air dan bangsa merupakan identitas negara dan rakyatnya, disebabkan karena tanah air sebagai wilayah negara yang terjadi dalam perkembangan sejarah rakyat tersebut, dengan kata lain, bagaimana proses integrasi sepanjang masa telah berhasil menyatukan sebagai bangsa. Dalam hubungan ini menjadi jelas bahwa proses sejarahlah yang membentuk nation.

Bab 7

Konsep Dasar Dalam Ilmu Politik

7.1 Pendahuluan

Ilmu politik bukanlah sebuah ilmu baru, melainkan sebuah ilmu yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Hal ini bisa dilihat dari beberapa karya para filosof seperti Aristoteles, Plato, Herodotus, dan lainnya yang sudah membahas tentang politik pada masa itu. Ilmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial seperti ekonomi, antropologi, psikologi, sejarah dan lainnya. Ilmu politik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berbicara tentang kehidupan politik dalam bermasyarakat. Ilmu politik membahas tentang banyak aspek dalam mengatur kegiatan masyarakat. Sebab tanpa kita sadari bahwa kehidupan ini selalu berkaitan dengan politik. Oleh karena itulah, ilmu politik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.

Ada beberapa konsep dasar dalam memahami ilmu politik yaitu negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution). Berdasarkan konsep-konsep tersebutlah para ahli mendefinisikan ilmu politik.

7.2 Negara

Berbicara tentang negara muncul di benak kita tentang sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas. Tentang sebuah tempat yang dijadikan untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan dan kebahagiaan. Hal tersebut akhirnya merujuk pada definisi tentang sebuah negara. Negara merupakan organisasi yang ada dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk dipatuhi oleh rakyatnya. Soltau mendefinisikan negara sebagai alat (agency / wewenang (authority) yang berhak mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Miriam Budiardjo, 2007).

Negara adalah institusi yang mandiri, di mana di dalamnya terdapat pejabat-pejabat negara yang memiliki pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan, bukan sekedar didikte/dominasi oleh kelas yang dominan (Miliband, 1965). Negara merupakan sebuah entitas yang boleh memonopoli penggunaan kekuasaan secara sah dan memiliki coercive force. Negara sebagai sebuah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam satu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.

Aristoteles menyebut negara sebagai sebuah kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia (G.S Diponolo, 1975). Menurutnya manusia merupakan makhluk politik dan sudah pada hakikatnya hidup dalam sebuah polis (David E After, 1965). Di dalam polis inilah manusia mendapatkan nilai moral yang tinggi, sebab seluruh kegiatan yang ada dalam masyarakat dibicarakan dan diperdebatkan. Masyarakat akan selalu berhadapan dengan persoalan politik, dan tidak bisa dielakkan. Sehingga tujuan berdirinya sebuah negara yaitu memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and creative self expression of its member)(Rosyada, 2018).

7.2.1 Konsep Negara

1. Negara Individual (Nordlinger, 1994)

Konsep negara individu menurut Nordlinger adalah bila negara dianggap sebagai kumpulan individu yang memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang

mengikat semua orang yang ada dalam satu wilayah. Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat seperti apa dukungan masyarakat terhadap negara, apakah tinggi, moderat atau bahkan rendah. Sehingga Nordlinger menggolongkan empat tipe negara, negara kuat (*strong states*) yang memiliki tingkat otonomi dan dukungan yang tinggi dari masyarakat, negara independen (*independent states*) yaitu negara dengan tingkat otonomi tinggi tetapi dukungan dari masyarakat rendah, negara responsive (*responsive states*) adalah negara dengan tingkat otonomi yang rendah tetapi dukungan dari masyarakatnya tinggi, dan negara lemah (*weak states*) adalah tingkat otonomi dan dukungan masyarakatnya sama-sama rendah.

2. Konsep Negara Lembaga

Negara dianggap sebagai seperangkat organisasi yang meliputi organisasi administratif, kepolisian, militer, yang dipimpin oleh eksekutif termasuk lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat seperti parlemen, parpol dan lembaga yang dibentuk oleh negara.

7.2.2 Sifat-Sifat Negara

Ada tiga sifat yang harus dimiliki oleh negara: (Rosyada, 2018)

1. Bersifat memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara legal agar tercapai ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sebagai pembuat keputusan yang mengikat dan memiliki kewenangan menggunakan paksaan fisik. Misalnya pemerintah membuat peraturan tentang wajib pajak. Sehingga jika ada warga negara yang tidak membayar.
2. Bersifat monopoli, artinya mempunyai hak kuasa dalam menetapkan tujuan bersama.
3. Bersifat adil, artinya peraturan hukum yang telah disepakati agar dijalankan tanpa tumpang tindih serta tidak memihak satu golongan/kelompok.

7.2.3 Unsur-Unsur Negara

Ada beberapa unsur bagi terbentuknya sebuah negara. Unsur-unsur ini merupakan point penting agar bisa diakui sebagai sebuah negara. Unsur tersebut mencakup unsur konstitutif dan deklaratif.

1. Unsur Konstitutif

- a. Wilayah. Sebuah negara akan menduduki sebuah wilayah dan memiliki kekuasaan mencakup udara, laut, darat serta udara. Tidak ada batasan berapa jumlah luas wilayah yang dimiliki, akan tetapi perlu menjadi pertimbangan tentang prinsip the sovereign equality of nations. Semua negara sama martabatnya, akan tetapi seringkali negara dengan luas wilayah kecil sulit untuk mempertahankan kedaulatannya.
- b. Penduduk. Setiap negara wajib memiliki penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat yang menjadi satu kesatuan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki ciri khas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan identitas nasional.
- c. Pemerintahan. Negara merupakan sebuah organisasi dan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat dibutuhkanlah sistem dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa.
- d. Kedaulatan. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam membuat peraturan.

2. Unsur Deklaratif

Pengakuan dari negara lain. Hal ini bukan merupakan hal mutlak syarat berdirinya sebuah negara. Akan tetapi unsur ini hanya menjelaskan tentang keberadaan sebuah negara yang baru berdiri dan unsur ini lebih bersifat politik.

7.2.4 Bentuk Negara

Montesquieu memberikan beberapa pemikiran mengenai bentuk negara berdasarkan hakikat dan prinsip pemerintahan (Suhelmi, Barat and Utama, 2007):

1. Republik, merupakan bentuk negara terbaik, di mana rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan negara. Dalam bentuk negara Republik ini, jumlah penguasa banyak. Hukum dijalankan dengan baik atas nama kebajikan bersama.
2. Monarki, merupakan bentuk negara yang di pimpin oleh aristocrat (bangsawan). Prinsip yang digunakan dalam pemerintahan jenis ini adalah rasa hormat terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Akan tetapi prinsip ini justru menimbulkan diskriminasi antar sesama manusia. Oleh karena itu Montesquieu berpendapat bahwa hak istimewa kaum aristokrat tidak boleh dihapus agar menghindarkan negara dari kerusakan.
3. Despotis, ini merupakan bentuk negara terburuk, karena diperintah oleh satu orang yang mengatur semuanya. Penguasa dalam bentuk negara despotis ini berkuasa mutlak dan tidak memiliki batasan. Bentuk negara ini sama seperti negara Leviathan yang disebutkan Hobbes.

7.3 Kekuasaan

Konsep tentang kekuasaan menjadi salah satu poin yang penting dalam membahas ilmu politik. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, ilmu politik selalu berhubungan dengan pengaruh dan yang berpengaruh atau penggunaan wewenang/ kekuasaan (Jack C Plano, 1985). Kedua, para ilmuwan di zaman Yunani kuno menganggap bahwa kekuasaan adalah unsur utama tindakan politik. Oleh karena itulah Hans Morgenthau mendefinisikan politik sebagai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan (Massoed, 1994). Ketiga, kekuasaan adalah konsep yang paling mendasar dalam ilmu politik (Miriam Budiardjo, 2007). Adapun yang membedakan ilmu politik dengan ilmu lainnya yaitu *the constrained use of social power* (Goodin and Klingemann, 2003) .

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku orang lain

menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan (Freire, 1999). Kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan politik (Robert Dahl, 1974). Kekuasaan terhadap manusia dapat dilakukan melalui pengaruh secara fisik dengan cara memberikan hukuman maupun dengan cara propaganda (Morriss, 2006). Hal ini sejalan dengan konsep kekuasaan dalam pandangan Max Weber yang berisi pemaksaan terhadap orang lain. Artinya kekuasaan mengandung unsur pemaksaan yang harus dipatuhi. Kekuasaan memang seringkali dikaitkan dengan unsur pemaksaan dalam melaksanakannya.

Di dalam ilmu politik ada beberapa bentuk kekuasaan yang dikenal seperti, pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force* dan *authority* (kewenangan). *Coercion* adalah ancaman yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang terhadap pihak lain agar mengikuti keinginan si pemilik kekuasaan. *Force* adalah penggunaan tekanan fisik seperti pembatasan kebebasan, membuat orang lain merasakan sakit sehingga akan mengikuti kehendak pemilik kekuasaan. *Influential* adalah kemampuan memengaruhi orang lain tanpa paksaan, sehingga orang lain mau mengikuti keinginan si pemilik kekuasaan secara sukarela. *Persuasion* adalah kemampuan memengaruhi orang lain melalui argumentasi. Sedangkan *authority* merupakan kemampuan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu atas dasar legitimasi (RITZER, 2007)

7.3.1 Sumber Kekuasaan Politik

1. Ekonomi, kekayaan dalam bentuk materi.
2. Fisik, bisa dalam bentuk wajah yang rupawan.
3. Normatif, tradisi, moralitas, religious, dan wewenang.
4. Personal, kharisma, popularitas, dan daya tarik.
5. Keahlian, ilmu pengetahuan.

Sumber-sumber kekuasaan tersebut menjadi kekuatan bagi yang memilikinya. Melalui sumber yang dimiliki mampu memengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. Sumber kekuasaan tersebut bisa dimiliki oleh siapapun, baik individu maupun kelompok. Bahkan sumber kekuasaan tersebut bisa dimiliki secara bersamaan dengan menggabungkan kepemilikan individu dengan kelompok. Hal ini nantinya justru memperkuat kekuatan untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang diinginkan. Sumber-sumber kekuasaan yang

ada dalam masyarakat biasanya tidak bersifat merata melainkan tersebar. Oleh karena itulah ada rasa saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.

Ada dua konsep penting dalam memahami kekuasaan yaitu *scope of power* dan *domain of power* (Jack H Nagel, 1974). *Scope of power* merupakan kegiatan, perilaku, serta sikap yang menjadi objek kekuasaan. Disini dapat kita lihat bagaimana sikap masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang. Biasanya kekuasaan akan melahirkan peraturan yang harus dipatuhi. Sehingga *scope of power* dapat dinilai dari seberapa besar minat masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut. Sedangkan *domain of power* menunjuk pada pelaku yang terkena dampak kekuasaan. Kedua konsep tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti *domain of power* yang merujuk pada aktor yang merasakan kekuasaan.

7.3.2 Model Distribusi Kekuasaan

1. Model Elit

Dalam model ini kekuasaan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Artinya tidak banyak orang yang bisa memiliki kekuasaan. Kekuasaan terbatas hanya pada orang/kelompok yang termasuk dalam golongan elit. Pendekatan ini berasal dari teori elit yang membagi masyarakat menjadi dua kelas yakni orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Teori inilah yang membidani lahirnya teori oligarki.

2. Model Pluralis

Kekuasaan dalam model ini dimiliki oleh kelompok sosial dalam masyarakat dan juga lembaga pemerintahan.

3. Model Populis

Kekuasaan dipegang oleh rakyat secara kolektif. Masyarakat menjadi motor penggerak dalam setiap kegiatan. Konsep ini sebenarnya berasal dari prinsip demokrasi.

7.4 Kebijakan (policy) & Pengambilan Keputusan (decision making)

Politik selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat (Mithcell, 1969). Pengambilan keputusan juga harus disertai dengan tujuan yang jelas. Dalam setiap pengambilan keputusan, maka harus disertai dengan pilihan alternatif untuk memudahkan kebijakan yang diambil. Pengambilan keputusan (decision making) merupakan proses pembuatan beberapa pilihan alternative (Miriam Budiardjo, 2007).

Akan tetapi sebelum membuat sebuah keputusan, maka proses pengambilan kebijakan merupakan tahap awal. Dalam kajian ilmu politik, kebijakan merupakan aturan yang nantinya akan dipatuhi oleh seluruh masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Kebijakan (policy) merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku politik untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan selalu melibatkan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (policy), dan dalam pembuatan kebijakan harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan.

Dalam membuat sebuah kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

1. Tujuan harus jelas.
2. Perencanaan yang tersusun dengan baik.
3. Keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan kebijakan.
4. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Oleh karena itu sebuah kebijakan yang dibuat sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi bagi yang bersangkutan daripada sebagai sebuah keputusan tersendiri (Richard Rose, 1969) . Hal ini bertujuan agar kebijakan dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan dan bukan sekedar keputusan semata.

7.5 Pembagian (distribution) dan Penempatan (allocation)

Berbicara tentang konsep distribusi dan alokasi dalam ilmu politik kita akan dihadapkan pada penyebaran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai (value) yaitu sesuatu yang dianggap baik, benar dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Nilai-nilai tersebut bisa bersifat abstrak maupun konkret. Nilai yang bersifat abstrak misalnya kejujuran, kebebasan, kepercayaan dan lainnya. Sedangkan nilai yang bersifat konkret seperti rumah, mobil, tanah dan lainnya. Pengalokasian nilai-nilai tersebut sejalan dengan pemikiran Easton tentang teori sistem. Menurutnya sistem politik merupakan keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan pembagian oleh yang berkuasa dari nilai-nilai untuk masyarakat (Apter, 1968).

Politik merupakan perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Konsep pembagian dan alokasi menjadi penting dalam ilmu politik dikarenakan kewajiban pemerintah dalam mendistribusikan nilai-nilai yang bersifat ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Misalnya di bidang ekonomi dapat kita lihat bagaimana cara pemerintah mendistribusikan dan mengalokasikan bahan pangan (sembako), BBM, dan lainnya. Semua ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam konsep sistem politik. Pada dasarnya sistem politik tersebut bersifat terbuka, sehingga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya seperti sistem ekonomi, sistem budaya, politik, sosial dan lainnya. Aristoteles membuat sebuah klasifikasi sistem politik yang terdiri dari dua dimensi, yaitu *who rules and who benefits* (Heywood and Heywood, 1997).

Siapa yang mengatur dan siapa yang diuntungkan. Seringkali dimensi tersebut menjadi kendala dalam pendistribusian nilai-nilai. Sehingga sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Misalnya jika pemerintah tidak bisa mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai tersebut dengan merata maka akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut karena unsur-unsur seperti input, konversi (proses), output, feedback, dan lingkungan yang ada dalam sistem politik tidak berjalan dengan baik.

Bab 8

Sosiologi Hukum

8.1 Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum dan usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan yang baru itu harus mempertahankan diri pada dua kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli Hukum maupun oleh para ahli Sosiologi. L.J. (Van Alpendoorn: 1983).

Sosiologi Hukum tidak pertama-tama hendak mempelajari hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah khusus yang berlaku, itu adalah bagian dari kajian-kajian ilmu hukum yang dikonsepsikan dan dibataskan sebagai Jurisprudence. Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Walaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. (Soetandyo Wignjosebroto: 2002).

Dibalik semua itu, tidak perlu dipertentangkan konsepsi dasar bagaimana Hukum maupun Sosiologi mendeterminasi setiap pemahaman yang berlaku di dalam terminologi masing-masing. Ada kekhawatiran akan muncul segmentasi metodologis yang semakin membuka jarak egosentris kedua disiplin tersebut semakin melebar, ada pemaknaan yang sangat berarti ketika konstruksi pemahaman Sosiologi Hukum dibangun dengan mengakulturasikan hukum pada ranah substansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait.

Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan dideterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termajinalkan tapi sebaliknya mampu menjadi disiplin yang memiliki integritas dan kerangka pikir yang konstruktif serta metodologi yang semakin baik. Sering yang terjadi pada kajian-kajian yang selalu menafsir secara subjektivitas integritas dari Sosiologi Hukum, sebagaimana diikuti Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para ahli Sosiologi terhadap hukum.(Mastur: 2013).

1. Para ahli Sosiologi mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagaimana halnya dengan para yuris. Para Ahli Sosiologi sulit menempatkan diri dalam normatif karena Sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris.
2. Pada umumnya para Ahli Sosiologi dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli hukum; hukum apakah yang mengatur Perpajakan, hukum apakah yang mengatur penanaman modal asing dan lain sebagainya.
3. Para Ahli Sosiologi sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum.
4. Lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Ahli Sosiologi dengan para Ahli Hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Sosiologi Hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada.

Dalam kajian Soerjono Soekanto, suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara Sosiologi dengan Hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para ahli Sosiologi dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu persyaratan mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.

Hal itu menyebabkan ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehingga sulit untuk mengadakan pendekatan yang interdisipliner. Sulitnya komunikasi antara seorang Ahli Sosiologi dengan Ahli Hukum dipertajam dengan kenyataan, bahwa masing-masing mempunyai pusat perhatian yang berbeda. Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang non-ilmiah, untuk itu Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sosiologi Hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.
2. Sosiologi Hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan dan survey.
3. Sosiologi Hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis (Sabian Utsman: 2013).

Sosiologi Hukum adalah satu cabang dari Sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa Sosiologi Hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi Sosiologi. Sosiologi Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat (O. K. Chairuddin: 1991).

Sosiologi Hukum adalah bagian dari Sosiologi Jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas Sosial Hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi Hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, pada saat

mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum). Sosiologi Hukum memulai khususnya dari pola-pola pelambang hukum tertentu sebelumnya, seperti mengorganisasi hukum, prosedur-prosedur, dan sanksi-sanksinya, sampai pada simbol-simbol simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan-peraturan dan kespontanan hukum (Alvin S. Johnson: 1994).

Pemikiran Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama Sosiologi Hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.

Hal tersebut di atas berbeda dengan ilmu hukum normatif yang memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini Sosiologi Hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain, yang terdapat dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan (Yesmil Anwar, 2008).

Untuk lebih mengkonseptualisasikan Sosiologi Hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian Sosiologi Hukum dari beberapa ahli terkemuka diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Raharjo
Sosiologi Hukum (Sociology of Law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. R. Otje Salman
Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
4. H.L.A. Hart
Menurut Hart, suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.
5. C.J.M. Schuyt
C.J.M. Schuyt, mengemukakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup serta bagaimana peranan nisbi hukum untuk mengubah pembagian yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya struktur kelas di dalam masyarakat sehingga karenanya muncullah persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan. (Zainuddin Ali: 2009). Salah satu tugas Sosiologi Hukum tak lain adalah mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.
6. George Gurvitch (1961)
George Gurvitch (1961) seorang profesor terkemuka bidang Sosiologi Hukum yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut:

Sosiologi Hukum ialah bagian dari Sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi Hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya seraya mengilhami meresapinya, sementara itupun untuk sebahagian dirubahnya. Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola

hukum ke lambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang reorganisasi, sampai pada lambang-lambang hukum semata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta merta. dari yang tersebut belakangan ini Sosiologi Hukum bertindak kepada nilai-nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini, dan mewujudkan dirinya dalam fakta-fakta normative yang serta merta sumber kesahan (validity), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.

8.2 Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum

Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antarmasyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari.

Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut yakni:

1. Hasil dari kajian Sosiologi Hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat.
2. Mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoritik Sosiologi Hukum.
3. Memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara Sosiologi dan Hukum.

4. Mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat.
5. Memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat.

Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta merta datang dengan sendirinya, melainkan penggiat Sosiologi Hukum juga harus terus menggali dan mengembangkan berbagai sumber yang ada. Pada bagian tersendiri bila seorang mahasiswa hukum mempelajari Sosiologi bukanlah sesuatu yang mudah, sebab gaya berpikir Sosiologi yang konstruktif dan metodologis membuat sedikit banyak mahasiswa hukum mengeluarkan tenaga dan bekerja keras untuk memahaminya.

Ada kalanya penguatan pemahaman Sosiologi di awal pembelajaran Hukum sangat diperlukan mengingat objek hukum adalah masyarakat. Hal ini pun berlaku sebaliknya ketika seorang Sosiolog harus mempelajari hukum, mereka juga harus bekerja keras untuk mampu memahami konsepsi hukum dengan segala perspektif serta logika pikir yang sangat luas untuk dipelajari. Kesimpulan kecil bahwasanya manfaat ilmu menjadi berarti ketika pemahaman yang kita miliki bisa terbagi kepada orang lain, dan mampu menjadi alat pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat.

8.3 Kegunaan Sosiologi Hukum

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memaparkan kegunaan Sosiologi Hukum sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat.

J. Van Houtte (1970) menyatakan:

Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada Sosiologi Hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. artinya, Sosiologi Hukum harus menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari Sosiologi Hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan Sosiologi Hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

8.4 Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Bermula dari maraknya pemikiran bahwa *hukum as it is in society, not as it is in the book* sebagai bagian dari kajian tentang hukum dalam eksistensinya sebagai institusi masyarakat, menghasilkan topik-topik dalam perbincangan Sosiologi Hukum akan memaparkan berbagai masalah dan pemikiran mengenai hukum sebagaimana yang dinyatakan *as it is in society*. Dalam kajian bahan perkuliahan tersebut diurai dari perspektif hukum bahwasanya hukum lebih faktual dan memiliki objektifikasi atas Sosiologi, lebih lanjut adalah kutipannya dari apa yang dituliskan.

Pertama, Sosiologi Hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam Sosiologi Hukum, kedua ragam hukum itu (yang berlegalitas formal dan yang berlegitimasi sosial) sama-sama dibicarakan dalam suatu hubungan yang mungkin fungsional dan sinergis, atau bahkan mungkin disfungsional dan kontroversial.

Kedua, Sosiologi Hukum akan menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara yang berfungsi membentuk atau membuat serta menegakkan hukum itu. Selain itu, dikemukakan dan diperbincangkan juga ihwal sumber otoritas yang akan dijadikan dasar normatif untuk membenarkan dilaksanakannya fungsi-fungsi tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem hukum berikut struktur yang berfungsi sebagai penopang otoritasnya juga akan dibicarakan disini. Ihwal yang sering dibicarakan berkisar kebijakan-kebijakan unifikasi dan fakta riil tentang bertahannya pluralisme dalam sejarah perkembangan hukum.

Ketiga, Hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal (sebagaimana ditopang oleh otoritas negara) dan tertib hukum rakyat (yang bertumpu pada dasar-dasar moralitas komunitas). Perbincangan akan tertuju ke pencarian jawab tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam peran yang konservatif sebagai sarana kontrol maupun dalam peran yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitator yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial. Memperbincangkan ihwal keefektifan hukum, diskusi akan berkisar di seputar usaha mengidentifikasi berbagai variabel sosial dan variabel kultural yang boleh diduga akan berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat itu.

Pada perkembangan selanjutnya, Sosiologi lebih didominasi oleh ahli-ahli hukum yang mencitrakan bahwasanya Sosiologi Hukum berasal dari ilmu hukum sendiri dan sosiologi hanya sekedar menjadi instrumen untuk mengkaji masyarakat yang dikehendaki, namun semua ini tidak perlu diperdebatkan kembali yang jelas sinergitas antara kedua disiplin tersebut dapat melahirkan suatu perubahan yang sekiranya berguna bagi kita semua. Sebelum jauh kita diskusikan isi buku ini, selayaknya kita uraikan sejauh mana ruang lingkup dari Sosiologi Hukum itu sendiri, sebagai hal dimaksud untuk menjelaskan setiap fenomena maupun argument sebagai penjas fakta.

Untuk mengetahui kita akan bertolak dengan apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (preskriptif). Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan bahwa letak antara ruang lingkup Sosiologi Hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. sebagai contoh dapat disebut misalnya: Hukum Nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. sebagai contoh dapat disebut misalnya: Undang-undang tentang hak cipta-Undang-undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik.

Karakteristik kajian Sosiologi Hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan Deskripsi, Penjelasan, Pengungkapan dan Prediksi, di antaranya (Zainudin Ali: 2006):

1. Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan tersebut.
2. Sosiologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Satjipto Rahardjo Mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. dengan demikian, mempelajari Sosiologi Hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya.
3. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.

8.5 Objek Sosiologi Hukum

Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu, maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa.

Ketika kedua disiplin ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi, Sosiologi tidak bisa memaksa Hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat begitu pula Hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi Sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang opportunities.

Ada hal yang bisa kita simpulkan bersama sebagai ranah bersama untuk kedua disiplin tersebut yaitu:

1. Masyarakat
2. Lembaga
3. Interaksi.

Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama bilamana kemudian Sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, yang menjalani hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta dampak yang dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat.

Sosiologi mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut, hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Jadi sama seperti Sosiologi Hukum juga memiliki kepentingan tersendiri pada tataran lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah interaksi, bahwasanya menjadi kebutuhan bersama pada Sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu, setiap tindakan yang memiliki arti bagi Sosiologi adalah tindakan sosial sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum (Sardjana Orba Manullang: 2020).

Walaupun digolongkan ke dalam bilangan ilmu pengetahuan sosial, namun akhir-akhir ini hasil kajian Sosiologi Hukum tersebut mulai banyak dirujuk juga oleh para ahli hukum. Kini banyak ahli hukum yang tidak sekedar berbicara tentang kesalahan-kesalahan yuridis suatu aturan hukum saja, akan tetapi juga mulai merasa perlu mengetahui sejauh mana berlakunya aturan hukum berpengaruh pada terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang

teratur dan tertib. Kajian seperti itu memberikan kesempatan luas kepada para ahli hukum untuk menjelajahi alam pengetahuan yang lebih bersifat kontekstual daripada yang terlalu sempit dan tekstual.

Demikian penting alam kontekstual bagi para ahli hukum, bahkan yang semula hanya berpandangan preskriptif tanpa ragu berpendapat bahwa Sosiologi Hukum harus diakui dan dimasukkan sebagai bagian dari ilmu hukum, termasuk beberapa teoritis hukum di Negeri Belanda seperti Meuwissen dan Brugink.

Objektifikasi antara kedua disiplin tersebut hanya bisa dipahami ketika aktor maupun institusi mau menempatkan kebutuhan pemahaman pada tataran yang konstruktif, tidak serta merta ada hegemoni suatu disiplin kepada disiplin lain. Pada Hakekatnya, mulanya sangat sulit dipahami bahwa Sosiologi dan Hukum dapat dipersatukan, karena para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedang para ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan hubungan.

Inilah yang menyebabkan kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum yang menanyakan apakah Sosiologi Hukum tidak bermaksud menghancurkan semua hukum sebagai norma, sebagai suatu asas untuk mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Itu pula sebabnya sebagian ahli Sosiologi tidak membenarkan adanya Sosiologi Hukum. Mereka khawatir, melalui Sosiologi Hukum akan dihidupkan kembali penilaian-penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta sosial. Karena tugas Sosiologi mempersatukan apa yang dipecah-pecah secara sewenang-wenang oleh ilmu-ilmu sosial, selain itu para ahli Sosiologi menyatakan ketidakmungkinan mengasingkan hukum dari keseluruhan kenyataan sosial, dipandang sebagai suatu totalitas yang tak terbinasakan.

Karena Sosiologi Hukum adalah cabang khusus Sosiologi, maka metode kajian yang dikembangkan adalah metode yang telah dilazimkan dalam Sosiologi itu. Sebagaimana diketahui, sosiologi mencoba melihat objek-objek kajiannya dengan kacamata penglihatan deskriptif. Artinya, ia pertama-tama hanya hendak mengetahui dan memahami ihwal nyata objeknya itu, tanpa memberikan penilaian apa-apa tentang baik buruknya. Dari kacamata itu Sosiologi dan Sosiologi Hukum “hanya” akan memberikan keadaan kualitas dan/atau kuantitas objeknya sebagaimana “apa adanya”. Sosiologi hanya akan

mempertanyakan apakah kualitas tertentu ada atau tak ada dalam objek yang tengah diteliti itu; dan kalau ada, berapa besarnya kuantitasnya itu?

Sesungguhnya, Sosiologi Hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika. Dengan demikian, perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas Sosiologi Hukum, selain itu kriteria-kriteria yang digunakan mengabstraksikan makna-makna simbol yang normatif, yang lepas sepenuhnya dari kenyataan hukum, maupun asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun oleh ilmu hukum, tidak dapat terselenggara kecuali dengan dukungan Sosiologi Hukum.

Menurut Achmad Ali, objek utama kajian sosiologi hukum sebagai berikut:

1. Dalam mengkaji hukum sebagai government social control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori

grundnormnya, melainkan stratifikasi yang di kemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

4. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

8.6 Pengaruh Dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum Terhadap Sosiologi Hukum

Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang memengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamiah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Carl Von Savigny (1779-1861) berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volgeist*). Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Ia menantang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif, menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Di abad kedelapan belas analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat, demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berfikir deduktif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian itu mengabaikan lingkungan sosial hukum.

Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah sebagai berikut:(Satjipto Rahardjo: 2010):

1. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif.
2. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat (popular consciousness). (Sardjana Orba Manullang, 2019).
3. Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Volksgeist (jiwa dari rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa.

Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sajarah, tetap tenggelam dibawah arus normatif- positivistic yang kuat di abad ke-19. Lain halnya dengan filsafat hukum yang memiliki fahamnya sendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan secara terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas (ultimate).

Theo Huijbers menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodelis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki (sesungguhnya) dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berfikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang ada melalui cakrawala pandangan

yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.

Namun menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta yang konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Berkaitan dengan kaidah hukum normatif (hukum) yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan rumusan pendapat atau pandangan tingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Kaidah hukum yang memiliki kenyataan normatif bisa disebut apa yang seharusnya dilakukan atau *das sollen*. *Das Sollen* merupakan suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Sebaliknya kaidah yuridis empiris adalah kaidah hukum yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang biasa disebut *das sein*.

Kaidah hukum mempunyai sifat yang pasif seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif, diperlukan rangsangan dari peristiwa (*das sein*) tertentu, sehingga kaidah hukum dapat aktif, yang kemudian dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Oleh karena itu selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu maka kaidah hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Jadi kaidah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret: *Das Sollen* memerlukan *Das Sein*. Apabila suatu peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, maka peristiwa konkret yang relevan untuk hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu peristiwa konkret tidak sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum diciptakan oleh kaidah hukum. Sebaliknya kaidah hukum dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret.

Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan, dan mengapa harus ada perbedaan? Dengan demikian pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan komprehensif.

Oleh karena itu, filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari hukum positif. Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena secara tuntas dan kritis, seperti lazimnya watak filsafat, menggugat sistem hukum perundang-undangan. Pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dari titik yang jauh yang tidak secara langsung menggugat hukum positif. Seperti yang dilakukan oleh Gutav Radbruch dengan tesis “tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Pengaruh yang khas dari filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan untuk menetralkan atau merelatifkan dogmatik hukum, tekanannya lebih diletakan bereaksinya atau berprosesnya hukum (*law in action*). Roscou Pound berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum yang harus ditinggalkan. Selain Pound, Cardozo berpendapat, bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan. Pada hukum berpengaruh pula kepentingan- kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apakah benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat.

Bab 9

Tujuan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial di Persekolahan dan Perkembangannya

9.1 Pendahuluan

Miskonsepsi terus bergulir mengenai pemahaman antara keunggulan ilmu pengetahuan alam (IPA) dan ilmu pengetahuan sosial (IPS), kondisi ini seperti menghantarkan pada persoalan di tengah persimpangan mitos yang diasumsikan masyarakat pada jurusan mana yang unggul dan lebih baik, hal ini berdampak kepada status anak dalam prestasi belajar. Seolah-olah kualitas peserta didik jurusan IPA bermuara pada kemampuan anak secara optimal dengan julukan anak pintar, rajin dan disiplin. Berbeda asumsi ketika memandang siswa dengan jurusan IPS yang nakal, malas dan level keintarannya dibawah peserta didik jurusan IPA.

Alasan tersebut dipandang secara general mengingat level kecerdasan anak diukur ada salah satu aspek saja, mestinya daya peserta didik ditinjau dari aspek knowledge, attitude dan skill. Benjamin Samuel Bloom (Anderson, 2002) telah mengutarakan Taksonomi berarti kategorisasi dan nomos yang berarti prinsip dasar, maka dapat dimaknai bahwa taksonomi yaitu prinsip dasar

dari tingkatan-tingkatan kategorisasi mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran peserta didik.

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan Bloom bersama rekannya mendapati temuan hasil belajar yang dievaluasi dan kesimpulannya adalah capaian belajar siswa dilihat dari butiran soal yang mengarah pada hafalan siswa jadi Bloom mengatakan bahwa hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir (*low order thinking skills*). Temuan Bloom menjadi fakta konkrit bahwa desain pembelajaran IPS di persekolahan dengan mengedepankan anak hafalan yang tendensinya bermuara pada aspek kognitif dengan mengingat apa yang sudah dipelajari kemudian diujikan, metode pembelajaran seperti yang kemudian membangun stigma di masyarakat bahwa jurusan IPS menjadi daya dorong yang rendah bagi kecakapan anak untuk belajar (*process thinking*).

Teori belajar yang dikembangkan Taksonomi menghantarkan kepada daya berpikir peserta didik dari tahu tentang sesuatu yaitu memberdayakan kemampuan dirinya, dan kecakapan dirinya tentang bagaimana melakukannya. Merujuk dari pemikiran Taksonomi Bloom maka pemahaman di tengah persimpangan antara mitos jurusan IPA dan IPS di persekolahan dapat diidentifikasi kecakapan dan kemampuan peserta didik mulai dari aspek attitude, knowledge dan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi (*lots hingga hots*) secara optimal.

Dasar-dasar pemikiran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan sosial di era globalisasi baik di bidang pendidikan maupun di masyarakat perlu menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar yaitu, untuk apa IPS diajarkan di sekolah hingga perguruan tinggi? Dari pertanyaan ini maka akan melahirkan fondasi penting dari IPS yang mengarah pada tujuan dan manfaat IPS untuk diajarkan sebagai jawaban kritis dan rasional agar akurasi dan ketepatan dalam berfikir, memahami dan menerapkan IPS dapat secara maksimal.

Tentunya untuk mencapai tujuan IPS yang maksimal harus mampu menelaah dimensi kehidupan manusia, karena objek dari pada IPS adalah manusia, telaah dimensi waktu, ruang dan tempat menjadi simultan paradigma dalam kajian ilmu sosial. Dimensi waktu berkaitan dengan kejadian manusia baik ditinjau dari masa lalu, masa kini hingga yang akan datang “socio historis humaniora” dari perspektif ini akan melahirkan konsep ilmu sosial yang relevan dengan kondisi dan situasi manusia yang telah, sedang dan akan

terjadi. Dimensi ruang dan tempat bermuara pada aktivitas manusia yang tampak dan berwujud baik secara fisik maupun metafisika.

Keberadaan IPS di era sekarang menguatkan tentang perubahan menjadi sebuah keniscayaan, karena di dalam teori sosial tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Tujuan pendidikan IPS meminjam pemikiran Bloom dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Pergeseran pola berpikir tersebut berimplikasi pada penetapan tatanan tertentu dalam pembelajaran. Tatanan tertentu yang menjadi fokus pembelajaran mendasarkan pada hakikat tuntutan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang memengaruhi nilai-nilai sosial manusia.

Muatan ketiga aspek tersebut membangun kecenderungan, antara lain:

1. Learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to life together sebagai paradigma pembelajaran;
2. Kecenderungan bergesernya orientasi pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered;
3. Kecenderungan pergeseran dari content-based curriculum menuju competency-based curriculum;
4. Perubahan teori pembelajaran dan asesmen dari model behavioristik menuju model konstruktivistik;
5. Perubahan pendekatan teoritis menuju kontekstual;
6. Perubahan paradigma pembelajaran dari standardization menjadi customization;
7. Dari evaluasi dengan paper and pencil test yang hanya mengukur convergent thinking menuju open ended question, performance assessment, dan portfolio assessment, yang dapat mengukur divergen thinking (Santya, 2005)

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas peserta didik dalam membangun daya hasil dan daya guna (ranah kognitif) bagaimana cara kerja otak untuk berpikir terdiri dari enam tahapan dari low order thinking skills (LOTS), middle order thinking skills (MOTS) hingga higher order thinking skills (HOTS):

1. Pengetahuan (LOTS) kecakapan menghafal dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari;
2. Pemahaman (LOTS) kecakapan memahami materi yang telah dipelajari;
3. Penerapan (MOTS) kecakapan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru;
4. Analisa (MOTS) merupakan kecakapan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya;
5. Sintesis (HOTS) kecakapan untuk memproduksi materi seperti gaya berkomunikasi dan berinteraksi yang unik, mendesain rencana draf yang akan diperbuat, dan gairah meraih hasil;
6. Evaluasi (HOTS) kecakapan bertindak dalam evaluasi untuk mengukur nilai, manfaat dan tujuan dari suatu hal berdasarkan kriteria dan akurasi yang jelas (Anderson, 2002).

Harapan besar IPS menjadi penopang manusia sebagai warga negara dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, IPS harus mampu menjadi domain terdepan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, unggul, berkompeten, dan berkarakter dalam daya saing, daya guna dan daya hasil. Di dalam konsep nilai-nilai luhur yang diwariskan menjadi pedoman telah diri bagi manusia agar memiliki arah dan tujuan hidup bersama dalam harmonisasi sosial pada bingkai kebhinekaan.

9.2 Mencetak Warga Negara Hipotetik

Wacana perkembangan ilmu pengetahuan sosial harus mampu menyahuti perubahan zaman yang terjadi, jika mengamati situasi dan kondisi perubahan yang terus bergulir maka kehadiran ilmu sosial harus mampu menopang keadaan tersebut. Karena ilmu didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun sistematis, metode dan memiliki aktivitas penelitian (Gie, 1999). Kemampuan ilmu sosial harus didesain secara sistematis (kognitif, prosedur, kontrol dan kritik), Memiliki metode (dalill/teori, masalah,) dan Aktivitas

(penelitian/penyelidikan). Ini menjadi prasyarat tersendiri pada ilmu sosial sehingga mampu berdiri secara kokoh menyambut perubahan tersebut.

Perubahan yang mempola trend pendidikan yang terus terjadi di masa yang akan datang berpijak pada orientasi perubahan perilaku manusia, diantaranya menyiapkan kehadiran manusia di masa depan dan kecakapan bertahan (warga negara survival), pengetahuan yang diraih tidak terkukung pada jalur formal melainkan multi akses informasi, dan pendidikan berorientasi pada nilai kebajikan (virtue ethics)

Meminjam pemikiran Syed Muhammad Naquib tentang konsep etika (virtue ethics) sangat relevan untuk menjawab tantangan perubahan zaman di era distribution karena memberikan penekanan pada dua budi pekerti yang suci (virtue) yaitu keadilan dan kebijaksanaan, karena keadilan merefleksikan adab dan kebijaksanaan. Pemikiran etika al-Attas juga menegaskan kembali peran penting akal dan wahyu sebagai sumber etika karena kekuatan wahyu mengafirmasi keduanya secara harmonis dan tidak mempertentangkannya secara ekstrim. Pemikiran al-Attas menolak klaim etika relativisme yang menafikan bahwa moralitas tidak memiliki nilai kebenaran (truth value) karena pandangan Postmodern yang skeptis terhadap akal/rasio dan wahyu (Al-Attas, 2013).

Warga negara hipotetik adalah warganegara yang diduga, dengan demikian hipotesis yang dilakukan IPS harus mampu memberikan jawaban sementara atas masa depan manusia, dalam upaya mempersiapkan peserta didik dengan mutu dan daya sebagai tamu masa depan yang layak hadir. Menduga manusia yang bijak dan beradab dalam konsep IPS dengan membangun sistem persekolahan yang dapat mendidik/mengajarkan dan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter dengan kecakapan karakter privat dan publik dengan membangun rasa kepedulian sosial dalam kebermanfaatn kehidupan berbangsa dan bernegara (the public good citizens) hal ini selaras dengan pemikiran yang digagas oleh al-Attas.

IPS berperan penting dalam mempola peserta didik melalui transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan tujuan menghantarkan kepada kecakapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu membangun sebuah ikatan emosional antar manusia untuk tujuan dan cita-cita hidup bersama dalam kerangka harmonisasi sosial. Peserta didik diarahkan kepada kesiapan hidup dalam interaksi dan komunikasi sosial maka IPS berkewajiban menanamkan nilai-nilai kehidupan tersebut.

IPS sebagai estafet nilai-nilai luhur dalam mencetak warganegara yang berkarakter maka memiliki tujuan yaitu mengantarkan peserta didik menjadi warga negara masa depan yang siap berguna, berhasil dan bersaing sebagai makhluk berbangsa dan bernegara. Warisan nilai dan budaya bangsa akan dijadikan landasan untuk pengembangan bangsanya agar tetap mencatatkan bangsa ini dalam pergaulan internasional. Maka prinsip nilai luhur yang telah disepakati tertuang dalam Pancasila harus disinergikan ke dalam IPS.

Menurut R.Barr, dalam citizenship transmission tradition, nilai-nilai tertentu yang dipandang sebagai "nilai-nilai yang baik" ditanamkan dalam upaya untuk mengajari siswa menjadi warga negara yang baik. Tradisi ini biasanya menggunakan pendekatan indoktrinasi atau inkulkasi (Nelson, 1987).

Chapin dan Messick, pekerjaan dan keterampilan peserta didik harus kita persiapkan untuk dapat bertahan dalam era modern, dan era informasi pada masyarakat yang berubah dengan cepat. Maka peran penting guru harus selalu sadar tentang bagaimana kita dapat menolong peserta didik supaya dapat hidup dengan sukses di masa depannya; sekarang kita mempersiapkan mereka untuk mengarungi abad dua puluh satu, tidak menunggu sampai abad itu menggilas kita (Chapin, 1996). Pola yang dibangun oleh IPS memiliki keunikan tersendiri karena mencetak warganegara yang akan diduga dimasa yang akan datang dengan segala perubahan sosial, maka IPS harus mampu mentransfer dan mentransformasi nilai tentang dunia yang berubah-ubah, keadaan demikian dapat dimanfaatkan IPS untuk meningkatkan daya kualitas individu dan kualitas publik karena perubahan tersebut secara beriringan membuka peluang bagi manusia yang memahami keadaan yang terjadi.

Jika melihat level IPS di persekolahan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi maka akan nampak perbedaan pada penekanan transfer dan transformasi nilai kehidupan, misalnya di Sekolah Dasar, diperlukan untuk menumbuhkan kemampuan siswa, keberanian, dan imajinasi yang dapat membawa mereka ke suatu tindakan yang didasari atas pertimbangan personal dan sosial. Dari sejak dini proses belajar mengajar harus dikembangkan secara sistematis untuk membekali kemampuan pengamatan siswa yang terorganisir, dan membentuk konsep yang terstruktur yang didasarkan atas ilmu-ilmu sosial. (Depdikbud, 1994).

Kedudukan IPS memiliki maksud dan tujuan sebagai alasan pentingnya diajarkan di sekolah:

1. IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekan demokrasi;
2. IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan "dunianya";
3. IPS adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif;
4. IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar (fundamental understanding) tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya;
5. IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial.

Alasan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkompromi antar disiplin ilmu lainnya dalam kaidah ilmu-ilmu sosial yang saling berkontribusi baik itu sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, sejarah, psikologi, hukum dan ilmu politik serta ilmu lainnya yang relevan dan berkontribusi dengan ilmu sosial. Karena dukungan dari ilmu-ilmu ini harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mata pelajaran IPS harus diupgrade dengan metode yang didesain secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan secara progresif. Ukuran keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat menjadi orientasi IPS. Maka tujuannya IPS yang paling sederhana yaitu:

1. Memahami konteks kehidupan manusia berbangsa dan bernegara;
2. Kecakapan dengan mengasah kemampuan berpikir logis, kritis, argumentatif, dengan daya keingintahuan, pemecahan masalah dan mental kreatif;
3. Kesadaran membangun komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur;
4. Berdaya guna dan berdaya saing dalam mengembangkan kemampuan interaksi dan komunikasi baik lewat kemandirian maupun kolaborasi.

Pengembangan antara ilmu-ilmu sosial (social sciences) dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (social studies). Ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui pendidikan ilmiah dan proses penelitian yang direncanakan, sedangkan Pendidikan IPS (Social Studies) terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan tujuan pendidikan (Somantri, 2001)

NCSS memberikan definisi IPS dalam perspektif yang terintegratif, "*Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good citizens of culturally diverse, democratic society in an interdependent world*". (NCSS, 1994)

Penjelasan NCSS tidak mengarah kepada rentetan sejarah sebagai unsur pendekatan atau ilmu sosial lainnya sebagai suatu rujukan disiplin ilmu (subject approach). Penjelasan NCSS tendesinya bermuara pada pandangan peserta didik (warga negara hipotetik) harus terlibat dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan sebagai makhluk sosial, dan setiap isu publik kemasyarakatan tersebut sifatnya selalu multidisiplin atau majemuk. Berarti guru juga sangat membutuhkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kebutuhan materi ajar, tidak hanya berasal dari ilmu sosial saja. Maka guru dapat mengajarkan ilmu-ilmu sosial sebagai komponen kurikulum yang terintegrasi dan komprehensif

Dalam pandangan Cogan, John J. and Ray Derricott dalam *Citizenship Education For the 21st Century* warga negara yang baik dan layak hadir menjadi tamu masa depan dengan karakteristik berikut itu di namakan dengan warganegara abad ke-21:

1. Kecakapan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global;
2. Kecakapan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
3. Kecakapan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kecakapan berpikir kritis dan sistematis;
5. Kecakapan memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);
6. Kecakapan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan;

7. Kecakapan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
8. Kecakapan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. (Cogan & Derricott, 1998)

Meminjam gagasan dari Sanusi yang memperhatikan secara khusus bagaimana pengajaran IPS di sekolah yang notabene pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kelas yang membosankan siswa; ketidak lebihunggulan guru dari sumber lain; ketidak kemutakhiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang “mengulit-bawang”; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. (Sanusi, 1998)

Imbuhnya Sanusi merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu kualitas manusia dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan peserta didik agar lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang fair. Dalam dimensi konseptual lanjut Sanusi menegaskan agar membangun batasan yang jelas mengenai tujuan dan konten IPS untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengoronasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat khususnya di era distribution.

Di situasi sekarang ini pendidikan dilihat dalam kaca mata IPS agar dapat mengungkap manusia pembelajar, bagaimana manusia tersebut mampu menelaah ancaman, hambatan, tantangan dan risiko dalam fenomena yang terjadi di era perubahan yang serba cepat, khususnya bagi generasi bangsa yang akan diduga dimasa yang akan datang sebagai pewaris peradaban sosial. Warga negara hipotetik (yang diduga) harus didesain oleh IPS kearah bekal diri yang mampu menyalin diri dengan berbagai literatur sejarah dimensi manusia, meyakini kecakapan untuk dapat beradaptasi baik secara interaksi

maupun komunikasi dan melakukan tindakan yang nyata dalam upaya kepatutan harmonisasi sosial. Jika hal tersebut mampu membangun kesadaran manusia untuk menakar kecakapan diri dalam aktualisasi, maka kelayakan hidup di masa-masa yang akan datang akan diraih, karena manusia harus memiliki perencanaan untuk dapat mengeksiskan dirinya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Bab 10

Sosiologi Dalam Arsitektur

10.1 Pendahuluan

Arsitektur adalah cermin budaya, keberadaannya saat ini mengingatkan kita akan masa lalu dan membangun harapan di masa yang akan datang. Arsitektur sangat berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, sehingga batasan dan pengertian dari arsitektur tergantung dari sudut mana memandangnya. Ditilik dari ilmu seni, arsitektur dipandang sebagai seni bangunan termasuk bentuk dan ragam hiasnya, sementara disiplin ilmu teknik mendefinisikan arsitektur sebagai sistem mendirikan bangunan termasuk proses perancangan, konstruksi, serta struktur. Jika lihat dari segi ruang maka arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melaksanakan aktivitas tertentu, dan lain sebagainya.

Berbagai definisi yang kemudian menjelaskan tentang hakekat arsitektur pada dasarnya berawal dari pertanyaan apakah arsitektur itu ?. Christian Norberg Schulz dalam bukunya *Intentions Of Architecture* merespon berbagai pendapat terkait arsitektur dan mengemukakan bahwa arsitektur sesungguhnya adalah produk yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dan lingkungannya. Olehnya itu arsitektur tidak dapat dilihat sebagai suatu produk bangunan atau seni semata yang hanya dirasakan oleh penikmat, akan tetapi kehadirannya sangat terkait dengan manusia yang menempati dan melakukan aktivitas di dalamnya serta kondisi lingkungan yang ada di

sekitarnya. Dengan kata lain kehadiran suatu produk arsitektur dapat memengaruhi kehidupan sosial penggunanya, baik itu antar individu, individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok lainnya.

Keberadaan arsitektur diyakini dapat menjadi solusi dari suatu masalah dan juga memungkinkan untuk menjadi penyebab terjadinya masalah. Banyak bukti yang berkembang terkait permasalahan fungsi arsitektur, puncaknya terjadi berbarengan dengan berkembangnya ideologi gerakan arsitektur modern, yakni peristiwa diruntuhkannya bangunan apartemen di Proetigo, sebuah karya desain yang fenomenal dan mendapatkan nobel dari pemerintah setempat. Akan tetapi setelah bangunan difungsikan ternyata desainnya justru memicu terjadinya beragam vandalisme (kejahatan) dan disinyalir terus meningkat selama satu dasawarsa.

Tidak sedikit literatur menjelaskan bahwa kenyataan tersebut terjadi disebabkan rancangan yang dibuat pada masa itu hanya sebagai manifestasi prinsip-prinsip desain, dan tidak berperan dalam memenuhi tuntutan gaya hidup dan kebutuhan yang tak terkatakan dari manusia yang menggunakannya. Bertolak dari fenomena yang dihadapi dalam dunia arsitektur, pada akhirnya menuntut arsitektur perlu bersinergi dengan disiplin ilmu lain untuk dapat mewujudkan karya arsitektur yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bidang pengetahuan lain yang sangat berperan di antaranya adalah sosiologi. Terkait ‘sosiologi dalam arsitektur’, penulis mencoba mengulasnya dalam tulisan sederhana ini.

10.2 Bagaimana Hubungan Sosiologi dan Arsitektur?

Sosiologi dalam Wikipedia adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Ditinjau dari segi etimologinya sosiologi berasal dari dua suku kata yakni ; ‘Socius’ yang berarti kawan dan ‘logos’ yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana hidup berkawan atau bermasyarakat, Wulansari Dewi (2009). Memang tidak mudah merumuskan definisi dari sosiologi yang dapat merangkum ratusan pendapat para ahli terkait definisi sosiologi itu sendiri,

akan tetapi dapat dipahami bahwa sosiologi pada hakikatnya adalah ilmu yang ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari kehidupan masyarakat.

Perjalanan berarsitektur dengan serangkaian persoalan yang telah dihadapi, menjadi dasar dibutuhkan pengetahuan lain yang dapat berkontribusi untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas dan memenuhi tujuan penghidupannya. Sosiologi merupakan salah satu pengetahuan yang dibutuhkan dalam memahami permasalahan terkait individu atau kelompok individu/masyarakat sebagai subjek yang merasakan langsung objek arsitektur, baik itu sebagai pengguna maupun penikmat. Sosiologi dalam hal ini memiliki peran terkait analisis pengguna hingga pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini analisis yang dikembangkan adalah seputar pola perilaku masyarakat terkait hal-hal yang melatarbelakanginya termasuk aspek budaya, tentunya hal ini menjadi penting dan tidak dapat diabaikan.

Hubungan antara sosiologi dan arsitektur sangat erat, dan memiliki peran yang sangat penting, mengingat produk arsitektur ditujukan untuk menata lingkungan tempat di mana manusia melakukan aktivitasnya. Antara manusia (individu atau kelompok/masyarakat) dan hasil karya arsitektur memiliki relasi yang bersifat timbal balik. Desain yang berkualitas akan memberi andil pula terhadap kualitas hubungan ‘interaksi sosial’ antar manusia yang menggunakannya. Dalam tataran ini, yang menjadi rujukan untuk penilaian adalah bagaimana memahami respon seseorang terhadap lingkungannya bergantung pada bagaimana individu yang bersangkutan mempersepsikan lingkungannya. Salah satu yang dipersepsikan manusia tentang lingkungannya adalah ruang di sekitarnya, dan aspek sosialnya yakni ; bagaimana manusia berbagi dan membagi ruang dengan sesamanya ?. Pola interaksi dan perilaku yang terjadi antar manusia (individu maupun kelompok) merupakan informasi yang sangat penting bagi arsitek dalam merancang.

Tidak sedikit permasalahan sosial dapat diselesaikan atau diminimalisir dengan perencanaan dan perancangan arsitektur yang baik. Sebagai contoh karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau yang biasa disapa Romo Mangun – sangat berhasil melakukan inovasi sosial di bantaran kali Code. Sehingga kawasan bantaran sungai yang tadinya kumuh menjadi indah, bersih dan tertata dengan baik. Tidak kalah penting adalah perubahan sikap masyarakat yang tadinya cenderung apatis dengan kondisi lingkungan permukimannya, menjadi peduli dan penuh tanggungjawab dalam merawatnya. Inovasi sosial yang berhasil dilakukan oleh Y.B Mangunwijaya terkait lingkungan fisik permukiman di antaranya adalah merancang deretan rumah dengan orientasi

dan view nya mengarah ke kali Code, sehingga warga dengan suka hati berusaha menjaga kali Code agar tetap bersih dan nyaman jika pandang. Mangunwijaya juga menghadirkan fasilitas bersama untuk wadah interaksi sosial masyarakat seperti ; teman baca, ruang berkumpul informal dan lain sebagainya. Keberhasilan Romo Mangunwijaya dalam menata kali Code, menjadikannya kawasan yang terkenal hingga mancanegara, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Yogyakarta. Suasana kawasan bantaran kali Code dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10.1: Karya Y.B Mangunwijaya – Inovasi Sosial pada Penataan Kali Code (Kompasiana ;Juni 2015)

Begitupun sebaliknya, tidak jarang permasalahan sosial baru justru dimunculkan karena kesalahan arsitek dalam merencanakan dan merancang objek arsitektural. Salah satu contoh yang cukup fenomenal dalam dunia arsitektur adalah karya Le Corbusier dicerminkan pada rancangan unit lingkungan di Chandigarh, India. Dari segi arsitektur, karya objek bangunan – bangunan memang merupakan karya yang luar biasa dalam style arsitektur modern. Akan tetapi dalam konteks kawasan, kota Chandigarh menjadi tidak bermakna lagi seperti sebelumnya, selain hanya sebagai penanda lokasi. Hal ini dikarenakan akibat taman kota yang sepi dan tidak menunjang gaya hidup masyarakat pemakainya.

Chandigarh, dirancang oleh arsitek Le Corbusier sesuai dengan gagasan – gagasan baru dalam perencanaan kota barat modern, yang memperhatikan kebutuhan manusia akan cahaya, ruang dan udara segar. Namun, yang tidak dipertimbangkan dalam perencanaan tersebut adalah pola hidup di kota – kota india lama. Masyarakatnya lebih suka berjubel daripada berada di ruang lengang dan lebih suka penataan fasilitas ala india dari pada ala eropa, Marcella Joyce (2004). Setelah hasil desain ini dihuni, terbentuklah sebuah kota menurut kebutuhan penghuni nya dan bukan menurut prediksi arsiteknya. Taman – taman kosong, sekolah jarang dikunjungi, pusat pertokoan yang rapi telah diubah oleh pola belanja penduduk sehingga tidak lagi menjadi seperti yang direncanakan.



Gambar 10.2: Suasana kota Chandigarh sebelum dan sesudah diredisain (Kansil Evander 2014)

Contoh di atas menunjukkan bahwa untuk pembentukan tatanan pola sosial maka variabel sosial lebih berperan daripada faktor arsitekturnya. Kemungkinan perilaku manusia – spasial, kompleks maupun emosional merupakan suatu fungsi dari kebiasaan dan maksud seseorang. Seperti halnya faktor lain yang dianggap pemicu perilaku seseorang. Untuk menjadikan kota atau lingkungan lebih manusiawi, maka diperlukan kesadaran bahwa keberhasilan suatu lingkungan memenuhi kebutuhan manusia, terletak pada bagaimana lingkungan tersebut mampu mendukung terjadinya lingkungan sosial yang positif. Olehnya itu dapat digaris bawahi bahwa antara kebutuhan fisik (arsitektur) dan kebutuhan sosial memiliki hubungan timbal balik dan sangat erat.

10.3 Konsep – Konsep Dasar Sosiologi yang penting dimaknai dalam Arsitektur

Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol tentang sesuatu atau sifat-sifat benda, peristiwa ataupun hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Terkait dengan hubungan sosiologi dan arsitektur dapat dipahami melalui konsep-konsep dasar dalam sosiologi, selanjutnya diterjemahkan dalam proses sosial yang perlu dipahami dalam menghasilkan suatu karya arsitektur, baik dalam skala mikro (ruang), mezzo (bangunan bermassa/perumahan) maupun makro (kota/desa). Konsep juga dinyatakan sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

Konsep-konsep dasar sosiologi yang terpenting menurut Wulansari Dewi (2009) meliputi:

Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial. Interaksi sosial terjadi manakala terjadi pertentangan antar beberapa kepentingan, entah itu orang per orang dengan kepentingan kelompok, atau dengan kepentingannya masing-masing. Sebaliknya interaksi tidak akan terjadi jika manusia yang melakukan hubungan tersebut sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap sistem sarafnya sebagai suatu akibat. Hakekat hidup bermasyarakat itu sebenarnya terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan manusia dalam usaha-usaha bersama seperti ; bertemu, makan bersama, berdiskusi dan sebagainya. Karena itu, inti dari kehidupan sosial adalah interaksi, yaitu aksi dan tindakan.

Manusia adalah homo sapiens, yakni makhluk yang senantiasa berfikir dan mencari solusi. Manusia dibekali oleh Tuhan panca indra dan pikiran sehingga secara kodrati manusia dikaruniakan sifat ingin tahu dan kemampuan untuk mencari solusi agar tetap survive. Untuk itu, dalam kaitannya dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, maka secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manusia menggunakan lingkungannya
Melalui kemampuan pikirannya, manusia senantiasa bertindak memanfaatkan apa yang ada di lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka sangat dimungkinkan manusia dapat hidup dan bergaul dalam lingkungannya.
2. Manusia melawan lingkungannya
Dalam menghadapi keadaan lingkungan/alam yang mengganggu dirinya, manusia juga berupaya dengan berbagai cara untuk menghindari diri dari gangguan tersebut semaksimal mungkin, sehingga dirinya tetap berada dalam kondisi aman dan nyaman.
3. Manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya
Dalam menghadapi lingkungannya, individu dapat pula melakukan penyesuaian diri, baik secara alloplastis maupun autoplastis dengan tujuan agar interaksinya dalam lingkungannya lebih baik. Autoplastis

yaitu mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau keinginan manusia dalam arti manusia yang memengaruhi lingkungan (manusia bersifat aktif). Sedangkan Alloplastis adalah sebaliknya, yaitu menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan lingkungan, yang mana kegiatan manusia ditentukan oleh lingkungan (manusia bersifat pasif).

4. Manusia mengambil bagian dalam kegiatan yang sedang berlangsung
Dalam suatu kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan, manusia juga dapat turut serta mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Struktur Sosial

Struktur sosial adalah jalinan unsur-unsur yang pokok dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto (1988) meliputi ; kebudayaan, lembaga/institusi sosial, stratifikasi sosial dan kekuasaan. Terbentuknya masyarakat luas atau komunitas dapat terjadi karena adanya interaksi sosial antara anggota atau kelompok sosial melalui beberapa hal, antara lain:

1. Melalui pertukaran pengalaman tentang pengetahuan, ketrampilan, organisasi sosial dan mengenai wilayah mereka masing-masing.
2. Melalui kesamaan kebutuhan dalam hal biologi, nilai-nilai dan tujuan yang diajarkan oleh kebutuhan.

Perubahan Sosial

Soerjono Soekanto (1982) mengartikan perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia dan pola-pola tersebut terjadi karena faktor intern dan ekstern. Sementara Selo Soemardjan (1962) mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga – lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai – nilai, sikap – sikap dan pola – pola perilaku manusia di masyarakat. Oleh karenanya menurut Wulansari Dewi (2009) perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks, yang pada wujudnya senantiasa menyertai setiap kehidupan masyarakat di manapun berada, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak mengalami perubahan dalam sejarah perjalanannya.

10.4 Proses Sosial dan Implementasinya dalam Desain Arsitektur

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini ditandai dengan pentingnya manusia bagi manusia lainnya dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat. Interaksi sosial pada prinsipnya merupakan bentuk umum dari proses sosial, Marcella Joyce (2009 ; 107) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sosialnya manusia berperilaku sosial dalam lingkungannya. Perilaku interaksi yang terjadi tersebut dapat diamati melalui: Fenomena perilaku lingkungan, Kelompok pemakai, dan Tempat terjadinya aktivitas. Fenomena ini menunjuk pada pola-pola perilaku pribadi, yang berkaitan dengan lingkungan fisik yang ada, terkait dengan perilaku interpersonal manusia ataupun perilaku sosial manusia, yang meliputi: a. Ruang personal. b. Teritori, c. Kesesakan dan Kepadatan, serta d. Privasi.

Ruang Personal

Manusia mempersepsikan ruang di sekitarnya tidak berdiri sendiri. Suatu proses persepsi yang dimaknai melalui panca indra setiap individu adalah hasil dari interaksi manusia dengan segala yang ada disekitarnya, baik itu benda mati maupun makhluk hidup termasuk manusia lainnya. Jika isi ruang itu adalah manusia lain, maka individu yang bersangkutan akan membuat jarak tertentu dengan dengan orang lain. Jarak yang membatasi individu dengan orang lainnya tentunya berbeda-beda, dan sangat tergantung dari kualitas hubungan di antaranya. Ruang yang melingkupi setiap individu tentu tidak dapat dilihat secara nyata, namun keberadaannya dapat dirasakan oleh pemiliknya dan dimanifestasikan dalam sikap atau perilaku dalam berinteraksi. Ruang yang dimaksud adalah ruang personal atau gelembung privasi.

Menurut Sommer (dalam Lang 1987) ruang personal adalah batas tak tampak/maya yang melingkupi setiap individu, di mana orang lain tidak bisa memasukinya tanpa izin individu yang bersangkutan. Ruang personal merupakan mekanisme batas seseorang untuk mencapai privasi. Ruang personal menunjukkan secara tegas adanya pengaruh psikologis individu atau kultural sekelompok individu terhadap kognisinya mengenai ruang. Altman (dalam Lang, 1987) menyatakan bahwa besaran dari ruang personal ini tidak sama antara satu orang dengan orang lain, karena ada faktor dalam diri setiap individu yang memengaruhinya, yakni ; jenis kelamin, umur, tipe kepribadian dan latar belakang budaya, agama dan lain sebagainya. Dengan kata lain,

batasan ruang personal sangat tergantung dari persepsi lingkungan individu yang bersangkutan.



Gambar 10.3: Ruang Personal dan Batasan Interaksinya (Arsitektur dan Perilaku Manusia 2004)

Beberapa literatur menjelaskan kurangnya jarak personal menunjukkan kurangnya pula jarak interpersonal. Hal tersebut tentunya memberi dampak dalam diri individu berupa rasa tidak nyaman, stress, ketidakseimbangan, komunikasi buruk serta kendala kebebasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang personal berperan dalam menentukan kualitas hubungan individu dengan individu lainnya. Dalam desain arsitektur, baik itu skala ruang mikro hingga makro hal terkait ruang personal tidak dapat diabaikan. Konflik sosial memungkinkan terjadi manakala arsitek tidak dapat menginterpretasi makna-makna sosial pada suatu tatanan lingkungan dalam mendesain.

Salah satu contoh manifestasi ruang personal dalam desain penataan perabot pada ruang publik, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10.4: Desain Tatanan Ruang Sosiopetal dan Sosiofugal (Transformasi.com 2020)

Gambar di atas memperlihatkan suatu tatanan yang mampu memfasilitasi interaksi sosial (ruang sosiopetal), dan tatanan yang mampu mengurangi interaksi sosial (ruang sosiofugal) sehingga menciptakan privasi. Kedua penataan tersebut perlu dihadirkan dalam suatu ruang publik, sehingga pengunjung dapat memilih tempat duduk sesuai kebutuhan termasuk karakter kepribadiannya.

Teritorialitas

Teritori merupakan suatu area yang secara spesifik dimiliki atau dipertahankan, baik secara fisik maupun non fisik dan dengan aturan atau norma-norma tertentu, Haryadi dan Setiawan (2010). Teritori biasanya dipertahankan oleh sekelompok penduduk kota yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling bersepakat untuk mengontrol areanya. Dalam berhubungan dengan lingkungannya manusia juga membutuhkan privasi, yakni keinginan untuk tidak diganggu oleh orang lain sehingga memunculkan perilaku tertentu dalam mempertahankan area yang dianggap miliknya.

Perilaku yang muncul tersebut disebut teritorialitas, yang pada hakekatnya sama dengan ruang personal yakni ; merupakan mekanisme batas untuk mencapai privasi individu atau kelompok, akan tetapi perwujudannya dapat dilihat. Tidak berbeda dengan ruang personal, fungsi teritorialitas juga sebagai media komunikasi namun dalam bentuk personalisasi atau penandaan. misalnya ; penandaan tempat duduk orang yang strata sosialnya tinggi atau berkedudukan dengan orang biasa pada suatu acara perjamuan, atau penandaan kawasan pecinan pada pusat kota lama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fungsinya tersebut, Altman (Dalam Lang 1987) mengklasifikasikan teritori dalam 3 tingkatan, yakni ;

1. Teritori Primer

Teritori primer adalah area atau tempat yang sifatnya sangat pribadi, hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang sangat akrab atau yang telah mendapatkan izin khusus, misalnya ; ruang tidur pada rumah tinggal, ruang direktur pada sebuah kantor.

2. Teritori Sekunder

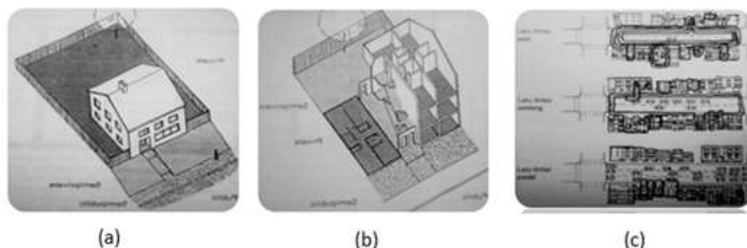
Teritori primer adalah area atau tempat yang dimiliki secara bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal, misalnya ; ruang kelas atau kantor pada suatu sekolah.

3. Teritori Publik

Teritori publik adalah area atau tempat yang mana setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk menggunakannya, seperti ; tempat rekreasi, taman kota, lobby hotel dan sebagainya.

Dalam desain arsitektur, terdapat banyak cara dalam mengolah teritori. Semakin banyak sebuah desain mampu menghadirkan teritori primer bagi penggunaannya, maka desain tersebut dianggap semakin baik. Sebuah ruang arsitektural misalnya ruang terbuka dapat diklaim sebagai teritori publik ataupun yang sifatnya pribadi tergantung pada pencapaian, siapa yang menggunakan ruang ataupun yang bertanggung jawab atas ruang tersebut.

Beberapa contoh implementasi konsep teritori dalam desain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10.5: Hirarki Teritori (a). Hunian Single Family (b) Hunian Multy Family, (c) Rumah Susun Pada Posisi Jalan (Jon Lang 1987)

Kesesakan dan Kepadatan

Kesesakan adalah suatu situasi di mana seseorang atau sekelompok orang sudah tidak mampu lagi mempertahankan ruang personalnya. Apabila situasi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan adaptasi maka memungkinkan terjadinya stress. Keadaan seperti ini merupakan fenomena yang sering dialami dalam berbagai tempat. Hariadi dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa faktor lingkungan diklasifikasikan menjadi faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik menyangkut dimensi tempat, densitas, serta suasana suatu ruang. Faktor sosial meliputi norma, kultur, serta adat istiadat.

Dalam studi sosiologi sejak tahun 1920-an, Altman (dalam Lang 1987) menyatakan bahwa variasi indikator kepadatan berhubungan dengan tingkah

laku sosial. Variasi indikator kepadatan itu meliputi jumlah individu dalam sebuah kota, jumlah individu pada unit tempat tinggal, jumlah ruangan pada unit tempat tinggal, jumlah bangunan di lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Berbagai masalah yang ditimbulkan dari situasi 'kesesakan', maka dalam mendesain suatu objek arsitektural baik itu dalam skala mikro, mezzo maupun makro, sudah seharusnya arsitek akan merencanakan suatu desain yang tentunya menghindari terciptanya kesesakan. Karena salah satu penyebab dari kesesakan adalah kepadatan, maka yang pertama yang akan dilakukan oleh arsitek adalah mengidentifikasi jumlah pengguna, kemudian menyesuaikan jumlah tersebut dengan standar ruang, sehingga besaran suatu ruang untuk suatu fungsi objek dapat ditentukan.

Selanjutnya meminimalisir adalah faktor- faktor lingkungan yang dapat menyebabkan kesesakan, misalnya ; penggunaan warna – warna yang soft dan alami, menghindari sumber kebisingan atau menghadirkan kenyamanan termal di dalam maupun di luar ruang.

Privasi

Privasi adalah suatu kondisi seseorang yang tidak ingin diganggu kesendiriannya oleh orang lain. Rapoport (1977) mengemukakan bahwa privasi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan interaksi mereka dengan orang lain, baik secara visual, audio maupun olfaktori untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk mendapatkan privasi, maka seseorang harus mampu membuat keseimbangan antara keinginannya dengan keinginan orang lain dan lingkungan fisik di sekitarnya. Dalam pandangan Altman, privasi merupakan konsep sentral dari semua proses manajemen ruang. Manakala seseorang gagal mengatur privasinya maka yang akan tercipta kesesakan dan dapat berlanjut hingga ke tingkat stres jika tidak bisa melakukan upaya penyesuaian, lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Altman, privasi merupakan kontrol selektif dari akses pada diri sendiri maupun kelompok. Kata akses pada diri sendiri dapat diartikan lewat berbagai jalan. Misalnya, Presiden sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara saat berdiri diatas balkon atau podium untuk menyampaikan pidatonya, masyarakat dapat melihatnya, dapat mempunyai akses visual. Akan tetapi tidak seorang masyarakat yang dapat bertatap muka dan berbincang dengannya. Artinya presiden memiliki privasi yang tinggi meskipun banyak orang yang melihatnya. Seseorang dapat mencari privasi

dengan mengunci diri dalam kamar kerja untuk bekerja, tetapi membiarkan diri diganggu oleh musik.



Gambar 10.6: Skema Model Privasi yang Dapat Dicapai Dengan Mempertimbangkan Ruang Personal dan Teritorialitas (Lang, 1978)

Sedangkan Kata akses pada kelompok misalnya ada sekelompok remaja ingin merayakan suatu acara seperti pesta ulang tahun, atau bercanda bersama kelompok bermainnya tanpa diganggu kelompok lain, atau bahkan kadang-kadang kita juga ingin berada dalam kesendirian bersama seseorang atau beberapa orang yang kita pilih. Pengertian privasi menunjukkan adanya kontrol selektif tidak serba otomatis, dan privasi tidak berarti menutup semua semua jalur, tetapi mampu mengontrol terbuka dan tertutupnya jalur komunikasi. Privasi termanifestasikan dalam perilaku, tata nilai, kepercayaan, dan harapan. Hal – hal terkait interaksi sosial yang perlu diperhatikan dalam perancangan bertujuan agar setiap orang atau sekelompok orang mendapatkan sebesar mungkin privasi sesuai keinginannya. Beraktivitas dalam suatu tatanan yang memungkinkan bagi seorang individu untuk memilih keterbukaan dan ketertutupan dalam berinteraksi dengan orang lain. Olehnya itu dalam arsitektur hadirlah hirarki ruang, yang meliputi ; ruang privat, semi privat, semi publik dan ruang publik. Rumah tinggal dalam tataran makro adalah objek yang sifatnya prifat, akan tetapi dalam tatanan mikro kamar tidur dalam suatu rumah tinggal adalah area atau tempat yang sifatnya privat.

Beberapa contoh penataan ruang privat pada area publik dan semi publik, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10.7: Penataan Ruang Privat Pada Teritori Publik ‘Taman Kota’(a) dan pada Teritori semi publik ‘Perpustakaan Kampus’ (b)

Daftar Pustaka

- Abas, E. (2015) 'Asas Filosofi Teori Belajar Essensialisme dan Implikasinya dalam Pendidikan', *Lentera*, 2, pp. 103–109.
- Abdullah (2019) 'Paradigma dan Epistologi Dakwah', *Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), pp. 76–94.
- Abdullah, I. (2007) 'Pembangunan Manusia: Filosofi dan Praktis Pembangunan yang Bermartabat', *Populasi*, 18(April), pp. 1–14.
- Abdullah, M. (2011) 'Pengembangan Teori Akuntansi Berbasis Ilmu Filsafat', *Akrual*, 2(2), pp. 136–150.
- Affandi, O. (2016) 'Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan', (January 2002), pp. 0–5.
- Afwadzi, B. (2017) 'Integritas Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial dengan Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Konsepsi, Aplikasi dan Implikasi', *Theologia*, 28(2), pp. 351–390.
- Agung, I. G. N. and Gusti, I. (2008) 'Teori Ekonomi Mikro', PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.

- Al-Attas, S. M. (2013). *Islam The Concept of Religion and The Foundation of Ethics and Morality* (3rd Editio). . Kuala Lumpur: IBFIM.
- Alam, B. (2014) 'Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan', *Antropologi Indonesia*, 30(2), pp. 193–200. doi: 10.7454/ai.v30i2.3564.
- Alatas, S. F. (2003) 'Pengkajian Ilmu-Ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukan Konsep Tega', *Antropologi Indonesia*, 72, pp. 1–23.
- Ali, R.Moh, (1963). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Jakarta : Bhratara.
- Alvin S. Johnson. (1994) *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anderson, Ben., (1988), *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Anderson, L. M. (2002). *Taxonomy for Learning, Teaching, and assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. . New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Annisa Khairah, (2019). Makalah: Konsep Dasar Ilmu Sosial Pada IPS, Dalam https://www.academia.edu/39652930/Makalah_Konsep_Dasar_Ilmu_Sosial_Pada_IPS
- Apomfires, F. (2002) 'Makanan Pada Komuniti Adat Jae: Catatan Sepintas Lalu Dalam Penelitian Gizi (Food among Jae Indigenous Communities: A Brief Note on Nutrition Research)', *Antropologi Papua*, 1(2). Available at: <http://papuaweb.org/uncen/dlib/jr/antropologi/01-02/jurnal.pdf>.
- Apter, D. . (1968) *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall .
- Arindhaayuningtyas, (2012). Konsep Dasar Ilmu Sosial, Dalam <https://arindhaayuningtyas.wordpress.com/2012/05/03/konsep-dasar-ilmu-sosial-2/>
- Arkelin, D-Veitch.R, (1995) *Environmental Psychologi, An Interdisiplinary Perspective*, Bowling Gree State University,
- Aulia Maharani, dkk. (2020). Konsep Dasar IPS dimensi Dan Struktur IPS, Dalam [File:///C:/Users/Hp%20one/Downloads/Makalah%20revisi%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/Hp%20one/Downloads/Makalah%20revisi%20(1).Pdf)

- Aulya, A. (2020) 'Filosofi Sosiologis Globalisasi dan Pembentukan Identitas Keagamaan: Interpretasi Gerakan HTI', *Al-Aqidah, Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, 12(1), pp. 9–28.
- Bakti, T. D., Sumanjaya, R. and Hasution, S. H. (2010) *Pengantar Ekonomi Makro*. USUpres.
- Berger, P. L. (2011). *Invitation to sociology: A humanistic perspective*. Open Road Media.
- Bird, A. (2014). *Thomas kuhn*. Routledge.
- Borgatta, E. F., & Montgomery, R. J. V. (2000). *Encyclopedia of Sociology Vol. 1*. Macmillan Reference USA, New York.
- Bottomore, T. (1975). *Competing paradigms in macrosociology*. *Annual Review of Sociology*, 1, 191–202, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Broadbent Geoffrey, (1973) *Design in Architecture*, John Wiley & Son, New York
- Browne, K. (2005). *An introduction to sociology*. Polity.
- Cameron, J. E., Kocum, L. and Berry, J. W. (2020) 'Security and attitudes toward globalization: A multilevel analysis', *Journal of Social and Political Psychology*. *PsychOpen*, a publishing service by Leibniz Institute for Psychology (ZPID), Trier, Germany (www.leibniz-psychology.org), 8(2), pp. 805–822. doi: 10.5964/jpspp.v8i2.418.
- Chapin, J. R. (1996). (1996). *Elementary social studies (3rd ed.)*. New York: Longman Publisher, USA.
- Chapra, M. U. (2001) *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context*. London: Kogan Page.
- Collingwood, R.G. (1985). *Idea Sejarah*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

- Cornell, S. (2020) 'History, text, tradition, and the future of second amendment jurisprudence: Limits on armed travel under anglo-american law, 1688-1868', *Law and Contemporary Problems*, 83(3), pp. 73–95.
- Cuff, E.C., & Payne, G.C.F. (eds.). (1979). *Perspectives in sociology*. London: George Allen & Unwin, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora*. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Damanik, B. and Agustina, E. (2018) 'Legal Protection of Medical Records as Evidence Tool in Law Enforcement Process', *International Journal of Science and Research*, 9(1), pp. 1–6. doi: 10.21275/ART20203795.
- Darmoko, M. (2017). *LGBT Effect and its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective)*. 1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH), 209–219.
- Darsono, M.Pd. Widya Karmilasari A, (2017). *Sumber Belajar Penunjang Plpg 2017 Kompetensi Profesional, Dalam* <https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/f113/PLPG2017/Download/materi/SD/ILMU-Pengetahuan-Sosial.pdf>
- David E After (1965) *The Politics Of Modernitation*. Chicago: Chicago University Press.
- Depdikbud. (1994). *Kurikulum Program D-2 [Curriculum for D-2 program]*. : . Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan.
- Dorothy J. Skeel, (1979). Dalam S.P. Taneo, tanpa tahun, *Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Dalam* https://www.Academia.Edu/35516886/Konsep_Dasar_Ilmu_Ilmu_Sosial.
- Dosen Sosiologi, (2020). *Manfaat Ilmu Sosial Secara Umum, Dalam* <https://dosen sosiologi.com/manfaat-ilmu-sosial/>
- Dumatubun, A. E. (2002) 'Kebudayaan , Kesehatan Orang Papua', *Antropologi Papua*, 1(1), pp. 1–10.
- Durkheim, E. (1973). *Emile Durkheim on morality and society*. University of Chicago Press.

- Durkheim, E. (2004). *Readings from Emile Durkheim*. Psychology Press.
- Eluang, P. and Antangan, P. E. D. A. N. T. (2010) 'Ilmu Sosial di Indonesia: Peluang, Persoalan dan Tantangan', *Masyarakat dan Budaya*, (Edisi khusus), pp. 189–206.
- Fatihudin, D. (2020) 'METODOLOGI PENELITIAN untuk ILMU EKONOMI, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI-EDISI REVISI Lengkap Contoh Kasus'. Penerbit Zifatama Publisher.
- Fellow, L., Ruben, E. and Blocher, J. (2018) 'Geography of Constitutional Right', 570.
- Feriyansyah, F., Iqbal, M. dan Simarmata, J. (2019) *Kewargaan Digital: Warga Digital Dalam Kepungan Hiperkoneksi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Fischhoff, E. (1944). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism: The history of a controversy*. *Social Research*, 53–77.
- Fithriatus Shalihah. (2017) *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Freire, P. (1999) 'Politik Pendidikan: kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan', Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Funk and Wagnalls, (1876). *New Encyclopedia*, New York, London, Toronto: Printed Hall Company.
- G.S Diponolo (1975) *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gazalba, Sidi, (1966). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta : Bhratara.
- Giddens, A., & Griffiths, S. (2006). *Sociology*. Polity press.
- Gie, T. L. (1999). *Pengantar Filsafat Ilmu* . Yogyakarta: Liberty.
- Goodin, R. E. and Klingemann, H. (2003) 'Political Science: The Discipline', in *A New Handbook of Political Science*, pp. 3–49. doi: 10.1093/0198294719.003.0001.
- Gottschalk, Louis, (2006). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (terj. Nugroho Notosutanto). Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Haryadi dan Setiawan, (2014), *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Universitas Gadjah Mada
- Hasoloan, J. (2010) *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Deepublish.

- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2017. Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Dalam Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia/ Ignas Kleden, Taufik Abdullah – Jakarta: LIPI Press, SBN 978-979-799-880-6, 1. Ilmu Sosial, 2. Humaniora, 3. Paradigma
- Hermanto et al. (2012) ‘Filosofi Hidup Sebagai Basis Kearifan Lokal (Studi pada Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidu)’, GEA: Jurnal Pendidikan Geografi, 12(April), pp. 1–14.
- Heywood, A. and Heywood, A. (1997) ‘Representation, Elections and Voting’, in Politics, pp. 205–228. doi: 10.1007/978-1-349-25543-6_11.
- Ihromi, T. O. (1999). Pokok-pokok antropologi budaya. Yayasan Obor Indonesia.
- Inkeles, A. (1964). What is sociology?. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Jack C Plano (1985) Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali Press.
- Jack H Nagel (1974) Descriptive Analysis Power. Yale University Press.
- James G. Womack, (1970). Dalam S.P. Taneo, tanpa tahun, Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, https://www.Academia.Edu/35516886/Konsep_Dasar_Ilmu_Ilmu_Sosial.
- Johnson, N. J. (2018) ‘Defiance, Concealed Carry, and Race’, 837(2008).
- Junaidi, J. and Zulgani, Z. (2011) ‘Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah’, Jurnal Pembangunan Daerah, 3, pp. 27–33.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun. Arti Kata Landasan, Dalam <https://jagokata.com/arti-kata/landasan.html>
- Kartodirdjo, Sartono, (1984). Pemberontakan Petani Banten 1888, Jakarta: Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya.

- Kartodirdjo, Sartono, (2019). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kartodirdjo, Sartono, (2020). Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kucklick, H. (1972). A 'scientific revolution': Sociological theory in the United States. *Sociological Inquiry*, 43, 2–22, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Kuhn, T. (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Second Edition, Enlarged, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Kulaksız, E. (2015) 'To What Extent does Culture Create Language Learning in Terms of Proxemics?', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., 199(1963), pp. 695–703. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.600.
- Kuntowijoyo, (1997). Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo, (2003). Metodologi Sejarah, Edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kvasz, L. (1999). On classification of scientific revolutions. *Journal for General Philosophy of Science*, 30, 201–232, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- L.J. Van Alpeldoorn (1983). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

- Laeyendecker, L. (1967). The Development of Sociology of Religion in the Netherlands since 1960. *Social Compass*, 14(1), 58–66.
- Laksono, P. M. (2013) ‘Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia’, *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1), pp. 101–111. doi: 10.15294/komunitas.v5i1.2381.
- Lang Jon, (1987) *Creating Architecture Theory, The Role Of The Behavioral Science in Enviromental design*, Van Nostrand Reinhold, New York
- Lucas, Anton E. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti.
- Machfudz, M. (2016) ‘Teori ekonomi makro’. UIN-Maliki Press.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahyudi, D. (2006) ‘Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam’, *Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam*, 34(11), pp. 205–228.
- Manullang, Sardjana Orba. (2019). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhidik-Phronesis.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: CV Cendekia.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: CV Cendekia.
- Marcella Joyce, (2004) *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, PT.Grasindo, Jakarta
- Marzuki, I. et al. (2020) *Pengembangan Desa Cerdas Berorientasi Organik dan Teknologi Informasi*. Makassar: Tohar Media.
- Massoed, M. (1994) *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3ES.
- Masterman, M. (1970). The nature of a paradigm. Dalam I. Lakatos & A. Musgrave (eds.), *Criticism and the growth of knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press. Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.

- Masterman, M. (1970). The nature of a paradigm. Dalam I. Lakatos & A. Musgrave (eds.), *Criticism and the growth of knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Mastur. (2013). Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, *Jurnal, Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Semarang, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim.
- Merton, R.K. (1968). *Social theory and social structure* (enlarged edition). New York: Free Press, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Merton, R.K. (1968). *Social theory and social structure* (enlarged edition). New York: Free Press, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Meyer, D. (2010). Evaluating the severity of hate-motivated violence: Intersectional differences among LGBT hate crime victims. *Sociology*, 44(5), 980–995.
- Miliband, R. (1965) 'Marx and the State', *The Socialist Register*.
- Miriam Budiardjo (2007) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mishra, S. and Anand, S. (2020) 'Migration and Dietary Diversity Changes among the Students: Case Study of the University of Delhi in India', *Space and Culture, India*, 8(3), pp. 58–70. doi: 10.20896/saci.vi0.906.
- Mithcell, J. (1969) *Political Analysis & Public Policy: An Introduction to Political Science*. United State: Skokie.
- Morriss, P. (2006) 'Steven Lukes on the concept of power', *Political Studies Review*. doi: 10.1111/j.1478-9299.2006.000104.x.

- Muchtar, K., Koswara, I. and Setiawan, A. (2016) 'Jurnal Manajemen Komunikasi Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi', *Jurnal Management Komunikasi*, 1(1), p. 1/16.
- Muhtamar, S. and Ashri, M. (2020) 'Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern', *Filsafat*, 30(1), pp. 123–149. doi: 10.22146/jf.42562.
- Natasya Virginia Leuwol, P. W. et al. (2020) *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi*. 1st edn. Edited by J. Simarmata. Medan. Available at: <https://kitamenulis.id/2020/10/07/pengembangan-sumber-daya-manusia-perguruan-tinggi-sebuah-konsep-fakta-dan-gagasan/>.
- NCSS. (1994). *Task Force of the National Council for the Social Studies Curriculum standard for social studies*. Washington, DC: Bulletin 89 : NCSS.
- Nelson, M. (1987). *Children and social studies: Creative teaching in the elementary classroom*. Orlando, Florida: Harcourt Brace Jovanovic, Inc.
- Norberg Schulz Christian, (1977), *Intention in Architecture*, The M.I.T Press Cambridge Massachusetts
- Nordlinger, E. A. (1994) *Taking the State Seriously*.
- Notosusanto, Nugroho, (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Jakarta : Inti Idayu Press.
- O. K. Chairuddin. (1991). *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohlendorf, D. et al. (2020) 'Standard reference values of weight and maximum pressure distribution in healthy adults aged 18–65 years in Germany', *Journal of Physiological Anthropology*. *Journal of Physiological Anthropology*, 39(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s40101-020-00246-6.
- Ohlendorf, Daniela et al. (2020) 'Standard reference values of the postural control in healthy female adults aged between 31 and 40 years in Germany: An observational study', *Journal of Physiological Anthropology*. *Journal of Physiological Anthropology*, 39(1), pp. 1–7. doi: 10.1186/s40101-020-00229-7.
- Özçelik, G., Aybas, M. and Uyargil, C. (2016) 'High Performance Work Systems and Organizational Values: Resource-based View Considerations', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. The

- Author(s), 235(October), pp. 332–341. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.11.040.
- Parinduri, L. et al. (2020) *Manajemen Operasional : Teori dan Strategi*. Edited by Janner Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2020/10/15/manajemen-operasional-teori-dan-strategi/>.
- Parsons, T. (1949). *The structure of social action* (Vol. 491). Free press New York.
- Passini, S. (2020) ‘The relationship between value and ideological orientations using the refined theory of basic values’, *Journal of Social and Political Psychology*, 8(2), pp. 708–720. doi: 10.5964/jspp.v8i2.1177.
- Percival, W.K. (1976). The applicability of Kuhn’s paradigms to the history of linguistics. *Language*, 52(2), 285–294, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Popper, K. (1959). *The logic of scientific discovery*. New York: Harper and Row, Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Priyarsono, D. S. (2017) ‘Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional’, *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(1), pp. 42–52.
- Purba, B. (2013) ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan PDB, Suku Bunga SBI, IHK, Cadangan Devisa, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar di Indonesia’, *Jurnal Saintech Universitas Negeri Medan*, 5(01).
- Purba, B. (2019) ‘Effects of Economic Agglomeration and Labor Productivity on Income Disparities in the East Coast Region of North Sumatera–Indonesia’, in *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan*.

- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Sudarmanto, E., et al. (2020) *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, P. B. et al. (2020) *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. Edited by R. Wattrianthos. Meda: Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kita-menulis.id/2020/12/14/dasar-dasar-manajemen-pendidikan/>.
- Putong, I. (2015) *EKONOMI MAKRO: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Untuk Mahasiswa*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
- Ramlan Surbakti (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Rapoport Amos (1977), *Human Aspect*, Prentice Hall, inc, Engelwood Clifs New Jersey
- Rapoport Amos, (1969), *House Form and Culture*, Prentice Hall, inc, Engelwood Clifs New Jersey
- Reiss Jr, A. J. (1967). *Sociology*.
- Restivo, S. (1983). The myth of Kuhnian revolution. *Sociological Theory*, 1, 293–305. Dalam Ahimsa-Putra, H.S (2009). *Paradigma Ilmu sosial-budaya: Sebuah pandangan*. Makalah dalam Ceramah Umum Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora. Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Richard Rose (1969) *Policy Making in Great Britain*. McMillan.
- Ritzer, G. (1997). *Postmodern social theory*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=DJoPAQAAMAAJ>
- RITZER, G. D. D. J. G. (2007) ‘Teori Sosiologi Modern’, *Protein Science*, pp. 733–743.
- Ritzer, George. (1975). *Sociology: A multiple paradigm science*. *The American Sociologist*, 156–167.
- Robert Dahl (1974) *Polyarchy, Participation and Opposition*. London: Yale University Press.
- Romadhina, A. P. (2020) ‘Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro’. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM).

- Rosyada, D. (2018) 'Good Governance and Human Right: The Experience Of Indonesia As The Biggest Muslim Country In The World', in. doi: 10.2991/iclj-17.2018.31.
- Ruswanto, W. (2014) 'Ruang Lingkup Ilmu Antropologi', *Ruang Lingkup Antropologi*, 1(2), pp. 1–46. Available at: <http://repository.ut.ac.id/4295/1/ISIP4210-M1.pdf>.
- S.P. Taneo, (2005). Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Dalam https://www.Academia.Edu/35516886/Konsep_Dasar_Ilmu_Ilmu_Sosi_al.
- Sabari, J. (2011) 'Metode Ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial', *Agastya*, 1, pp. 117–132.
- Sabian Utsman (2013) *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sabin, N. S. et al. (2020) 'Implications of human activities for (re)emerging infectious diseases, including COVID-19', *Journal of Physiological Anthropology*. *Journal of Physiological Anthropology*, 39(1), pp. 1–12. doi: 10.1186/s40101-020-00239-5.
- Santyasa, I. W. (2005). Model Pembelajaran inovatif dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi,. Jember juni-juli: Makalah disampaikan Dalam Penataran Guru-Guru SMP, SMA, dan SMK se Kabupaten Jember Juni–Juli.
- Sanusi Uwes, (2001). Pengertian Landasan, Dalam <http://ineusintiawati.blogspot.com/2012/03/pengertian-landasan.html>
- Sanusi, A. (1998). Pendidikan alternatif: Menyentuh azas dasar persoalan pendidikan dan kemasyarakatan. Bandung: PT. Grafindo media pratama.
- Sapriya, (2018). Landasan Pendidikan IPS (Penjelasan Terlengkap), Dalam <https://pendidikanrosda.blogspot.com/2018/11/landasan-pendidikan-ips.html>
- Saragih, Megasari Gusandra & Sardjana Orba Manullang (2020). *Marketing Era Digital*. Medan Penerbit Andalan.
- Sari, A. P. et al. (2020) *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Satjipto Rahardjo. (2010) *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

- Seignobos. Ch & Langlois.Ch.V, (1904). Introduction to the Study of History, (terjemahan) New York : Henry Holt and Company.
- Selo Soemardjan, (1962), Sosial Change in Jogjakarta, Ithaca, Cornell University Press, New York, hal 379
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar sosiologi politik. Kencana.
- Sherly, S. et al. (2020) Pemasaran Internasional. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, L. (2002) ‘Antropologi dan Konsep Kebudayaan’, Jurnal Antropology Papua, 1(1), pp. 1–10.
- Skopol, Theda, (1991). Negara dan Revolusi Sosial, Suatu analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sodiqin, A. (2013) ‘Antropologi al-Quran’, Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), pp. 1–21.
- Soerjono Soekanto, (1982), Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, hal 306
- Soerjono Soekanto, (1988), Memperkenalkan Sosiologi, Rajawali Press Jakarta, hal 8
- Soetandyo Wignjosebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma).
- Somantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosdakarya.
- Sudarmanto, E. et al. (2020) Etika Bisnis. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E. et al. (2020) Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat; Pembangunan dan Pemberdayaan. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2020/12/22/konsep-dasar-pengabdian-kepada-masyarakat-pembangunan-dan-pemberdayaan/>.
- Sudjatnika, T. (2018) ‘Filosofi Hidup Komunitas Masyarakat Adat Sunda Kampung Naga Ditinjau dari Pranata Keagamaan’, Al-Tsaqafa, 15(1), pp. 69–76.
- Suhelmi, A., Barat, P. P. and Utama, G. P. (2007) ‘Pemikiran politik Barat’, Repository dinus.ac.id.

- Sulasman, (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, contoh Aplikasi*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sulastriyono (2014) 'Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia', *Yustisia*, 90(4), pp. 97–108.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Supardan, D. (2017). *Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial*.
- Susanto, H. (2014) 'Konsep Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan', *Muaddib*, 04(02), pp. 93–114.
- Sutrasno, (1975). *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan (History & Science)*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Syafnidawaty, (2020). Landasan Teori, Dalam <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/>
- Syamsuddin, Helius, (2007). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Tamburaka, Rustam.E. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat & IPTEK*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Tamrin, A. (2019) 'Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu', *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*, 6(1), pp. 71–96. doi: 10.15408/sjsbs.v6i1.10490.
- Tasmuji et al. (2018) *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*. UIN Sunan Ampel Press.
- Team Dosen, (2011), *Bahan Perkuliahan Konsep Dasar IPS, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed*, Dalam <http://digilib.unimed.ac.id/20114/1/Fulltext.pdf>
- Tim Penyusun Kamus, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjptoherijanto, P. and Soesetyo, B. (2019) 'Ekonomi kesehatan'.
- Toulmin, S.E. (1970). Does the distinction between normal and revolutionary science hold water?. Dalam I. Lakatos & A. Musgrave (eds.), *Criticism and the growth of knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, Dalam

- Tseole, N. P. and Vermaak, K. (2020) 'Exploring the Influences of Hegemonic and Complicit Masculinity on Lifestyle Risk Factors for Noncommunicable Diseases Among Adult Men in Maseru, Lesotho', *American Journal of Men's Health*, 14(6). doi: 10.1177/1557988320958931.
- Weber, M. (2004). *The essential Weber: a reader*. Psychology Press.
- Weber, M. (2017). *Methodology of social sciences*. Routledge.
- Wicaksono, Michael, (2015). *Republik Tiongkok (1912-1949) ; Dari runtuhnya Kekaisaran Qing Hingga Lahirnya Salah Satu Republic Terkuat Di Dunia*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Wulansari Dewi, (2009), *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang (2008), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Yevita Nurti (2017) 'Kajian Makanan dalam Perspektif Antropologi', *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6(1), pp. 51–66. Available at: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Yogapermanawijaya, (2014). *Esensi Dan Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Budaya, Dan Kealaman, Dalam* <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/15/esensi-dan-konsep-dasar-ilmu-ilmu-sosial-budaya-dan-kealaman/>
- Young, A. (2014) 'Medical Belief and Externalizing Systems : an Ethiopian', *Social science & medicine* (1976), 10(3), pp. 147–156.
- Zainudin Ali. (2005) *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Biodata Penulis



Syafrizal, Drs. H. M.Si., Ph.D., Lahir di Rumbio, Kampar Riau, Tanggal 31 Desember 1966. Menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Riau (1993), Pada Program Studi PPKn, dengan Gelar (DRS), Melanjutkan S2 di Universitas Negeri Medan (2004), Pada Program Studi Antropologi Sosial, dengan Gelar (M.Si), dan Kemudian Mendapat Tugas Belajar Untuk Program Doktorat (S3) di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia Pada Tahun 2016, Pada Program Studi Antropologi Sosiologi, dengan Gelar (Ph.D). Bekerja Sebagai Dosen

Dpk LL2DIKTI Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sejak Tahun 1997. Status Sudah Menikah (Beristri) dengan Ny. Erna Amin Syukri, dengan 5 (lima) Orang Anak (Giandiva Fahlika Erizal (S2 Kenotariatan) USU, Febby Annisa Zaufany (S1 Teknik Kecantikan) Unimed, Ahmad Glenn Alzahrawi dan Alkahfy Rambah (Aliyah Tahfizil Qur-an Pompes Dalwah Jawa Timur, Atthya Healthy Larissa SD Nurul Ilmi Medan. Alamat Rumah; Jalan Veteran Purnawirawan Blok. E, No. 20 Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara. Riwayat Pekerjaan, Pernah Menjadi Wakil Dekan I Bidang Akademik Di FISIP UMSU Selama Dua (2) Periode. Sekarang dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala/ IV-B Sejak Tahun 2008. Pernah Mengikuti Pelatihan atau Kursus Bertarap Nasional seperti Kursus Calon Dosen (SUSCADOS) Kewiraan (Kewarganegaraan), Pada Tahun 1998, Sampai Saat ini Masih Membawa Mata Kuliah Kewarganegaraan. Bidang Kepakaran Adalah Antropologi Sosiologi; Khususnya Kajian-Kajian Sosial Budaya, Etnisitas, Konflik, Perubahan Sosial, Ideologi, Globalisasi, Kearifan Lokal, Politik Lokal, Otonomi Daerah, Perilaku Sosial, Strootif dan Primordialisme, Demokrasi, Hak Azazi manusia, dan Kajian Wanita, serta Isu dan Fenomena Sosial lainnya yang Berkembang di Dalam Masyarakat.



Dr. Ismail Marzuki, M.Si, lahir di Kabere, 03 Juli 1973. Pendidikan formal yang telah diikuti SD Negeri 19 Kabere Tahun 1980-1986, SMP Negeri Kabere Tahun 1986-1989, dan SMA Negeri 1 Enrekang 1989-1992. Gelar sarjana Sains (kimia) disandang tahun 1999, di Jurusan Kimia F.MIPA UNHAS, dan gelar Magister Sains (M.Si) Tahun 2003. Menyelesaikan program Doktor Pada Bulan Januari tahun 2016, Program Pascasarjana UNHAS.

Karir sebagai akademisi dimulai tahun 2000 hingga sekarang. Status PNS (Dosen) diperoleh pada Tahun 2005, pada unit kerja Kopertis (L2dikti) Wil. IX Sulawesi. Jabatan struktural yang pernah di sandang, yakni: Direktur Akademi Analis Kimia Yapika Makassar, (Tahun 2002-2008), Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yapika Makassar (Tahun 2008-2012). Ketua Stikes Bina Mandiri Gorontalo (Tahun 2014-2015), Di mutasi ke Universitas Fajar (UNIFA) Tahun 2015, Prodi home base Teknik Kimia. Tugas tambahan yang diamanahkan oleh UNIFA adalah Pimred Jurnal Techno Entrepreneur Acta (2016-sekarang), Ketua Unit Pusat Karir UNIFA (Tahun 2016-2018) dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal UNIFA, (2019-2020), serta Dekan Fak. Pascasarjana Univ. Fajar, (2020-sekarang). Sejak pandemi Coviv-19 dan masa pemulihan dengan kebiasaan hidup baru bergabung dalam komunitas Yayasan Kita Menulis, yang hingga saat ini telah menulis 15 chapter pada 15 judul buku yang berbeda.



Muhammad Iqbal adalah pengajar tetap di Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Menyelesaikan pendidikan S2 Sosiologi FISIP USU. Saat ini menaruh minat terhadap kajian sosiologi pendidikan, cyber society dan soiologi alih teknologi.



Syamsul Bahri, M.Pd. lahir di Nipah Panjang, Kab.Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, 16 November 1974. Penulis seorang suami, ayah dari dua orang anak.

Pernah sekolah di SD 31/V Nipah Panjang I Jambi. Perguruan Thawalib Putra Padang Panjang tamat 1996. S. 1 jurusan Tafsir Hadis IAIN Imam Bonjol Padang tamat 2000. S. 2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kosentrasi Sosiologi/Antropologi di UNP tahun 2005.

Alamat domisili penulis di Perumahan Bintang Rizano Regency Blok C/5 Balai Labuah Ateh Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Alamat tempat tugas penulis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang. Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang. Kabupaten Tanah Datar. Provinsi Sumatera Barat.

Penulis CPNS formasi Penghulu tahun 2006. Pernah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus dan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Tahun 2013 pindah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Saat ini, Desember 2020 penulis selain sebagai Penghulu mengemban amanah tugas tambahan kepala KUA Kecamatan Sungayang Provinsi Sumatera Barat.



Dr. Bonaraja Purba, M.Si, Lulus Sarjana Pendidikan (S1) dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Ilmu Ekonomi (S2) dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor Ilmu Ekonomi (S3) juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini selalu aktif menulis jurnal nasional dan jurnal internasional, buku ajar dan buku referensi, dan berkarir sebagai Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Telah menulis lebih dari 50 judul Buku Ekonomi, Manajemen, Agribisnis, dan Pendidikan, yang telah diterbitkan oleh berbagai Penerbit.



Dr. Hisarma Saragih, M.Hum., adalah dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun (USI), dan Program Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USI. Lahir di Merek Situnggaling pada 9 Januari 1964. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri 2 di Pamatang Raya thn 1975, ; SMP Negeri 1 Pamatang Raya thn 1979; SMA Negeri Seribudolok thn 1982.

Memperoleh gelar Sarjana (Drs) dari Jurusan Sejarah FS USU Medan thn 1988. Memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta thn 2000. Meraih Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan dengan predikat Cumlaude thn 2018.

Jabatan yang pernah dipangkunya yaitu: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998) ; Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014 Direktur Badan Penjaminan Mutu Univ. Simalungun 2015-2019.

Aktif sebagai nara sumber tingkat lokal, regional dan nasional. Beberapa karya ilmiah nasional, dan internasional yang diterbitkan : Buku Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942 Ombak: Yogyakarta, 2019.; Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ; Sejarah Simalungun (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.) ; Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan. Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnics Daily Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Social Environment, <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1590888>.; Socio-cultural change

influences the changes of Simalungun religion, (2020) Asian Ethnicity, DOI: 10.1080/14631369.2020.1792269. <https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1792269>). Menulis buku dan sebagai editor: Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun, ISBN: 978-623-6761-75-5. Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2020.



Windawati Pinem S.Sos, M.I.P. Penulis merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Medan. Dilahirkan di Sidikalang, 16 Juli 1986. Pernah mengenyam sekolah dasar (SD) di Lubuk Pakan, SLTP di Medan, dan SMAN 17 Medan. Penulis merupakan alumni S1 Ilmu Politik USU dan S2 Ilmu Politik UI. Adapun karya yang pernah dihasilkan yaitu buku “Teaching From Home” yang di terbitkan di masa pandemi covid 19.



Sardjana Orba Manullang, Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta Konsultan Kekayaan Intelektual Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Mengingat dasar pendidikan adalah sosiologi dan hukum, maka banyak berkecimpung dibidang sosiologi hukum dan juga relatif banyak mengikuti permasalahan sosial dan kemasyarakatan

Beberapa kali sudah menjadi saksi-ahli baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk bidang ilmu yang dikuasainya. Saat ini sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian

termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)



Jamaludin, dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 19 februari 1988, menyelesaikan Studi S1 di FKIP Universitas Riau dan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini menjadi dosen tetap di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Terlibat aktif dalam penulisan buku dan penelitian tentang pendidikan dan pembelajaran, serta berpartisipasi sebagai narasumber dan moderator di beberapa diskusi publik.



Faizah Mastutie. Lahir di Makassar 24 Agustus 1970, dari pasangan Hamzie Malawat dan Masmirah Machien. Menempuh pendidikan strata satu (S1) Teknik Arsitektur di Universitas Hasanuddin Makassar (1997) dan strata dua (S2) Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada (2001). Saat ini penulis berprofesi sebagai staf pengajar di Universitas Fajar Makassar. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan fokus pada kajian Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku, diantaranya ; Penataan Ruang Publik di Permukiman Padat Kota dengan Pendekatan Participatory Design, Model Penataan Jalan pada Lahan Berkontur di Perumahan Subsidi dengan metode Behavior Mapping, Konsep Penataan Pedestrian di Kawasan antara Permukiman dan Perdagangan di Kota Manado melalui pendekatan arsitektur, lingkungan dan perilaku.

PENGANTAR ILMU SOSIAL

Kita dapat mengamati dan menghayati sendiri, bahwa sejak lahir telah berhubungan dengan orang atau pihak lain, paling tidak dengan ibu dan anggota keluarga lainnya. Pada perkembangan dan pertumbuhan individu itu selanjutnya, hubungan dengan pihak lain itu tidak lagi hanya terbatas dalam keluarga, melainkan telah menjangkau teman sepermainan, para tetangga, dan demikian seterusnya. Hubungannya pun tidak sepihak melainkan timbal balik. Atau dengan perkataan lain, terjadi interaksi antara seorang individu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, interaksi tadi, kita konsepkan sebagai interaksi sosial.

Buku ini membahas tentang:

Bab 1 Konsep Dasar Dan Landasan Ilmu-Ilmu Sosial

Bab 2 Perbedaan Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Ilmu-Ilmu Alam, dan
Hubungan Antara Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Ilmu-Ilmu Alam

Bab 3 Sosiologi

Bab 4 Antropologi

Bab 5 Ilmu Ekonomi

Bab 6 Sejarah

Bab 7 Ilmu Politik

Bab 8 Sosiologi Hukum

Bab 9 Tujuan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dipersekolahan Dan
Perkembangannya

Bab 10 Sosiologi Dalam Arsitektur



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6840-53-5 (softcover)



9 786236 840535